

Ekonomi India: Kejutan Pertumbuhan 7,8% di Tengah Konflik Timur Tengah

Jumat, 5 Juni 2026 18:29 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-india-kejutan-pertumbuhan-78-di-tengah-konflik-timur-tengah>

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Di luar dugaan, India sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di periode Januari-Maret 2026. National Statistics Office India mengumumkan, Jumat (5/6/2026), produk domestik bruto (PDB) negara ini tumbuh 7,8% di periode Januari-Maret 2026.

Peningkatan produksi pertanian dan aktivitas konstruksi yang lebih cepat membantu negara ini mengimbangi melemahnya permintaan eksternal yang berasal dari konflik Timur Tengah. Angka tersebut jauh di atas konsensus proyeksi ekonom, yakni 7,2%.

Namun, dibandingkan periode Oktober-Desember 2025, angka Januari-Maret menunjukkan perlambatan marginal. Pemerintah merevisi pertumbuhan untuk periode Oktober-Desember 2025 menjadi 8,0%, dari data awal yang diumumkan, sebesar 7,8%.

Nilai tambah bruto atawa gross value added (GVA), ukuran lebih akurat yang mendasari aktivitas ekonomi, tercatat tumbuh 7,9% selama kuartal Januari-Maret. GVA menghilangkan komponen yang fluktuatif dari akun nasional, seperti pajak tidak langsung dan subsidi pemerintah.

Reuters melaporkan, National Statistics Office India memperkirakan pertumbuhan PDB setahun penuh, yang berakhir pada bulan Maret, sebesar 7,7%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan yang dibuat di Februari, yakni sekitar 7,6%.

Kepala Penasihat Ekonomi India V. Anantha Nageswaran memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada tahun fiskal saat ini sebesar 7%-7,4%. Tapi proyeksi ini dirilis sebelum konflik Timur Tengah dimulai.

India menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang paling terpuak oleh perang Iran yang telah berlangsung selama empat bulan. India adalah importir dan konsumen minyak mentah terbesar ketiga di dunia, dan sangat bergantung pada pasokan dari Timur Tengah.

Menurut proyeksi bank sentral India, perang Timur Tengah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi India menjadi 6,6% pada tahun fiskal ini. Bank sentral India mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah dan memberi sinyal kemungkinan pergeseran kebijakan moneter yang lebih ketat akibat tekanan inflasi dan pelemahan rupee.

Inflasi domestik India diperkirakan akan meningkat dan neraca fiskal serta neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar. Musim hujan yang mengecewakan, dengan curah hujan terendah dalam 11 tahun, juga dapat merugikan pertumbuhan ke depan.

Produksi manufaktur India masih meningkat 7,3% secara tahunan pada Januari-Maret. Tapi realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan revisi pertumbuhan sebesar 12,8% pada kuartal sebelumnya.

Sementara aktivitas konstruksi berada di angka 8,4%, naik dari revisi pertumbuhan sebesar 6,7% pada kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan produksi pertanian, sektor yang mempekerjakan lebih dari 40% dari angkatan kerja, tercatat sebesar 3,6% pada kuartal keempat tahun 2025/26, dibandingkan dengan revisi 1,7% pada kuartal sebelumnya.

Bank Sentral India Tahan Suku Bunga di Level 5,25%, Saat Rupee Melemah

Jumat, 5 Juni 2026 12:16 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-india-tahan-suku-bunga-di-level-525-saat-rupee-melemah>

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Bank Sentral India alias Reserve Bank of India (RBI) pada Jumat (5/6/2026) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (repo rate) di level 5,25%, memilih untuk mengabaikan pelemahan rupee sementara dan menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hampir 80% dari 56 ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan RBI akan menahan suku bunga. Keputusan tersebut juga diambil secara bulat oleh seluruh enam anggota komite kebijakan moneter (MPC), yang terdiri dari tiga pejabat bank sentral dan tiga anggota eksternal, dengan mempertahankan sikap kebijakan netral.

Gubernur RBI Sanjay Malhotra mengatakan bank sentral mencatat bahwa kondisi ekonomi global telah memburuk, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menentukan arah kebijakan.

“Dewan menilai lebih bijaksana untuk menunggu hingga muncul kejelasan yang lebih besar,” ujarnya saat mengumumkan keputusan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa inflasi diperkirakan meningkat, meski tekanan harga dasar masih relatif terkendali.

RBI merevisi proyeksi ekonominya untuk tahun fiskal berjalan. Inflasi ritel rata-rata kini diperkirakan mencapai 5,1%, naik dari proyeksi sebelumnya 4,6%, sementara inflasi inti direvisi menjadi 4,7% dari sebelumnya 4,4%.

Meski demikian, inflasi India masih berada dalam kisaran toleransi bank sentral 2%–6%, dengan target tengah sebesar 4%, sehingga RBI masih memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga.

Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi justru diturunkan menjadi 6,6%, dari sebelumnya 6,9%. Pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2026, ekonomi India diperkirakan tumbuh 7,6%, dengan data resmi akan dirilis pada hari yang sama.

Malhotra menyebut risiko global dan kemungkinan melemahnya musim monsun dapat menjadi faktor yang menekan pertumbuhan ke depan, meskipun indikator ekonomi frekuensi tinggi seperti produksi industri dan indeks manufaktur masih menunjukkan momentum yang stabil.

Keputusan RBI muncul di tengah tekanan global akibat lonjakan harga minyak dan arus keluar dana asing yang menekan nilai tukar rupee hingga mendekati rekor terendah, turun hampir 5% sejak konflik di kawasan Teluk meningkat pada Februari.

Meski ada tekanan pada mata uang, pasar keuangan bereaksi relatif tenang. Imbal hasil obligasi pemerintah India tenor 10 tahun turun tipis ke 6,96%, sementara rupee melemah ringan ke 96,72 per dolar AS. Indeks saham utama justru menguat tipis sekitar 0,2%.

Sejumlah bank sentral di kawasan Asia sebelumnya telah mengambil langkah berbeda: Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka menaikkan suku bunga untuk menopang mata uang, sementara Korea Selatan menahan diri namun memberi sinyal perubahan kebijakan.

Inflasi Thailand Mei Naik 2,79%, Di Bawah Perkiraan Pasar

Jumat, 5 Juni 2026 10:42 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-thailand-mei-naik-279-di-bawah-perkiraan-pasar>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Indeks harga konsumen (CPI) Thailand naik 2,79% pada Mei dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Kementerian Perdagangan, Jumat (5/6).

Angka ini lebih rendah dari perkiraan kenaikan 3,10% menurut jajak pendapat Reuters, dan sedikit turun dari kenaikan 2,89% pada April. Kenaikan April merupakan lonjakan tahunan pertama dalam CPI utama sejak Maret 2025, dan yang terbesar sejak Februari 2023.

Sementara itu, CPI inti yang mengecualikan harga energi dan bahan makanan segar yang fluktuatif naik 0,92% dibandingkan tahun sebelumnya.

Nantapong Chiralerspong, Kepala Kantor Strategi dan Kebijakan Perdagangan, memperkirakan inflasi utama Juni akan meningkat dan berpotensi mencapai 3%.

Meski begitu, kementerian tetap mempertahankan perkiraan inflasi sepanjang tahun ini di kisaran 1,5%–2,5%, masih berada dalam target Bank Sentral Thailand sebesar 1%–3%.

Bank Sentral China (PBOC) Akhiri Jeda 2 Hari, Gelontorkan 215 Miliar Yuan ke Pasar

Jumat, 5 Juni 2026 08:54 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-china-pboc-akhiri-jeda-2-hari-gelontorkan-215-miliar-yuan-ke-pasar>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China kembali menyuntikkan likuiditas ke pasar keuangan melalui operasi harian pasar terbuka pada Jumat (5/6/2026), setelah menghentikan sementara injeksi dana selama dua hari berturut-turut.

Meski kembali menggelontorkan dana, People's Bank of China (PBOC) masih mencatatkan penyerapan dana bersih dari sistem perbankan sepanjang pekan ini.

Melansir Reuters berdasarkan pernyataan resmi yang dipublikasikan PBOC, bank sentral menyuntikkan dana sebesar 215 miliar yuan atau sekitar US\$ 31,74 miliar melalui instrumen reverse repurchase agreement (reverse repo) tenor tujuh hari dengan tingkat bunga 1,40%.

Sebelumnya, pada Rabu dan Kamis, PBOC tidak melakukan operasi reverse repo sama sekali. Langkah tersebut dipandang pelaku pasar sebagai upaya mendorong dana yang mengendap di sektor perbankan agar lebih banyak mengalir ke perekonomian riil.

Meski kembali melakukan injeksi pada Jumat, secara keseluruhan PBOC masih menyerap likuiditas dari pasar.

Berdasarkan perhitungan Reuters, sepanjang pekan ini bank sentral China menarik dana bersih sebesar 682,7 miliar yuan melalui operasi pasar terbuka. Jumlah tersebut menjadi penyerapan likuiditas mingguan terbesar dalam tiga bulan terakhir.

Langkah ini mengindikasikan bahwa otoritas moneter China masih berupaya menjaga keseimbangan likuiditas di tengah kondisi perbankan yang relatif longgar, sembari memastikan aliran kredit tetap mengalir ke sektor-sektor produktif.

Kebijakan tersebut juga mencerminkan pendekatan yang lebih terukur dari PBOC dalam mengelola likuiditas, yakni tidak sekadar menambah dana ke sistem keuangan, tetapi juga mengarahkan penggunaan dana agar lebih efektif mendukung aktivitas ekonomi dan pemulihan pertumbuhan di China.

Pasar kini akan mencermati langkah-langkah lanjutan PBOC, terutama di tengah tantangan ekonomi domestik, lemahnya sektor properti, serta upaya pemerintah China untuk menjaga momentum pertumbuhan pada tahun ini.

Inflasi Filipina Melandai Jadi 6,8% pada Mei 2026, Lebih Rendah dari Perkiraan

Jumat, 5 Juni 2026 08:48 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-filipina-melandai-jadi-68-pada-mei-2026-lebih-rendah-dari-perkiraan>

KONTAN.CO.ID - Laju inflasi tahunan Filipina melambat pada Mei 2026, didorong oleh perlambatan kenaikan harga pangan dan biaya transportasi.

Melansir Reuters, Badan Statistik Filipina melaporkan pada Jumat (5/6/2026), inflasi tahunan berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 6,8% pada Mei. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi April yang mencapai 7,2%.

Realisasi inflasi juga berada di bawah ekspektasi pasar. Survei Reuters sebelumnya memperkirakan inflasi Filipina akan mencapai 7,5% pada Mei.

Selain itu, angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi bank sentral Filipina yang memperkirakan inflasi Mei berada dalam kisaran 7,1% hingga 7,9%.

Perlambatan inflasi memberikan sinyal bahwa tekanan harga mulai mereda, terutama dari kelompok makanan dan transportasi yang selama ini menjadi penyumbang utama kenaikan biaya hidup di negara tersebut.

Meski demikian, secara kumulatif inflasi rata-rata sepanjang Januari hingga Mei masih mencapai 4,5%. Angka tersebut tetap berada di atas target inflasi tahunan bank sentral Filipina yang berada pada kisaran 2% hingga 4%.

Di sisi lain, inflasi inti (core inflation), yang tidak memasukkan komponen harga pangan dan energi yang berfluktuasi tinggi, justru meningkat menjadi 4,1% pada Mei dari 3,9% pada April.

Kenaikan inflasi inti menunjukkan tekanan harga di sektor-sektor lain dalam perekonomian masih relatif kuat meskipun inflasi utama mulai melambat.

Sebelumnya, Bangko Sentral ng Pilipinas menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada April sebagai upaya menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga.

Pelaku pasar kini menantikan rapat kebijakan moneter berikutnya yang akan digelar pada 18 Juni mendatang.

Keputusan bank sentral akan menjadi indikator penting mengenai langkah lanjutan otoritas moneter dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Filipina.

Yen Sentuh Level Kritis 160 per Dolar Jumat (5/6), Pasar Waspadai Intervensi Jepang

Jumat, 5 Juni 2026 08:44 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-sentuh-level-kritis-160-per-dolar-jumat-56-pasar-waspadai-intervensi-jepang>

KONTAN.CO.ID - Mata uang Jepang, yen, kembali menguji level psikologis 160 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (5/6/2026).

Pelemahan yen yang berlangsung selama tiga sesi berturut-turut memicu peringatan baru dari otoritas Jepang, sementara dolar AS menguat didukung meningkatnya permintaan aset aman akibat konflik di Timur Tengah.

Yen sempat menyentuh level 160 per dolar AS pada awal perdagangan Asia. Level tersebut secara luas dianggap pelaku pasar sebagai batas kritis yang berpotensi memicu intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menegaskan, pemerintah siap merespons setiap saat dan tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan tegas untuk menghadapi volatilitas nilai tukar yang berlebihan.

Pelemahan terbaru membuat yen berpotensi mencatat penurunan selama empat pekan berturut-turut, tren terburuk sejak Februari.

Kondisi ini juga hampir menghapus seluruh penguatan yen yang diperoleh melalui intervensi pemerintah bulan lalu yang menghabiskan dana sekitar US\$ 73 miliar.

Analisis pasar IG Tony Sycamore menilai, pertanyaan utama saat ini adalah apakah otoritas Jepang bersedia kembali melawan tekanan fundamental yang kuat, termasuk tingginya harga energi, solidnya data ekonomi AS, dan kenaikan imbal hasil obligasi AS.

Menurut Sycamore, intervensi yang dilakukan Jepang pada akhir April hanya memberikan dampak sementara.

Ia menilai, dolar AS perlu turun secara berkelanjutan di bawah level 155 yen untuk mengubah tren penguatan yang masih dominan.

Dari sisi domestik, data pemerintah menunjukkan upah riil di Jepang naik 1,9% pada April dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menjadi kenaikan bulanan keempat berturut-turut.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian utama Bank of Japan yang akan menggelar rapat kebijakan moneter pada 15-16 Juni.

Bank sentral Jepang memandang kenaikan upah dan inflasi yang berkelanjutan sebagai syarat penting untuk melanjutkan pengetatan kebijakan suku bunga.

Sejumlah sumber menyebut Bank of Japan masih berpeluang menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, kecuali jika konflik Timur Tengah meningkat tajam dan mengganggu stabilitas pasar keuangan global. Lonjakan harga energi akibat konflik tersebut juga dinilai menambah tekanan inflasi di Jepang.

Ketegangan Timur Tengah Dukong Penguatan Dolar

Di pasar global, dolar AS mendapat dukungan dari meningkatnya permintaan aset safe haven setelah upaya Presiden AS, Donald Trump, untuk menghentikan konflik di Timur Tengah menghadapi hambatan baru.

Kelompok Hezbollah yang didukung Iran menolak proposal gencatan senjata baru di Lebanon pada Kamis. Sementara itu, Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari negara tersebut.

Meningkatnya ketegangan, termasuk aksi saling serang antara Iran dan AS dalam beberapa hari terakhir, turut mendorong harga minyak Brent bertahan di atas US\$ 90 per barel dan memperkuat daya tarik dolar sebagai aset lindung nilai.

Euro tercatat berada di level US\$ 1,1612 atau naik tipis 0,02% pada perdagangan Asia. Namun mata uang tunggal Eropa tersebut masih menuju pelemahan mingguan ringan.

Poundsterling juga relatif stabil di US\$ 1,3423 dan diperkirakan mencatat penurunan mingguan tipis.

Di sisi lain, dolar Australia yang sensitif terhadap risiko turun 0,1% ke US\$ 0,7127, sedangkan dolar Selandia Baru bergerak datar di US\$ 0,5867 meskipun masih mencatat kenaikan sekitar 2% sepanjang pekan ini.

Indeks dolar AS, yang mengukur kinerja greenback terhadap sekerajang mata uang utama termasuk yen dan euro, berada di level 99,434. Indeks tersebut berada di jalur kenaikan sekitar 0,5% sepanjang pekan.

Pelaku pasar kini menantikan rilis data ketenagakerjaan non-pertanian AS (nonfarm payrolls) yang dijadwalkan terbit pada Jumat waktu setempat.

Survei Reuters memperkirakan penambahan 85.000 lapangan kerja pada Mei, lebih rendah dibandingkan kenaikan 115.000 pekerjaan pada April.

Sementara itu, tingkat pengangguran AS diproyeksikan tetap berada di level 4,3%. Data tersebut akan menjadi petunjuk penting bagi pasar dalam menilai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve pada bulan-bulan mendatang.

AS Tetapkan Tarif 10% untuk Indonesia, Peluang Bebas Tarif Produk Unggulan Muncul

Jumat, 5 Juni 2026 09:56 WIB

Reporter: Avanty Nurdiana, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/as-tetapkan-tarif-10-untuk-indonesia-peluang-bebas-tarif-produk-unggulan-muncul>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tarif perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) akhirnya ditetapkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rilis pada 5 Juni 2026 mengatakan jika ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dikenakan tarif tambahan sebesar 10% ditambah peluang pembebasan tarif untuk sejumlah produk unggulan nasional, berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Airlangga mengklaim hasil ini menunjukkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) semakin menguat. Dalam pertemuan bilateral di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, AS memberikan pengakuan positif terhadap langkah Indonesia dalam memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pencegahan kerja paksa (forced labour).

"Indonesia ditetapkan mendapatkan tarif 10% berdasarkan hasil investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS bersama lima negara lain, sedangkan 54 negara lain akan mendapatkan tarif 12,5%," kata Airlangga.

Melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Indonesia resmi masuk dalam kelompok enam negara prioritas atau Good Group bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Kelompok ini memperoleh pertimbangan khusus dalam kebijakan perdagangan AS setelah dinilai menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi praktik kerja paksa dan melarang impor produk yang terindikasi berasal dari praktik tersebut.

Keputusan tersebut diklaim sebagai buah dari berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah, termasuk penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART) serta penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang melarang impor produk hasil kerja paksa.

Tak hanya itu, USTR juga berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan Indonesia dalam kerangka investigasi Pasal 301. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi industri nasional melalui penurunan biaya ekspor dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

Airlangga menyebut, peluang pengecualian tarif tersebut merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap berbagai upaya reformasi dan penyederhanaan regulasi yang tengah dilakukan Indonesia.

"Langkah ini akan menjadi stimulus ekonomi yang besar bagi industri nasional serta memperkuat posisi komoditas unggulan Indonesia di pasar Amerika Serikat," ujar Airlangga.

Meski demikian, kedua negara juga membahas sejumlah isu yang masih memerlukan penyelesaian. Pemerintah AS mengingatkan bahwa implementasi pengecualian tarif Pasal 301 diperkirakan baru dapat dilakukan setelah 24 Juli 2026, bertepatan dengan berakhirnya penerapan tarif global sementara sebesar 10%. Penjadwalan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, AS menyoroti kebijakan perizinan impor Indonesia yang dinilai memengaruhi akses sejumlah produk pertanian Amerika, seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai. Washington berharap adanya sinkronisasi kebijakan agar tidak menghambat proses akses Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Di sisi lain, Indonesia terus memperjuangkan akses pasar yang lebih luas bagi ekspor katoda tembaga produksi PT Freeport Indonesia agar memperoleh pengecualian dari tarif Section 232 AS. Pembahasan mengenai isu ini masih berlangsung dan menjadi bagian penting dari negosiasi perdagangan kedua negara.

Airlangga menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penyelesaian hambatan perdagangan. Indonesia dan AS juga sepakat mempererat kerja sama bilateral melalui penyusunan rencana aksi bersama untuk mengatasi hambatan teknis perdagangan, mempercepat komunikasi terkait kesepakatan subsidi perikanan WTO, serta memastikan transisi kebijakan tarif berlangsung lancar dan memberikan manfaat bagi kedua negara.

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Sebesar Rp 386 Triliun Hingga Mei 2026

Jumat, 5 Juni 2026 19:12 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sudah-tarik-utang-baru-sebesar-rp-386-triliun-hingga-mei-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 386 triliun hingga Mei 2026 atau setara 46,4% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026. Realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 351 triliun pada Mei 2025.

Untuk diketahui, penarikan utang baru ini mayoritas dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mencatat, pembiayaan non utang hingga akhir Mei 2026 sebesar Rp 6,5 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan APBN mencapai Rp 379,4 triliun atau 55,1% dari pagu yang ditetapkan tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proses pembiayaan anggaran berjalan normal meskipun pasar keuangan global masih diwarnai ketidakpastian dan volatilitas.

"Pembiayaan berlangsung normal karena keseimbangan primer kita masih surplus Rp 58,6 triliun. Sampai sekarang pembiayaan anggaran mencapai Rp 379,4 triliun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, tingginya minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN) menjadi sinyal bahwa kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia masih terjaga.

Purbaya menjelaskan, meskipun pasar global sempat mengalami gejolak, kondisi pasar obligasi domestik relatif stabil. Hal tersebut tercermin dari pergerakan imbal hasil SUN tenor 10 tahun yang cenderung datar dalam beberapa bulan terakhir.

"Yang penting Anda lihat, pasar kan gonjang-ganjing, tetapi penggemar SUN kita masih cukup banyak dan tidak ada kehilangan kepercayaan kepada surat utang negara kita," katanya.

Ia mencatat, yield SUN tenor 10 tahun berdenominasi rupiah bergerak relatif stabil dari level 6,67% pada Mei menjadi sekitar 6,8% pada awal Juni 2026. Selain itu, spread obligasi pemerintah Indonesia terhadap instrumen acuan global juga tidak mengalami perubahan signifikan.

"Kalau kita lihat yield SUN 10 tahun itu dari Mei sampai Juni cenderung flat. Sekarang naik sedikit ke 6,8%, tetapi relatif stabil. Jadi stabilitas pasar obligasi kita tetap terjaga," ujarnya.

Kepercayaan investor juga tercermin dari hasil lelang surat utang pemerintah. Hingga Mei 2026, rasio penawaran masuk terhadap jumlah yang dimenangkan (bid to cover ratio) pada lelang SUN tercatat sekitar 1,8 kali, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,6 kali.

Menurut Purbaya, tingginya minat investor pada instrumen surat utang pemerintah menunjukkan keyakinan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

"Investor obligasi biasanya investor jangka panjang. Kalau mereka masih masuk dan bid to cover ratio tetap baik, artinya investor pasar modal masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia," ujarnya.

Belanja Pemerintah Melonjak 52,6%, Tembus Rp 1.059 Triliun hingga Mei 2026

Jumat, 5 Juni 2026 17:53 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pemerintah-melonjak-526-tembus-rp-1059-triliun-hingga-mei-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Belanja pemerintah pusat tembus Rp 1.059,3 triliun hingga Mei 2026, melonjak 52,6% secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi tersebut setara 33,6% dari pagu APBN tahun ini.

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7% dari pagu APBN 2025.

Dari total realisasi belanja Mei 2026 tersebut, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 517,7 triliun atau tumbuh 58,9% yoy. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp 541,6 triliun atau meningkat 47% yoy.

Secara rinci, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 155,1 triliun atau tumbuh 25,2% yoy. Kemudian, belanja barang mencapai Rp 209,3 triliun atau melonjak 114,9% yoy.

Adapun belanja modal mencapai Rp 81,6 triliun atau tumbuh 46,8% yoy, sedangkan belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 71,7 triliun atau meningkat 46,9% yoy.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan percepatan belanja tersebut sengaja dilakukan pemerintah agar dana APBN lebih cepat mengalir ke perekonomian dan memberikan dampak yang lebih merata sepanjang tahun.

"Jadi uang yang masuk ke ekonomi memang banyak dan lebih banyak dibandingkan tahun lalu, lebih cepat karena kita ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun, tidak hanya di triwulan keempat saja," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, Jumat (5/6).

Menurut Purbaya, strategi tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan belanja negara dapat dieksekusi tepat waktu dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia menyoroti tingginya pertumbuhan belanja barang dan belanja modal yang secara total mendekati Rp 300 triliun. Kedua pos tersebut dinilai memiliki efek pengganda yang besar terhadap aktivitas ekonomi.

"Ini menunjukkan strategi Bapak Presiden untuk memastikan belanja tepat waktu dan tepat sasaran serta berdampak kepada perekonomian. Anda lihat, belanja barang dan belanja modal tumbuhnya kencang dan jumlahnya cukup besar," katanya.

Purbaya juga menegaskan pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal, sekaligus memperkuat kualitas belanja negara.

"Ini strategi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk memastikan uang pemerintah, setiap rupiah yang dibelanjakan itu berdampak positif kepada perekonomian, tepat waktu, dan tepat sasaran," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui tantangan dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran tetap ada. Untuk itu, menurutnya, pemerintah terus memperkuat pengawasan agar potensi kebocoran anggaran dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Kita usahakan kebocorannya sesedikit mungkin," kata Purbaya.

Purbaya Targetkan Penerimaan Pajak Tumbuh 20,5% Sepanjang 2026

Jumat, 5 Juni 2026 17:29 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-targetkan-penerimaan-pajak-tumbuh-205-sepanjang-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang tahun 2026 mencapai 20,5% secara tahunan (year on year/yoy), seiring perbaikan kinerja perpajakan dan penguatan aktivitas ekonomi domestik.

Optimisme tersebut disampaikan setelah realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2026 tumbuh 22,1% yoy, jauh membaik dibandingkan kondisi tahun lalu ketika pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan masih mencatatkan kontraksi 11,3% yoy.

"Ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Tahun lalu full year pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, Jumat (5/6).

Purbaya menyebut target yang dipatok pemerintah berada di kisaran 20,5%.

"Mungkin nanti akan 20% atau lebih, kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Berapa Pak Bhimo? 20,5%, tapi kita coba dorong ke level yang lebih positif lagi," katanya.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Mei 2026 mencapai Rp 834,4 triliun atau 35,4% dari target APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 22,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 683,3 triliun.

Secara rinci, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 167,6 triliun atau tumbuh 23,9% yoy. Penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp 123,1 triliun atau naik 26% yoy.

Sementara itu, penerimaan PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat sebesar Rp 138,7 triliun atau tumbuh 5,2% yoy. Adapun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 315,7 triliun atau melonjak 41,3% yoy.

"Kalau di sini kelihatan naik semua, tumbuhnya cukup kencang. Jadi data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi betul-betul sedang terjadi," katanya.

Ia juga menilai implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax mulai memberikan dampak positif terhadap pengumpulan penerimaan negara. Meskipun sempat mengalami kendala pada awal tahun, sistem tersebut kini dinilai berjalan semakin baik.

"Dulu Coretax dianggap atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik. Tahun ini memang awal tahun ada gangguan sedikit, tapi rupanya secara keseluruhan masih cukup bagus," ujar Purbaya. Baca Juga: Danantara: Orang Kaya Tak Diwajibkan Beli Patriot dan Merah Putih Bond

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik Tercermin Dari Penerimaan Pajak Mei Naik 22,1% YoY

Jumat, 5 Juni 2026 17:16 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-klaim-ekonomi-membaik-tercermin-dari-penerimaan-pajak-mei-naik-221-yoy>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi kinerja penerimaan pajak hingga Mei 2026 mencapai Rp 834,4 triliun atau 35,4% dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 22,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 683,3 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kuatnya pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai cerminan daya beli domestik yang tetap solid, dan menjadi sinyal bahwa konsumsi masyarakat masih terjaga.

Dalam rinciannya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 167,6 triliun atau tumbuh 23,9% yoy. Sementara penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp 123,1 triliun atau meningkat 26% yoy.

Adapun penerimaan dari PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 mencapai Rp 138,7 triliun atau tumbuh 5,2% yoy. Sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 315,7 triliun atau melonjak 41,3% yoy.

Purbaya mengatakan, capaian tersebut menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun lalu, ketika penerimaan pajak masih mengalami kontraksi.

"Dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, full year pertumbuhan pajaknya itu negatif, sekarang positif," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, Jumat (5/6).

Menurut Purbaya, salah satu perkembangan yang paling menarik adalah lonjakan penerimaan PPh Badan yang pada Mei 2026 tumbuh 23,9% yoy. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang hanya sebesar 5,1% yoy.

Ia mengaku sempat khawatir rendahnya pertumbuhan PPh Badan pada April mencerminkan pelemahan kinerja korporasi. Namun, data Mei menunjukkan kondisi perusahaan masih cukup sehat.

"Di bulan Mei balik ke level normal, tumbuhnya 23,9%. Jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut sehingga bayarnya kecil ternyata salah. Ternyata mereka juga cukup sehat," katanya.

Selain itu, Purbaya menyoroti pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai 41,3% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April yang sebesar 40,2% yoy.

Menurutnya, kuatnya penerimaan dari pajak konsumsi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil masih berlangsung baik dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

"PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga. Itu menggambarkan kondisi ekonomi saat ini," ujarnya.

Purbaya menyebut data penerimaan pajak tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa perbaikan ekonomi yang selama ini disampaikan pemerintah benar-benar terjadi di lapangan.

Ia mengaku terus mencermati berbagai masukan terkait kondisi ekonomi masyarakat. Namun, berdasarkan data perpajakan yang dihimpun Kemenkeu, hampir seluruh komponen penerimaan menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

"Ketika ada kritik bahwa ekonomi cuma di kertas saja dan tidak di ekonomi riil masyarakat, saya tidak tutup kuping terhadap masukan itu. Saya periksa ke mana-mana, termasuk lihat data ini. Kalau di sini kelihatan naik semua, tumbuhnya cukup kencang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Purbaya juga menilai implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax mulai memberikan kontribusi positif terhadap kinerja penerimaan negara. Meski sempat menghadapi sejumlah gangguan pada awal tahun, sistem tersebut dinilai mampu mendukung perbaikan pengumpulan pajak.

"Dulu Coretax dianggap atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik. Tahun ini memang awal tahun ada gangguan sedikit, tapi rupanya secara keseluruhan masih cukup bagus," katanya.

Dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang tetap kuat hingga Mei 2026, Purbaya optimistis target penerimaan negara tahun ini dapat dicapai, seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik dan penguatan administrasi perpajakan.

"Jadi angka ini tidak bohong. Data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi betul-betul sedang terjadi," tegasnya.

Defisit APBN Naik Signifikan Per Mei 2026, Menkeu Purbaya Klaim Fiskal Aman

Jumat, 5 Juni 2026 16:49 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-apbn-naik-signifikan-per-mei-2026-menkeu-purbaya-klaim-fiskal-aman>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap aman dan terjaga, meskipun jika dibandingkan secara tahunan (year on year/yoy) defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 meningkat signifikan hingga 763,3% yoy.

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN per Mei 2026 mencapai Rp 180,4 triliun atau 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dibandingkan defisit April 2026 yang sebesar Rp 164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB.

Namun secara tahunan, defisit APBN juga melonjak dibandingkan posisi Mei 2025 yang hanya sebesar Rp 20,9 triliun atau setara dengan 0,09% terhadap PDB. Dengan demikian, rasio defisit terhadap PDB hingga Mei 2026 tumbuh sekitar 763,3% secara tahunan.

Meski demikian, Purbaya menilai kondisi tersebut masih dalam batas aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap sehat.

"Kalau dilihat dari situ, APBN kita amat. Yang jelas bisa kita kendalikan, utamanya karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, kinerja pendapatan negara menjadi faktor utama yang menopang keberlanjutan fiskal.

Hingga Mei 2026, pendapatan negara mencapai Rp 1.185 triliun atau 37,6% dari target APBN tahun ini sebesar Rp 3.153,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 19,1% secara tahunan.

Adapun penerimaan pajak tumbuh 22,1% mencapai Rp 834,4 triliun atau 35,4% dari target. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai naik 0,7% yoy mencapai Rp 123,8 triliun atau 36,8% dari target, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat 19,9% yoy mencapai Rp 226,4 triliun, atau sudah 49,3% dari target.

Purbaya menyoroti adanya perbaikan signifikan dibandingkan kondisi tahun lalu. Pada Mei 2025, penerimaan pajak masih mengalami kontraksi 11,3% secara tahunan dan PNBP tertekan 33,2%.

"Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Tahun lalu full year pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif, mungkin nanti akan 20% atau lebih, kita coba dorong ke atas terus diiringi perbaikan di perpajakan," katanya.

Di sisi lain, belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun atau 35,5% dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 34,4% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya menilai kenaikan belanja tersebut menunjukkan pemerintah berhasil mempercepat pelaksanaan program-program prioritas tanpa mengorbankan disiplin fiskal.

"Belanja negara tetap tumbuh 34,4%, bagus. Artinya sesuai dengan target. Kita selalu ingin mempercepat belanja," ujarnya.

Adapun belanja kementerian/lembaga (KL) tumbuh 58,9% secara tahunan, sementara belanja non kementerian/lembaga meningkat 47%. Adapun transfer ke daerah tercatat turun 4,9%.

Selain itu, indikator keberlanjutan fiskal juga menunjukkan perbaikan. Keseimbangan primer hingga Mei 2026 mencatat surplus Rp 58,6 triliun, meningkat dibandingkan surplus Rp 28 triliun pada April 2026.

"Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, berbagai indikator tersebut menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat sehingga tidak tepat jika pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat dikaitkan dengan pengelolaan APBN yang dianggap tidak disiplin.

"Yang dibilang ugal-ugalan atau berupaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pendapatannya naik, defisitnya tetap terjaga," tegasnya.

Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp 58,6 triliun. Sementara realisasi pembiayaan anggaran hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 379,4 triliun atau 55,1% dari target APBN tahun ini.

"Kondisi fiskal amat baik. Wamen, para dirjen, semuanya memastikan itu terjadi," pungkas Purbaya.

Kemnaker: Jumlah PHK Capai 23.470 Pekerja, Terbanyak Jawa Barat

Jumat, 5 Juni 2026 16:33 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-jumlah-phk-capai-23470-pekerja-terbanyak-jawa-barat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data baru jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari - Mei 2026.

Berdasarkan Satu Data Ketenagakerjaan, kasus PHK pada periode tersebut mencapai 23.470 pekerja.

"Pada periode Januari s.d. Mei 2026 terdapat 23.470 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan, Jum'at (5/6/2026).

Tenaga kerja yang terkena PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu mencapai 5.044 pekerja atau 21,49 persen dari total tenaga kerja terkena PHK yang dilaporkan.

Selain Jawa Barat, Provinsi Banten menempati posisi kedua mencapai 2.596 pekerja terkena PHK. Kemudian, Provinsi Jawa Timur mencapai 2.332 pekerja, Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1.841 pekerja.

Selanjutnya, DKI Jakarta 1.746 pekerja, Jawa Tengah mencapai 1.515 pekerja, Sumatera Selatan capai 920 pekerja dan Sumatera Utara capai 906 pekerja.

Secara total, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada bulan Januari mencapai 5.730 orang, kemudian naik pada Februari mencapai 7.443 orang dan turun pada bulan Maret mencapai 5.729 orang.

Selanjutnya pada April kembali turun mencapai 3.739 orang dan pada Mei mengalami penurunan drastis mencapai 829 orang.

Kemenkeu Catat Defisit APBN Rp 180,4 Triliun hingga Mei 2026, Setara 0,70% dari PDB

Jumat, 5 Juni 2026 14:45 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-catat-defisit-apbn-rp-1804-triliun-hingga-mei-2026-setara-070-dari-pdb>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 per Mei mengalami defisit sebesar Rp 180,4 triliun, atau 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi tersebut meningkat dari posisi defisit April yang sebesar Rp 164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB dibandingkan April 2026. Meskipun jika dibandingkan secara tahunan (year on year/yoy) lebih tinggi dari 0,09% terhadap PDB posisi Mei 2025.

Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang signifikan meningkat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga Mei 2026 sebesar Rp 1.185 triliun, atau setara 37,6% dari target tahun ini yang sebesar Rp 3.153,6 triliun. Realisasi pendapatan negara ini tumbuh 19,1% yoy

"Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Tahun lalu full year pertumbuhannya negatif, sekarang positif, mungkin nanti akan 20% atau lebih, kita coba dorong ke atas terus diiringi perbaikan di perpajakan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.365,4 triliun atau setara 35,5% dari target pagu APBN. Realisasi ini juga naik 34,4% yoy.

Purbaya menyebut, capaian defisit yang lebih rendah tersebut merupakan hal yang positif terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya realisasi data APBN Mei 2026 menunjukkan bahwa memang anggaran fiskal Indonesia bagus, sekaligus menepis anggapan bahwa pengelolaan fiskal ugal-ugalan memicu pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah di level kisaran Rp 18.000 per dolar AS.

"Kondisi fiskal amat baik, semua dirjen memastikan itu dengan baik," ujarnya.

Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp 58,6 triliun. Serta, di sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp 379,4 triliun atau sudah 55,1% dari target APBN 2026.

Belanja Negara Tumbuh 34% YoY, Jadi Rp1.365 Triliun

Jumat, 5 Juni 2026 16:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111031/belanja-negara-tumbuh-34-yoy-jadi-rp1-365-triliun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa Belanja negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1.365 triliun, tumbuh sebesar 34,4% secara year-on year. Belanja negara tersebut mencerminkan 35.5% terhadap total anggaran belanja pemerintah di tahun 2026 yakni sebesar Rp3.842 triliun.,

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.059 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar 52,6% secara yoy yang terdiri dari belanja kementerian lembaga (K/L) dan belanja non K/L.

"Belanja kementerian lembaga tumbuh 58,9% mencapai Rp517,7 triliun rupiah. Non-Kementerian lembaga tumbuh Rp54,6 triliun rupiah, tumbuh 47,0%," kata Purbaya dalam APBN Kita, Jumat (5/6/2026).

Keadaan ini menurut Purbaya menunjukkan bahwa uang yang masuk ke perekonomian lebih banyak dan lebih cepat apabila dibandingkan tahun lalu.

"Karena kita ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun, tidak hanya di tiruan keempat saja," kata Purbaya. Purbaya juga menyebut bahwa saat ini belanja pemerintah semakin pesat dan semakin produktif.

Secara rinci, belanja K/L didominasi oleh Belanja barang yang mencapai 209,3 triliun rupiah atau tumbuh 114,9%, sementara itu belanja pegawai tercatat naik 25,2% ke level Rp155,1 triliun.

Belanja modal tercatat naik 46,8% secara yoy ke angka Rp81,6 triliun sementara belanja bansos mencatatkan kenaikan sebesar 46,9% ke angka Rp71,7 triliun secara yoy.

“Belanja barang, belanja modal tumbuhnya kencang dan jumlahnya cukup besar, di jumlahnya itu hampir 300 triliun. Ini strategi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk memastikan uang pemerintah setiap rupiah yang dibelanjakan itu berdampak positif kepada perekonomian, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan kebocoran yang sedikit,” kata Purbaya.

Sementara itu, untuk Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp306,1 triliun yang mencerminkan 44,2% dari APBN.

“Jadi kalas kita bandingkan dengan tahun lalu, lebih tinggi dan lebih cepat. Kita juga ada pemanfaatan anggaran TKD untuk 4,3 juta ASN daerah, 42,3 juta siswa penerima BOS, 5,8 juta siswa PAUD, 992 ribu siswa program kesejahteraan dan 616 ribu guru,” kata Purbaya.

Purbaya juga memastikan bahwa hingga kini, pemerintah sama sekali tidak mengurangi dana untuk program-program transfer ke daerah tersebut.

Fiskal RI Masih Terkendali pada Kuartal II, Tapi Sejumlah Risiko Ini Perlu Diwaspadai

Jumat, 5 Juni 2026 20:39 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/fiskal-ri-masih-terkendali-pada-kuartal-ii-tapi-sejumlah-risiko-ini-perlu-diwaspadai>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi fiskal Indonesia hingga kuartal II- 2026 dinilai masih aman dan terkendali. Namun, pemerintah perlu mewaspadai sejumlah risiko yang berpotensi menggoyang kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II-2026, terutama jika penerimaan negara mulai melambat di tengah meningkatnya tekanan eksternal.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, mengatakan realisasi defisit APBN hingga Mei 2026 sebesar Rp 180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada dalam batas yang dapat dikelola.

"Kalau defisit sampai Mei 0,7% harusnya masih aman kalau tren penerimaan negara tetap tinggi," ujar Juniman kepada Kontan, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan kondisi tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan penerimaan negara selama sisa tahun ini.

Menurut Juniman, risiko utama yang perlu diwaspadai adalah pelemahan penerimaan negara akibat kombinasi tekanan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia.

Ia menjelaskan pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi dan beban impor korporasi. Jika kondisi tersebut menekan profitabilitas perusahaan, maka penerimaan pajak negara juga berpotensi melambat.

"Kalau kinerja korporasi turun, penerimaan PPN dan PPh juga akan turun. Nah itu yang menjadi problem bagi pemerintah," katanya.

Risiko tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah saat ini menerapkan strategi percepatan belanja (front loading) sejak awal tahun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hingga Mei 2026, belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 52,6% secara tahunan menjadi Rp 1.059,3 triliun. Sementara itu, defisit APBN telah mencapai Rp 180,4 triliun atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Nah sekarang pemerintah belanja cepat. Persoalannya, apakah nantinya pemerintah masih punya ruang fiskal yang cukup di semester kedua? Ini yang dipertanyakan investor, ekonom maupun lembaga rating," ujar Juniman.

Selain risiko perlambatan penerimaan negara, Juniman juga menyoroti potensi tambahan tekanan fiskal yang berkaitan dengan keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut dia, sejumlah investor dan lembaga pemeringkat masih mencermati dampak Danantara terhadap posisi fiskal pemerintah dalam jangka menengah hingga panjang.

Juniman menjelaskan, selama ini dividen badan usaha milik negara (BUMN) menjadi salah satu sumber penerimaan APBN. Namun setelah pengelolaan dividen BUMN dialihkan ke Danantara, pemerintah kehilangan sebagian sumber penerimaan yang sebelumnya masuk ke kas negara.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki ruang untuk memberikan tambahan dukungan modal kepada Danantara melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi tambahan beban fiskal apabila tidak disertai penjelasan yang memadai kepada pasar.

"Dulu dividen BUMN masuk ke APBN dan menjadi bagian dari penerimaan negara. Sekarang dividen itu masuk ke Danantara. Sementara jika ada kebutuhan penyertaan modal atau dukungan dari pemerintah, tentu itu menjadi beban APBN. Ini yang masih dipertanyakan pasar," ujarnya.

Karena itu, Juniman menilai pemerintah perlu menjelaskan secara transparan hubungan fiskal antara APBN dan Danantara, termasuk pembagian risiko apabila investasi yang dikelola lembaga tersebut menghadapi kendala di kemudian hari.

"Kalau ada risiko di Danantara, sejauh mana pemerintah akan ikut menanggung? Ini yang perlu dijelaskan. Karena investor dan lembaga rating ingin melihat dampaknya terhadap posisi fiskal negara secara keseluruhan," katanya.

Lebih lanjut, Juniman menilai kekhawatiran pasar bukan semata-mata karena besarnya defisit saat ini, melainkan karena pemerintah belum menjelaskan secara rinci proyeksi penerimaan negara hingga akhir tahun.

Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan asumsi dasar APBN secara lebih transparan, mulai dari proyeksi penerimaan pajak, harga minyak, nilai tukar rupiah, hingga perkiraan defisit pada setiap kuartal.

"Pemerintah harus menjelaskan penerimaan negara sampai akhir tahun itu dari mana sumbernya. Kalau perlu di breakdown per kuartal supaya pasar dan publik bisa melihat bahwa defisit tetap bisa dijaga," katanya.

Ia menambahkan, transparansi tersebut penting untuk meredam kekhawatiran investor dan lembaga pemeringkat internasional terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.

Apalagi, secara historis penerimaan negara pada semester II umumnya lebih rendah dibandingkan semester I. Kondisi itu berpotensi menjadi tantangan apabila tekanan eksternal masih berlanjut dan aktivitas ekonomi melambat.

Meski demikian, Juniman menilai target defisit APBN di bawah 3% PDB masih dapat dicapai selama pemerintah mampu menjaga pertumbuhan penerimaan negara.

"Kalau asumsi penerimaan negara tetap tumbuh tinggi sampai akhir tahun, secara hitungan matematika defisit masih bisa dijaga di kisaran 2% sampai 2,5% PDB," ujarnya.

Namun, tanpa kejelasan proyeksi penerimaan negara dan implikasi fiskal dari berbagai kebijakan baru, pasar akan terus mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal hingga akhir tahun.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar membantah kekhawatiran pasar, tetapi menjelaskan secara rinci bagaimana penerimaan, belanja, dan defisit akan dikelola sampai akhir tahun. Itu yang akan membuat fiskal Indonesia lebih kredibel," pungkas Juniman.

Ahmad Luthfi Antarkan Jawa Tengah Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri

Jumat, 5 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-antarkan-jawa-tengah-raih-penghargaan-pengendalian-inflasi-dari-kemendagri/>

YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah berprestasi untuk kategori Pengendalian Inflasi Terbaik, berdampingan dengan Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026, di Yogyakarta Marriott, Kamis (4/6/2026) malam.

Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, penghargaan tersebut melecut asa, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota di wilayahnya. Sebab, pemerintah provinsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan bupati/ wali kota, bahkan sampai pemerintah desa.

Pengendalian inflasi, kata dia, sangatlah penting agar kebutuhan dan daya beli masyarakat tercukupi. Baik dalam hal ketersediaan bahan pokok penting maupun keterjangkauan harga.

Karenanya, kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa, hingga perbankan perlu dilakukan, agar distribusi bahan pokok penting sampai kepada konsumen dengan baik.

“Misalnya bawang merah kita distribusikan, cabai bisa kita distribusikan, sehingga keterjangkauan ini menjadi penting, inflasi bisa kita tekan,” ungkapnya.

Prestasi yang telah dicapai saat ini, lanjut Luthfi, akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan melibatkan seluruh komponen maupun potensi masyarakat yang ada.

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beberapa pemerintah kabupaten/ kota juga mendapatkan penghargaan. Di antaranya Kota Semarang yang menjadi Terbaik III tingkat kota untuk kategori Penurunan Stunting. Selanjutnya, Kabupaten Sukoharjo Terbaik II tingkat kabupaten kategori Pengendalian Inflasi. Kemudian ada Kota Magelang yang menjadi Terbaik I, dan Kota Surakarta Terbaik II tingkat kota untuk kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menjelaskan, Apresiasi Pemerintah Daerah pada gelombang pertama ini ada empat kategori. Dari sertiap kategori penilaian yang dilakukan, dewan juri menghasilkan nilai akhir dengan selisih yang tipis.

Apresiasi Pemerintah Daerah ini memang dilakukan untuk menilai kinerja setiap pemerintah daerah, sekaligus menjadi pemicu agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai tambahan, maka diberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berprestasi.

“Masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik, dan membawa daerahnya meraih prestasi,” katanya.

Menurut Tito, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga upaya menghadirkan lebih banyak contoh kepemimpinan yang berhasil menjawab kebutuhan masyarakat.

“Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus. Ini perlu diangkat. Perlu diangkat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus,” kata Tito.

Dia menjelaskan, pemerintah sengaja menggelar apresiasi berbasis regional, agar setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk bersaing. Dengan skema tersebut, daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kecil, tetap dapat menunjukkan inovasi dan capaian terbaiknya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamar Chaniago menilai, capaian para daerah penerima penghargaan menunjukkan kemajuan yang relatif merata. Menurut dia, selisih nilai antarpemenang tidak terpaut jauh.

Djamar mengingatkan, penghargaan tersebut bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk mempertahankan dan meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih. (Humas Jateng)*ul

Pemkot perkuat program ketenagakerjaan untuk warga beroleh pekerjaan

Jumat, 5 Juni 2026 16:44 WIB

<https://jateng.antaranews.com/berita/634116/pemkot-perkuat-program-ketenagakerjaan-untuk-warga-beroleh-pekerjaan>

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang memperkuat berbagai program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk memberikan kesempatan semakin banyak warga setempat memperoleh kesempatan kerja dan berusaha.

"Kami akan terus memperkuat berbagai program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja dan berusaha," ujar Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Jumat.

Ia mengatakan hal itu terkait capaian Kota Magelang terhadap penghargaan terbaik pertama kategori penurunan tingkat pengangguran untuk tingkat kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Djamar Chaniago pada malam puncak penganugerahan di Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis (4/6) malam, yang antara lain dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi penerima penghargaan serupa.

Acara ini inisiatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk apresiasi terhadap keseriusan kepala daerah merumuskan dan menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak

langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas capaian ini pula, Kota Magelang memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar.

Damar mengatakan penghargaan ini hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Kota Magelang. Kolaborasi ini mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang Susilowati mengatakan keberhasilan Kota Magelang menekan angka pengangguran didukung berbagai program strategis, antara lain peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan, layanan antar-kerja, penguatan program penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja, program pengembangan UMKM dan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.

"Penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) ini membuktikan bahwa program pengendalian pengangguran lokal yang telah dilaksanakan Pemkot Magelang melalui Disnaker telah berhasil memberikan layanan bagi pencari kerja, serta mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang Handini Rahayu mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kota Magelang menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2023, TPT Kota Magelang tercatat 5,25 persen. Angka tersebut turun menjadi 4,40 persen pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 4,31 persen pada tahun 2025.

"Capaian ini menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang berhasil terserap ke dalam lapangan pekerjaan," katanya.

Ia berharap, tren positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta penguatan ekonomi lokal yang inklusif.

Pemerintah Kota Magelang juga mendorong semakin banyak generasi muda memiliki keterampilan, semangat berwirausaha, dan daya saing yang tinggi di pasar kerja.

Pemkab Banyumas jaga iklim investasi melalui penguatan sektor UMKM

Jumat, 5 Juni 2026 15:38 WIB

<https://jateng.antaranews.com/berita/634103/pemkab-banyumas-jaga-iklim-investasi-melalui-penguatan-sektor-umkm>

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai strategi menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi meskipun realisasi investasi hingga Mei 2026 tercatat mencapai Rp185,56 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas Roni Hidayat di Purwokerto, Banyumas, Jumat, mengatakan penguatan UMKM dilakukan untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat agar tidak terlalu terdampak gejolak ekonomi global maupun nasional.

"Pada prinsipnya, berkaitan dengan investasi di Banyumas, kami menguatkan dari sisi UMKM sehingga tidak begitu terkendala dengan adanya kondisi ekonomi global. Kami memfasilitasi kegiatan UMKM yang ada di Banyumas," katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM di berbagai wilayah, termasuk memberikan fasilitasi perizinan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing lebih baik saat dipasarkan ke luar daerah.

Ia mencontohkan sentra industri tahu yang tetap mendapat perhatian meskipun menghadapi kendala bahan baku.

"Dukungan tersebut diberikan agar usaha masyarakat tetap berjalan dan mampu menopang perekonomian daerah," katanya menjelaskan.

Terkait dengan realisasi investasi, dia mengatakan berdasarkan data DPMPTSP Banyumas hingga Mei 2026 tercatat mencapai Rp185,56 miliar yang masih didominasi sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Dalam hal ini, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran menyumbang investasi sebesar Rp68,67 miliar atau sekitar 37 persen dari total realisasi investasi.

"Posisi berikutnya ditempati sektor hotel dan restoran sebesar Rp55,09 miliar, disusul transportasi, pergudangan dan telekomunikasi Rp18,08 miliar serta jasa lainnya Rp15,07 miliar," katanya.

Menurut dia, tingginya investasi pada sektor properti dan jasa menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Banyumas yang didukung aktivitas perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.

Ia mengatakan sektor perumahan masih menjadi penyumbang utama investasi berskala besar di Banyumas. Pertumbuhan kawasan permukiman, khususnya di Purwokerto, terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat masyarakat maupun investor.

Selain properti, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang baik. Sejumlah investasi hotel baru masih terus bermunculan seiring meningkatnya penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional di Banyumas.

Sementara itu, investasi juga mengalir ke industri mineral nonlogam sebesar Rp8,68 miliar, perdagangan dan reparasi Rp6,47 miliar, industri mesin dan elektronik Rp5,35 miliar, konstruksi Rp2,87 miliar, industri kayu Rp2,61 miliar, serta industri makanan Rp1 miliar.

Roni menegaskan pemerintah daerah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pendampingan kepada investor dan pelaku UMKM.

"Kami terus mendorong kemudahan berusaha agar investasi yang masuk semakin meningkat dan mampu menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian daerah," katanya.

Mata Uang Negara Berkembang Turun Akibat Data Ketenagakerjaan AS

Sabtu, 6 Juni 2026 19:30 WIB

Kelsey Butler, Pratigya Vajpayee, dan Mpho Hlakudi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111097/mata-uang-negara-berkembang-turun-akibat-data-ketenagakerjaan-as/2>

Bloomberg, Mata uang di negara-negara berkembang merosot setelah laporan ketenagakerjaan AS yang luar biasa memberikan tanda paling jelas bahwa pasar tenaga kerja sedang keluar dari periode perekrutan yang lesu dalam waktu lama, sehingga melemahkan alasan untuk pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve.

Indeks mata uang negara berkembang MSCI turun hingga 0,6% setelah laporan tersebut, dan pada akhir hari mencatat penurunan untuk sesi keempat berturut-turut.

Jumlah tenaga kerja non-pertanian AS meningkat 172.000 bulan lalu, melampaui semua perkiraan, sementara tingkat pengangguran tetap stabil di 4,3%. Angka-angka tersebut memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga tahun ini untuk mengendalikan inflasi.

Angka-angka “luar biasa” ini telah “mengembalikan narasi keistimewaan AS,” menurut Dan Pan, ekonom Amerika di Standard Chartered Bank. “Kenaikan suku bunga AS dan penguatan dolar AS telah berdampak negatif pada kinerja pasar emerging market.”

Rupiah India mengungguli semua mata uang sejenisnya. Mata uang tersebut menguat hingga 0,9% setelah bank sentral dan pemerintah mengumumkan paket “bazooka” untuk mendukung rupiah setelah mata uang tersebut anjlok ke rekor terendah, mengaktifkan kembali strategi era “taper tantrum” tahun 2013 untuk mendorong arus masuk modal asing.

Saham-saham pasar negara berkembang juga anjlok pada hari Jumat, dengan indeks turun 2,4% dan memperpanjang tren penurunan menjadi tiga hari berturut-turut. Perusahaan teknologi AI Asia memimpin penurunan tersebut karena prospek suram Broadcom Inc. terkait penjualan chip AI pada awal pekan ini memicu kekhawatiran di kalangan investor.

“Broadcom menjadi pemicu yang mengingatkan pasar betapa tinggi ekspektasi yang telah terbentuk,” kata Charu Chanana, kepala strategi investasi di Saxo Markets. “Investor telah memperhitungkan banyak hal yang sempurna seputar AI, sehingga kekecewaan sekecil apa pun dapat menyebabkan koreksi yang cukup tajam.”

Menyusul sesi yang suram hari ini, saham dan mata uang pasar negara berkembang mencatat kerugian mingguan setelah dua pekan mengalami kenaikan.

Sementara itu, di Brasil, aset-aset menutup pekan ini dengan penurunan tajam. Mata uang berada di level terlemah dalam sekitar dua bulan, dan swap suku bunga melonjak karena kenaikan imbal hasil obligasi AS dan penguatan dolar AS mendorong investor untuk menarik diri dari salah satu perdagangan pasar emerging market paling populer tahun ini. Saham-saham juga tertekan, dengan indeks saham acuan mencatatkan rentetan kerugian mingguan terpanjang sejak setidaknya 1989.

Aset berisiko tertekan oleh kurangnya kemajuan dalam mengakhiri perang di Timur Tengah. AS dan Iran tetap berselisih mengenai kemungkinan gencatan senjata menjelang akhir pekan, dengan konflik mendekati hari ke-100 dan Teheran menyatakan bahwa mereka dan Oman memiliki kedaulatan atas Selat Hormuz.

Menyusul bentrokan semalam antara Hizbullah dan Israel di Lebanon Selatan, Iran tetap bersikeras agar gencatan senjata diberlakukan di sana sebelum mencapai kesepakatan dengan AS. Sementara itu, seorang penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei mengatakan kepada CNN bahwa "bola kini ada di tangan Trump" terkait kesepakatan tersebut, sambil menuntut agar aset senilai \$24 miliar yang dibekukan dicabut pembekuannya.

Bos Rosneft: Penutupan Selat Hormuz Untungkan Perusahaan Energi AS

Sabtu, 6 Juni 2026 17:55 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/bos-rosneft-penutupan-selat-hormuz-untungkan-perusahaan-energi-as>

KONTAN.CO.ID – ST. PETERSBURG. Kepala Eksekutif Rosneft, Igor Sechin, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat menjadi pihak yang paling diuntungkan dari penutupan Selat Hormuz.

Namun, ia memperingatkan bahwa ketegangan berkepanjangan di jalur pelayaran strategis tersebut justru dapat melemahkan permintaan minyak dunia dalam jangka panjang.

Berbicara dalam St. Petersburg International Economic Forum pada Sabtu (6/6/2026), Sechin menilai langkah yang memicu penutupan Selat Hormuz telah mengubah dinamika pasar energi global dan memberikan keuntungan kompetitif bagi produsen energi Amerika Serikat.

Penutupan Selat Hormuz terjadi setelah Iran memblokir jalur tersebut menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada Februari. Di sisi lain, Amerika Serikat juga melakukan blokir terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Menurut Sechin, yang dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di sektor energi Rusia, tindakan Washington merupakan upaya untuk membentuk ulang struktur dasar pasar energi global demi kepentingan Amerika Serikat.

AS Dinilai Mendapat Keuntungan Besar

Dalam pidatonya, Sechin mengatakan bahwa kebijakan penutupan Selat Hormuz justru membawa konsekuensi yang jauh melampaui target awalnya.

"Penutupan Selat Hormuz merupakan upaya untuk membentuk kembali aturan pasar energi global demi menguntungkan Amerika Serikat. Langkah-langkah yang diambil untuk memblokir selat tersebut ditujukan kepada Iran, tetapi justru berbalik merugikan seluruh dunia. Risiko strategisnya telah diremehkan," ujar Sechin.

Ia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika menjadi penerima manfaat utama dari kondisi tersebut.

"Pihak yang paling diuntungkan tentu saja adalah perusahaan-perusahaan Amerika, yang memperoleh keunggulan yang tidak kompetitif serta kemampuan untuk mengamankan pasokan berbiaya tinggi," kata Sechin.

"Ketegangan yang terus berlangsung di Selat Hormuz dalam waktu lama akan melemahkan permintaan minyak dalam jangka panjang. Kondisi ini juga dapat memicu kembali lonjakan minat terhadap energi alternatif."

Saat ini, Amerika Serikat merupakan produsen minyak terbesar di dunia, disusul oleh Arab Saudi dan Rusia.

Di tengah lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah, pendapatan pajak minyak dan gas Rusia yang menyumbang sekitar seperlima penerimaan anggaran negara melonjak 32,4% secara tahunan pada Mei menjadi 678,9 miliar rubel atau sekitar US\$ 9,3 miliar.

Amerika Serikat juga memperpanjang pengecualian sanksi yang memungkinkan pembelian minyak Rusia yang diangkut melalui laut untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap krisis energi akibat perang Iran.

China Dinilai Paling Siap Hadapi Krisis

Sechin menilai China merupakan negara yang paling siap menghadapi krisis tersebut berkat kebijakan pemerintah yang telah dirancang secara matang. Namun, ia mengingatkan bahwa jalur pelayaran strategis lain seperti Selat Malaka, Bab El Mandeb, dan Gibraltar juga berpotensi menghadapi gangguan serupa.

Menurut proyeksinya, apabila Selat Hormuz kembali dibuka dalam waktu dekat, harga minyak diperkirakan berada di kisaran US\$ 95 hingga US\$ 96 per barel pada akhir tahun ini.

Selanjutnya, harga minyak diperkirakan turun ke kisaran US\$ 80 hingga US\$ 85 per barel dalam waktu satu tahun, sebelum kembali bergerak sesuai fundamental pasar pada paruh kedua 2027.

Peringatan Krisis Global yang Semakin Kompleks

Dalam pidato berjudul "Awal dari Akhir atau Akhir dari Awal: Apa yang Tersisa di Dasar Kotak Pandora?", Sechin juga memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi akumulasi berbagai persoalan besar, mulai dari militerisasi negara-negara besar, gelembung pasar keuangan terbesar sejak abad ke-19, hingga ancaman kekurangan listrik, pangan, dan air.

"Di dasar kotak itu, kita pada akhirnya akan menemukan kekurangan listrik secara global, kelangkaan pangan, kekurangan tembaga dan logam lainnya, serta krisis air," ujar Sechin.

Ia juga mengkritik perkembangan aliansi OPEC+, yang menurutnya telah kehilangan sebagian potensinya setelah Uni Emirat Arab keluar dari kelompok tersebut, menyusul langkah serupa yang sebelumnya diambil Qatar dan beberapa negara lain.

"Akibatnya, produksi aliansi tersebut telah turun dari 58 juta barel per hari menjadi 37 juta barel per hari selama 10 tahun terakhir," katanya.

Sechin menambahkan bahwa sebagian besar anggota utama OPEC+ justru meningkatkan produksi sejak kesepakatan aliansi dibentuk pada 2016. Sementara itu, produksi minyak Rusia turun sekitar 1,5 juta barel per hari.

"Ini merupakan penurunan sebesar 15% yang harus diimbangi melalui investasi yang diperlukan dengan nilai sedikitnya 10 triliun rubel. Kami berharap kerja sama investasi antara negara-negara anggota aliansi dan negara kami juga akan semakin berkembang," tutup Sechin.

Bos BI Tegaskan Fiskal & Moneter Kompak Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 6 Juni 2026 10:20 WIB

Azura Yumna Ramadani Purnama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111081/bos-bi-tegaskan-fiskal-moneter-kompak-jaga-stabilitas-ekonomi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus kompak untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

"Kami tegaskan koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat bagaimana menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Perry dalam konferensi pers di Gedung DPR, Sabtu (6/6/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa penguatan koordinasi fiskal dan moneter terus dilakukan dan saat ini memang difokuskan agar fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangannya masing-masing guna memperkuat upaya-upaya stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kami sepakat ini akan terus kami lakukan koordinasi yang sudah kuat dan diperkuat dan akan terus diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang ada.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumpulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada hari ini, Sabtu (6/6/2026). Pertemuan mereka diadakan guna membahas evaluasi perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan tersebut diadakan sekaligus sebagai bentuk koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter bisa saling mendukung.

"Pagi hari ini kami DPR sengaja berkumpul dengan teman-teman otoritas moneter maupun fiskal dan pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Sabtu (6/6/2026).

Belakangan, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali melorot ke zona merah. Indeks komposit melemah 1,7% ke level 5.839 pada perdagangan kemarin.

Sementara itu, depresiasi rupiah yang berlanjut ke level Rp18.020 per dolar AS turut menambah tekanan pada IHSG sampai perdagangan hari ini. Rupiah belum mampu keluar dari zona Rp18.000/US\$ menandakan adanya tekanan kuat yang masih membebani pergerakannya.

Purbaya Pastikan Koordinasi Kuat dengan BI demi Stabilitas Rupiah

Sabtu, 6 Juni 2026 10:40 WIB

Azura Yumna Ramadani Purnama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111082/purbaya-pastikan-koordinasi-kuat-dengan-bi-demi-stabilitas-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya berkoordinasi kuat dengan Bank Indonesia demi stabilisasi nilai tukar rupiah.

Purbaya mengungkapkan bahwa sejak APBN Kita lalu, fundamental ekonomi Indonesia sudah terlihat baik, bahkan fiskal dalam kondisi amat baik. Kemenkeu, lanjutnya, ke depan akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin cepat.

"Dalam perjalanannya kita akan meningkatkan koordinasi dengan bank sentral [Bank Indonesia] agar kebijakan sinkron, agar kebijakan moneter fiskal lebih signifikan [berpengaruh] ke ekonomi," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Sabtu (6/6/2026).

Pasalnya, Purbaya bilang ketika kebijakan fiskal dan moneter telah menyatu seperti sinergi penuh tentunya akan memberikan kepercayaan kepada pasar, sehingga rupiah akan menguat signifikan.

"Yang penting kita ingin melihat dampaknya ke masyarakat positif dari rupiah [...] Dengan kebijakan yang lebih bagus, kita akan lihat rupiah lebih stabil, sehingga pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga harganya [bahan pokok] lebih baik dan tidak [mengalami] kenaikan beban hidup yang signifikan," tukasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumpulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada hari ini, Sabtu (6/6/2026). Pertemuan mereka diadakan guna membahas evaluasi perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan tersebut diadakan sekaligus sebagai bentuk koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter bisa saling mendukung.

"Pagi hari ini kami DPR sengaja berkumpul dengan teman-teman otoritas moneter maupun fiskal dan pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," kata Dasco kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Belakangan, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali melorot ke zona merah. Indeks komposit melemah 1,7% ke level 5.839 pada perdagangan kemarin.

Sementara itu, depresiasi rupiah yang berlanjut ke level Rp18.020 per dolar AS turut menambah tekanan pada IHSG sampai perdagangan hari ini. Rupiah belum mampu keluar dari zona Rp18.000/US\$ menandakan adanya tekanan kuat yang masih membebani pergerakannya.

Bos BI & Menkeu Sepakati 2 Jurus Kuatkan Rupiah

Sabtu, 6 Juni 2026 10:51 WIB

Azura Yumna Ramadani Purnama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111083/bos-bi-menkeu-sepakati-2-jurus-kuatkan-rupiah>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan dua strategi penguatan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal saat ini demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Strategi pertama, otoritas fiskal dan moneter bersama-sama akan meningkatkan daya tarik imbal hasil pada instrumen investasi agar aliran dana asing masuk ke pasar keuangan nasional.

"Dengan kenaikan bunga luar negeri, ada terjadi outflow di saham, SBN (Surat Berharga Negara), dan kecil di SRBI (Sekuritas Rupiah BI). Maka itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan imbal hasil untuk inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," papar Perry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Strategi kedua, otoritas fiskal dan moneter berupaya bersama untuk menjaga kecukupan likuiditas, baik di pasar uang maupun industri perbankan. Hal ini dilakukan dengan strategi pengelolaan kas negara tetap berada di bank sentral, dengan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Dengan demikian, operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal juga mendukung. Dua hal itu kami lakukan," kata Perry.

Dalam kesempatan tersebut, Perry menegaskan dirinya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat akan memperkuat koordinasi antara moneter dan fiskal, dengan cara saling mendukung kebijakan masing-masing sesuai dengan dinamika yang ada, demi menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Penguatan terus kita lakukan, saat ini difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung dan memperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah," tuturnya.

BI Pastikan Kerek Remunerasi Simpanan Dana Pemerintah

Sabtu, 6 Juni 2026 11:30 WIB

Azura Yumna Ramadani Purnama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111086/bi-pastikan-kerek-remunerasi-simpanan-dana-pemerintah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan bakal menaikkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Sentral atas penempatan dana pemerintah di BI.

Perry menjelaskan rekening pemerintah yang ditempatkan di Bank Sentral diberikan remunerasi, saat ini otoritas moneter sedang menghitung besaran remunerasi yang bakal diberikan.

Perry menyatakan kenaikan remunerasi diharapkan dapat menurunkan beban bunga pemerintah.

"Pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," kata Perry dalam konferensi pers di Gedung DPR, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Perry, langkah tersebut juga menjadi salah satu jurus untuk menjawab sorotan yang diberikan lembaga pemeringkat ihwal beban bunga yang harus dibayarkan atas utang, dia memastikan interest spending tersebut dalam kondisi terkendali.

"Kalau remunerasi BI kita taikkan secara neto kan tetap terkendali sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating interest spending-nya terkendali," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, Perry mengungkapkan strategi penguatan nilai tukar rupiah lainnya. Yakni, otoritas fiskal dan moneter bersama-sama akan meningkatkan daya tarik imbal hasil pada instrumen investasi agar aliran dana asing masuk ke pasar keuangan nasional.

"Dengan kenaikan bunga luar negeri, ada terjadi outflow di saham, SBN [Surat Berharga Negara], dan kecil di SRBI [Sekuritas Rupiah BI]. Maka itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama

meningkatkan imbal hasil untuk inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," papar Perry.

Perry menegaskan dirinya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat akan memperkuat koordinasi antara moneter dan fiskal, dengan cara saling mendukung kebijakan masing-masing sesuai dengan dinamika yang ada, demi menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Penguatan terus kita lakukan, saat ini difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung dan memperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah," tuturnya.

Realisasi Belanja Anggaran MBG Capai Rp 88,15 Triliun hingga Mei 2026

Sabtu, 6 Juni 2026 20:08 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-belanja-anggaran-mbg-capai-rp-8815-triliun-hingga-mei-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 88,15 triliun hingga akhir Mei 2026.

Penyerapan anggaran tersebut sejalan dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.

Kementerian Keuangan juga mencatat program MBG telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,9 juta penerima merupakan siswa sekolah. Sementara sisanya, sebanyak 14,3 juta penerima manfaat, berasal dari kelompok non-siswa yang menjadi sasaran program.

Pemerintah juga terus memperluas infrastruktur pendukung pelaksanaan program. Hingga akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

Setiap SPPG melayani sekitar 500 hingga 3.000 penerima manfaat, tergantung pada kapasitas dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Konflik Timteng, Ekspor Aluminium RI ke AS Berpeluang Melonjak

Sabtu, 6 Juni 2026 07:05 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111072/konflik-timteng-ekspor-aluminium-ri-ke-as-berpeluang-melonjak/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) Winston K. K. Ng mengungkap pasar ekspor aluminium Indonesia justru memiliki peluang melebarkan sayap ke pasar Amerika Serikat (AS) di tengah konflik global yang terjadi di Timur Tengah (Timteng).

“Satu-satunya hal yang dapat saya lihat adalah jika kebijakan di AS, ini memperbesar [potensi] aluminium dapat dikirim ke sana,” ungkapnya dalam agenda Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Winston menambahkan bahwa kelebihan lain mengirim aluminium ke AS adalah besarnya premi yang tidak ditanggung oleh eksportir.

"Saat ini, premi [biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli] untuk AS sangat tinggi. Jadi pada dasarnya ada potensi bagi pemain Indonesia untuk memasuki pasar AS, terutama karena AS adalah importir bersih aluminium. Sementara itu, persaingan di Asia sendiri sudah cukup ketat," tambahnya.

Terkait peta ekspor, Winston melihat adanya tantangan harga di kawasan regional, terutama karena banyaknya pelaku industri di Indonesia yang memiliki afiliasi atau berbasis di China.

Namun, perbedaan regulasi harga di dalam dan luar China dinilai akan sedikit menekan margin ekspor dari Indonesia. Sebaliknya, jika Indonesia mampu menembus negara-negara yang tidak terbebani oleh masalah pasokan energi, nilai jual aluminium lokal berpeluang terkerek naik.

Sementara itu, pasar Jepang atau Eropa dinilai cenderung sulit ditembus karena mereka membutuhkan pasokan aluminium dengan spesifikasi sumber energi rendah (low-carbon/green energy).

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya kesiapan industri seiring dengan berkembangnya industri manufaktur global, seperti sektor otomotif, khususnya penggunaan aluminium dalam electric vehicle (EV).

"Seperti yang kita pahami, ketika sebuah mobil sedang dibangun, akan selalu ada kandungan aluminium di dalam mobil tersebut," pungkasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepanjang tahun 2025, aluminium menjadi salah satu komoditas nonmigas dengan pertumbuhan ekspor paling signifikan di Indonesia.

Pada periode Januari–Oktober 2025, ekspor komoditas aluminium dan barang daripadanya (HS 76) mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 68,45% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Lima besar negara importir aluminium dari Indonesia sepanjang 2025 adalah China, India, Amerika Serikat, dan negara ASEAN, di antaranya Malaysia dan Vietnam.

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 123,8 Triliun hingga Mei 2026

Sabtu, 6 Juni 2026 18:36 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-bea-cukai-capai-rp-1238-triliun-hingga-mei-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 123,8 triliun hingga Mei 2026, tumbuh 0,7% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Rp 122,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif setelah beberapa bulan sebelumnya penerimaan kepabeanan dan cukai masih mengalami kontraksi.

"Bea cukai naik 0,7%, sudah positif dua bulan berturut-turut. Nanti akan naik lagi lebih bagus," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Dari total penerimaan tersebut, cukai menyumbang Rp 90,4 triliun atau tumbuh 0,2% yoy. Sementara penerimaan bea masuk mencapai Rp 21,5 triliun atau naik 9,7% yoy. Adapun penerimaan bea keluar tercatat Rp 11,9 triliun, masih berkontraksi 8,9% yoy.

Menurut Purbaya, pertumbuhan penerimaan cukai didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau pada kuartal I-2026. Ia menepis anggapan bahwa produksi rokok mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah.

"Produksi tembakau naik. Ada yang bilang sama saya turun, salah. Kebijakan kita kan tidak menaikkan cukai, harusnya naik," katanya.

Sementara itu, pertumbuhan bea masuk yang tetap kuat ditopang oleh meningkatnya impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh 10,67% secara tahunan. Purbaya menilai data tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas manufaktur nasional sedang mengalami peningkatan.

"Impor bahan baku dan bahan penolong tumbuh 10,67%. Artinya aktivitas manufacturing sedang meningkat. Kalau tidak, angka ini tidak akan tumbuh," ujarnya.

Menurutnya, data impor bahan baku tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terjaga. Karena itu, penerimaan kepabeanan dan cukai dapat menjadi salah satu indikator pendukung untuk memverifikasi kondisi riil aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar memang masih mencatatkan kontraksi. Namun demikian, Purbaya menyebut kinerjanya mulai membaik seiring kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang Maret hingga Mei 2026.

Tak hanya mengandalkan pemulihan ekonomi, pemerintah juga memperkuat pengawasan di sektor cukai.

Ke depan, pemerintah optimistis tren penerimaan kepabeanan dan cukai akan terus membaik seiring peningkatan aktivitas industri, membaiknya harga komoditas ekspor, serta penguatan pengawasan di sektor cukai.

Purbaya: Realisasi Restitusi Pajak Capai Rp 170 Triliun hingga Mei 2026

Sabtu, 6 Juni 2026 17:50 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-realisisasi-restitusi-pajak-capai-rp-170-triliun-hingga-mei-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap mencairkan restitusi kepada wajib pajak yang berhak. Tercatat, realisasi restitusi pajak sepanjang Januari–Mei 2026 mencapai Rp 170 triliun.

Angka tersebut turun 15,4% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 200 triliun.

Purbaya menegaskan restitusi tetap dibayarkan. Namun, terhadap klaim yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

"Restitusi tetap dikeluarkan, cuma kita lihat yang mesti diperiksa ya kita periksa lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Juni, Jumat (5/6). Pernyataan tersebut disampaikan di tengah

proses audit yang tengah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pembayaran restitusi pajak. Audit tersebut menjadi sorotan setelah realisasi restitusi pajak sepanjang 2025 melonjak hingga mencapai Rp 361 triliun.

Purbaya mengungkapkan hingga saat ini audit yang dilakukan BPKP masih berlangsung dan pemerintah belum menerima hasil investigasi tersebut.

"Masih belum dapat hasil investigasinya. Saya akan ke BPKP lagi. Kan 10 tahun itu," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan meminta BPKP melakukan audit atas pembayaran restitusi pajak yang melonjak tinggi pada 2025, yakni mencapai Rp 361 triliun. Audit dilakukan untuk memastikan apakah data dan proses telah sesuai dengan ketentuan.

Purbaya sebelumnya menyampaikan hasil audit BPKP ditargetkan dapat diterima pemerintah pada kuartal II 2026. Namun, hingga awal Juni, hasil pemeriksaan tersebut masih belum rampung.

Purbaya Ungkap Kas Pemerintah Capai Rp 513 Triliun, Tegaskan Fiskal RI Masih Kuat

Sabtu, 6 Juni 2026 17:12 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-ungkap-kas-pemerintah-capai-rp-513-triliun-tegaskan-fiskal-ri-masih-kuat>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal masih cukup kuat dan jauh dari kondisi pengetatan, dengan kas pemerintah saat ini mencapai Rp 513 triliun.

Posisi kas yang tersedia tersebut, menurutnya, merupakan ruang yang memadai untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung perekonomian.

"Ada pos lain yang bisa kita potong kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Pak Prima (Dirjen Perbendaharaan) masih punya uang Rp 513 triliun sekarang," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Juni, Jumat (5/6/2026).

Menurut Purbaya, besarnya kas pemerintah tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga. Berbagai kekhawatiran yang menyebut pengelolaan fiskal berjalan tidak hati-hati, menurutnya, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Ia menegaskan Presiden berkomitmen menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga terus memastikan setiap kebijakan belanja dilakukan secara terukur dan memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Komitmen Pak Presiden untuk menjaga fiskal di bawah 3% amat kuat sekali. Jadi kita tidak menjalankan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Kami tahu apa yang kami kerjakan," katanya.

Purbaya mengakui masih terdapat sentimen negatif di pasar yang memengaruhi persepsi terhadap kondisi fiskal Indonesia. Namun, menurutnya, fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang baik.

Ia menilai pemerintah memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Selain mengelola belanja negara,

pemerintah juga masih memiliki ruang untuk memberikan stimulus apabila kondisi ekonomi membutuhkan dukungan tambahan.

"Kalau ada apa-apa kita bisa perbaiki. Kita betul-betul fleksibel untuk memastikan defisit di bawah 3% tanpa mengganggu ekonomi secara berlebihan," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pemerintah akan terus berupaya memperbaiki komunikasi kepada masyarakat dan investor terkait kondisi fiskal nasional. Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa kondisi APBN tetap terjaga meskipun sempat muncul kekhawatiran di pasar pada awal tahun.

Ia menambahkan pemerintah juga akan memperkuat dialog dengan kalangan industri guna mengidentifikasi berbagai dukungan yang dapat diberikan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Nanti saya akan ketemu industri untuk melihat ada nggak yang bisa kita bantu di industri Indonesia," kata Purbaya.

Purbaya: Sinergi Pemerintah dan BI Diperkuat demi Jaga Stabilitas Rupiah dan Ekonomi

Sabtu, 6 Juni 2026 16:38 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-sinergi-pemerintah-dan-bi-diperkuat-demi-jaga-stabilitas-rupiah-dan-ekonomi>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi tekanan biaya yang ditanggung masyarakat maupun pelaku usaha.

Menurut Purbaya, sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar dampak kebijakan ekonomi semakin terasa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Sabtu (6/6/2026).

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik guna mendorong aliran modal masuk serta menjaga likuiditas di pasar keuangan.

Purbaya menilai stabilitas rupiah akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebab, nilai tukar yang lebih terjaga dapat membantu menekan biaya produksi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Jika biaya produksi dapat ditekan, kenaikan harga barang juga dapat lebih terkendali sehingga beban masyarakat ikut berkurang.

"Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara pemerintah dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.

Menurut Purbaya, penguatan sinergi fiskal dan moneter tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar, tetapi juga untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh pelaku usaha dan rumah tangga melalui harga yang lebih terkendali dan aktivitas ekonomi yang lebih kuat.

Gubernur BI Isyaratkan Kenaikan BI Rate Juni demi Tarik Capital Inflow

Sabtu, 6 Juni 2026 12:47 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/gubernur-bi-isyaratkan-kenaikan-bi-rate-juni-demi-tarik-capital-inflow>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberi sinyal adanya ruang untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada bulan Juni. Hal ini dilakukan untuk menarik kembali arus modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan domestik serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sebelumnya BI Rate sudah naik 50 bps ke level 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Mei 2026 lalu untuk merespon pelemahan rupiah. Hanya saja, mata uang Garuda terus melemah hingga saat ini sudah di level Rp 18.000 per dollar AS.

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup Rp 18.036 per dollar AS pada Jumat (5/6/2026), dan telah melemah 0,86% dalam sepekan dari posisinya Rp 17.881 per dollar AS pada Jumat (29/5/2026).

Perry mengatakan, saat ini pemerintah dan BI semakin memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik, baik di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) maupun Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham, sehingga kembali menarik minat investor asing.

"Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk," ujar Perry dalam konferensi pers di Gedung Parlemen DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan domestik, terutama dari pasar saham dan SBN. Meski demikian, aliran dana keluar dari instrumen SRBI relatif lebih kecil.

"Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," katanya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa BI masih membuka ruang untuk memperketat kebijakan moneter melalui kenaikan BI Rate apabila diperlukan.

Kenaikan suku bunga acuan umumnya akan mendorong kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik sehingga meningkatkan daya tarik aset berdenominasi rupiah di mata investor global.

Selain melalui BI Rate, peningkatan daya tarik imbal hasil juga dapat dilakukan melalui pengelolaan instrumen moneter seperti SRBI serta koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga daya saing imbal hasil SBN.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat stabilitas nilai tukar rupiah saat ini masih menghadapi tekanan dari tingginya suku bunga global dan pergeseran aliran modal ke aset-aset yang dianggap lebih aman.

Dengan masuknya kembali dana asing ke pasar SRBI dan SBN, BI berharap stabilitas pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah dapat tetap terjaga.

Bea Cukai Tetap Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Pengawasan Ekspor Meski Ada DSI

Sabtu, 6 Juni 2026 15:39 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-tetap-jadi-garda-terdepan-pelayanan-dan-pengawasan-ekspor-meski-ada-dsi>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memastikan tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan pengawasan ekspor meskipun pemerintah membentuk PT Danatara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan satu pintu ekspor komoditas tertentu.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama mengatakan, hingga akhir Desember 2026 proses pelayanan ekspor masih berjalan seperti biasa dan tetap ditangani oleh Bea Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terkait dengan PT Danatara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang merupakan badan satu pintu ekspor, tentunya dengan peraturan yang baru, bahwa ekspor itu sampai dengan bulan Desember, mungkin dari Bea Cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa," ujar Djaka dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menurut Djaka, pada tahap awal DSI akan berperan sebagai pihak yang difasilitasi dalam proses ekspor dan dapat berdampingan dengan Bea Cukai dalam pencatatan maupun administrasi kegiatan ekspor.

"Mungkin yang nanti akan difasilitasi adalah dari DSI-nya sendiri, nanti mungkin bisa mencatatkan ataupun berdampingan dengan Bea Cukai," katanya.

Djaka menegaskan, seluruh proses kepabeanan tetap berada dalam pengawasan dan pelayanan DJBC. Namun, ke depan DSI berpotensi menjalankan kegiatan ekspor secara mandiri seiring dengan penguatan kelembagaan dan kesiapan operasional perusahaan tersebut.

"Kedepannya mungkin nanti akan mandiri, yaitu DSI secara mandiri melakukan ekspor. Tetapi tetap Bea Cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya," ujarnya.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pembentukan DSI sebagai badan satu pintu ekspor tidak akan mengurangi peran Bea Cukai dalam pelayanan maupun pengawasan ekspor. DJBC tetap menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen kepabeanan serta memastikan seluruh kegiatan ekspor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah sebelumnya membentuk DSI untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis dan meningkatkan efisiensi pengelolaan ekspor nasional melalui mekanisme yang lebih terintegrasi.

Harga Cabai Jadi Salah Satu Pemicu Inflasi di Jateng

Sabtu, 6 Juni 2026 08:29 WIB

Anggraini S

<https://www.rmoljawatengah.id/harga-cabai-jadi-salah-satu-pemicu-inflasi-di-jateng>

Harga cabai menjadi salah satu pemicu inflasi di Jawa Tengah pada Mei 2026. Kenaikan harga komoditas hortikultura, terutama cabai merah dan cabai rawit, mendorong laju inflasi meski secara umum masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan rilis Bank Indonesia, Jawa Tengah pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,23 persen secara bulanan (month to month/mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatat deflasi 0,03 persen. Angka tersebut juga masih lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 0,28 persen.

"Secara bulanan, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya deflasi sebesar 0,03% (mtm). Inflasi Jawa Tengah pada Mei 2026 lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,28% (mtm)," kata Plh Kepala Perwakilan BI Jateng, Anggis Rakhmi dalam keterangannya.

Kenaikan harga bahan pangan menjadi penyumbang utama inflasi, khususnya dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,07 persen. Selain cabai merah dan cabai rawit, komoditas bawang merah juga ikut mendorong kenaikan harga.

Untuk diketahui, hingga memasuki bulan Juni 2026 pun harga cabai belum turun di kota Semarang. Contohnya di Pasar Peterongan, cabai merah rawit yang tadinya Rp 60 ribu kini masih Rp 80 ribu per kilogram. Kemudian cabai merah besar Rp 15 ribu, sedangkan sebelumnya Rp 10 ribu. Demografi

Kondisi itu dipicu menurunnya produktivitas di sejumlah sentra pertanian akibat cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tanaman, hingga kekeringan. Untuk cabai, gangguan produksi terjadi di wilayah Temanggung, sedangkan bawang merah terdampak di wilayah Pati dan Demak.

Selain faktor produksi, meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha serta musim hajatan turut memengaruhi kenaikan harga di pasaran.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak goreng juga ikut menyumbang inflasi. Hal itu dipengaruhi keterbatasan pasokan serta naiknya biaya produksi akibat harga bahan pendukung seperti plastik kemasan.

Meski demikian, laju inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh turunnya harga sejumlah komoditas lain seperti telur ayam ras dan daging ayam ras yang pasokannya melimpah di tingkat peternak.

Secara wilayah, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Tengah mengalami inflasi pada Mei 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Surakarta, Kudus, dan Cilacap yang masing-masing mencapai 0,31 persen. Sementara Kota Semarang mencatat inflasi sebesar 0,16 persen. Layanan Berita Lokal

Berikut daftar daerah dengan inflasi mulai dari yang tertinggi:

- Kota Surakarta, Kudus, dan Cilacap yang pada periode laporan mencatatkan inflasi sebesar 0,31% (mtm)
- Kabupaten Wonogiri (0,30%; mtm)
- Kabupaten Purwokerto (0,28%; mtm)
- Kabupaten Rembang (0,24%; mtm)
- Kota Semarang (0,16%; mtm)
- Kota Tegal (0,14%; mtm)

- Kabupaten Wonosobo (0,12%; mtm).

Secara tahunan, seluruh kota IHK di Jawa Tengah mengalami inflasi, yaitu:

- Cilacap (3,22%; yoy)
- Kabupaten Wonogiri (3,02%; yoy)
- Kota Tegal (2,90%; yoy)
- Kabupaten Purwokerto (2,88%; yoy)
- Kota Surakarta (2,85%; yoy)
- Kota Semarang (2,79%; yoy)
- Kabupaten Wonosobo (2,73%; yoy)
- Kabupaten Kudus (2,67%; yoy)
- Kabupaten Rembang (2,59%; yoy)

Bank Indonesia menyebut ke depan pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jawa Tengah. Fokusnya menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang agar inflasi tetap berada dalam target $2,5\pm 1$ persen.

Inflasi Jawa Tengah Mei 2026 Terkendali, Kenaikan Harga Cabai dan Bawang Jadi Pemicu Utama

Minggu, 6 Juni 2026

Alif Nazala Rizqi

<https://www.jatengnews.id/2026/06/06/inflasi-jawa-tengah-mei-2026-terkendali-kenaikan-harga-cabai-dan-bawang-jadi-pemicu-utama/>

SEMARANG, Jatengnews.id – Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi sebesar 0,23 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Mei 2026, setelah pada April mengalami deflasi 0,03 persen.

Meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran $2,5\pm 1$ persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,28 persen (mtm).

Pelaksana Harian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Anggis Rakhmi, mengatakan tekanan inflasi pada Mei terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

“Inflasi pada periode laporan dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit yang mengalami gangguan produksi akibat cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tumbuhan, serta kekeringan di sejumlah sentra produksi,” ujarnya Sabtu (06/06/2026).

Sentra produksi cabai di Temanggung serta bawang merah di Pati dan Demak mengalami penurunan produktivitas sehingga mendorong kenaikan harga di pasaran. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan musim hajatan.

Selain komoditas hortikultura, harga minyak goreng turut mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan dan meningkatnya biaya produksi, terutama karena naiknya harga bahan pendukung berupa plastik kemasan.

Meski demikian, tekanan inflasi pangan berhasil tertahan oleh penurunan harga telur ayam ras dan daging ayam ras yang didukung pasokan melimpah di tingkat peternak.

Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi juga disumbang oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil 0,06 persen (mtm). Kenaikan harga telepon seluler dipicu meningkatnya biaya komponen elektronik seperti chipset dan memori akibat tingginya permintaan industri kecerdasan buatan (AI).

Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut memberikan tekanan inflasi seiring berlanjutnya dampak penyesuaian harga LPG non-subsidi yang dilakukan pada April 2026 mengikuti perkembangan harga energi di pasar internasional.

Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat deflasi dengan andil minus 0,05 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga emas perhiasan sejalan dengan koreksi harga emas global. Kondisi tersebut terjadi akibat kebijakan bank sentral dunia, termasuk The Fed, yang masih mempertahankan suku bunga tinggi sehingga investor beralih ke instrumen berbasis bunga dan melakukan aksi ambil untung.

Secara spasial, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Tengah mengalami inflasi pada Mei 2026. Inflasi tertinggi tercatat di Surakarta, Kudus, dan Cilacap yang masing-masing mencapai 0,31 persen (mtm), disusul Kabupaten Wonogiri sebesar 0,30 persen dan Purwokerto sebesar 0,28 persen.

Adapun Kota Semarang mencatat inflasi sebesar 0,16 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lainnya di Jawa Tengah.

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi tertinggi terjadi di Cilacap sebesar 3,22 persen, diikuti Kabupaten Wonogiri 3,02 persen, Kota Tegal 2,90 persen, Purwokerto 2,88 persen, dan Surakarta 2,85 persen. Sementara inflasi tahunan Kota Semarang tercatat sebesar 2,79 persen.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah dan TPID kabupaten/kota se-Jawa Tengah akan terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas harga.

“Berbagai program pengendalian inflasi akan difokuskan pada upaya menjaga kecukupan pasokan serta kelancaran distribusi barang dan komoditas strategis agar inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan, yakni $2,5 \pm 1$ persen,” imbuhnya.

Video: Jateng Bangun Ekonomi Pantura, Penguatan Logistik Jadi Kunci

Sabtu, 6 Juni 2026 18:00 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20260529132035-8-738760/video-jateng-bangun-ekonomi-pantura-penguatan-logistik-jadi-kunci?>

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan dukungannya terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8% di Tahun 2029.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan bahwa salah satu kunci pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kolaborasi Pemprov Jateng dengan 35 kabupaten/kota yang terintegrasi dengan pemerintah.

Hal ini dilaksanakan dengan memetakan produk unggulan daerah, meningkatkan investasi di tengah keterbatasan fiskal dan gejolak geopolitik global. Pemprov Jateng menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor seperti jaminan keamanan dan hukum, kemudahan izin, mempersiapkan kemampuan SDM lewat pendidikan vokasi serta daya saing tenaga kerja lokal.

Jateng juga terus mengembangkan koridor ekonomi dan manufaktur wilayah pesisir utara (Pantura) lewat proyek kawasan industri terpadu Batang, KEK Kendal, Kawasan Industri Wijayakusuma & Terboyo. Langkah ini didukung dengan penguatan infrastruktur pendukung hingga proyek Giant Sea Wall.

Jateng juga menargetkan pengembangan 12 kawasan Industri Baru di Cilacap, Demak hingga Sragen sebagai sumber ekonomi baru dan langkah pemerataan ekonomi daerah.

PBOC Lanjutkan Tren Borong Emas 19 Bulan Beruntun

Minggu, 7 Juni 2026 11:00 WIB

Jessica Zhou - Bloomberg News

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111122/pboc-lanjutkan-tren-borong-emas-19-bulan-beruntun/2>

Bloomberg, Bank sentral China melanjutkan aksi borong emas pada bulan Mei. Langkah ini memperpanjang tren penambahan cadangan emas mereka di saat harga logam mulia tersebut sedang berada di bawah tekanan pasar global.

Berdasarkan data resmi yang dirilis pada hari Minggu (7/6), jumlah emas batangan yang disimpan oleh Bank Rakyat China (People's Bank of China/PBOC) melonjak sebanyak 320.000 troy ons sepanjang bulan lalu. Penambahan terbaru ini memperpanjang rekor pembelian beruntun PBOC menjadi 19 bulan, yang merupakan rekor terpanjang setidaknya sejak tahun 2015, periode di mana PBOC mulai mempublikasikan pembaruan data cadangan emas secara berkala.

Di pasar global, harga emas bergerak melandai sepanjang bulan Mei. Tren ini menandai penurunan bulanan selama tiga bulan berturut-turut setelah harga komoditas ini sempat menyentuh rekor tertinggi pada akhir Januari lalu. Kekhawatiran yang terus berlanjut terkait inflasi serta ekspektasi pasar bahwa suku bunga akan bertahan tinggi dalam jangka waktu lama akibat imbas perang di Timur Tengah, telah menekan daya tarik emas sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Kendati demikian, aksi borong yang dilakukan oleh bank-bank sentral global telah menjadi pilar penyangga utama bagi pergerakan harga emas dalam beberapa tahun terakhir. Goldman Sachs Group Inc bulan lalu memproyeksikan bahwa aktivitas pembelian emas oleh bank sentral justru akan semakin intensif. Hal ini dipicu oleh perkembangan geopolitik global yang kemungkinan besar bakal memperkuat dorongan negara-negara dunia untuk melakukan diversifikasi pada cadangan devisa mereka.

Harga Minyak Acuan: Menguat dalam Sepekan, Harga Brent & WTI Anjlok di Akhir Pekan

Minggu, 7 Juni 2026 08:15 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/harga-minyak-acuan-menguat-dalam-sepekan-harga-brent-wti-anjlok-di-akhir-pekan>

KONTAN.CO.ID - HOUSTON. Harga minyak ditutup turun di akhir pekan ini karena para pedagang memperoleh keyakinan bahwa konflik baru antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semakin kecil kemungkinannya.

Jumat (5/6/2026), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 ditutup melemah 2,04% ke US\$ 93,09 per barel. Pada sesi sebelumnya, Brent ditutup ambles 2,84%.

Sejalan, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juli 2026 ditutup anjlok 2,69% menjadi US\$ 90,54 per barel, menyusul penurunan 3,1% pada hari Kamis (4/6/2026).

"Pasar tidak melihat adanya eskalasi antara kedua belah pihak," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group. "Meskipun kita tidak mencapai kesepakatan, tampaknya pasar sedang mengalami penurunan eskalasi."

Pengembangan Perminyakan Oman mengatakan operasi di pelabuhan Mina al Fahal tidak terpengaruh setelah tiga sumber mengatakan kepada Reuters bahwa pemuatan minyak telah ditangguhkan menyusul ledakan di dekat tempat berlabuhnya.

Oman mengekspor 800.000 hingga 900.000 barel minyak mentah per hari dari terminal tersebut.

Walau melemah di akhir pekan, namun harga minyak mentah menguat dalam sepekan terakhir ini. Di mana, harga Brent naik 2,16% dan WTI melonjak 3,64% di pekan ini. Ini juga kenaikan mingguan pertama minyak dalam tiga pekan terakhir.

Kontrak tersebut meningkat pada awal pekan ini setelah pertempuran berkobar di Timur Tengah seiring dengan berlalutnya perundingan perdamaian AS-Iran, sementara lalu lintas di Selat Hormuz, tempat seperlima minyak dunia lewat, masih terbatas.

"Ketika harapan untuk mencapai kesepakatan antara AS dan Iran kembali pupus, harga minyak mentah Brent dan gas alam Eropa sedikit naik minggu ini," kata analis Commerzbank pada hari Jumat.

Namun, kenaikan Brent telah dibatasi oleh persediaan minyak yang bertahan lebih lama dari perkiraan, pengalihan ekspor dan penurunan permintaan, tambah Commerzbank.

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada hari Kamis menolak perjanjian yang ditengahi AS antara Israel dan pemerintah Lebanon untuk menghentikan pertempuran. Iran telah menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat bagi setiap perjanjian perdamaian dengan Washington.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis ia yakin kemajuan telah dicapai antara Israel dan Lebanon dan bahwa Lebanon pantas mendapatkan perdamaian.

"Optimisme apa pun masih tertutupi oleh jaringan berita utama dan berita utama yang saling bertentangan," kata analis pasar IG Tony Sycamore dalam sebuah catatan.

OPEC tetap berpegang pada perkiraan pertumbuhan permintaan minyak sebesar 1,2 juta barel per hari untuk tahun ini, Sekretaris Jenderal Haitham Al Ghais mengatakan pada hari Kamis, meskipun terjadi konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.

Ekspor minyak Iran telah jatuh ke level terendah dalam enam tahun terutama karena blokade angkatan laut AS, menurut data pengiriman, meskipun lemahnya permintaan di China telah menekan harga minyak.

Simpanan dalam Uang Rupiah Susut, Likuiditas Perbankan Mulai Tertekan

Minggu, 7 Juni 2026 16:49 WIB

Reporter: Selvi Mayasari, Editor: Noverius Laoli

<https://keuangan.kontan.co.id/news/simpanan-dalam-uang-rupiah-susut-likuiditas-perbankan-mulai-tertekan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Likuiditas industri perbankan mulai menghadapi tekanan seiring menyusutnya simpanan dalam mata uang rupiah.

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan dan masih tingginya suku bunga, dana masyarakat dinilai mulai bergeser ke berbagai instrumen investasi dengan imbal hasil lebih menarik.

Berdasarkan data Bank Indonesia, dana pihak ketiga (DPK) rupiah pada April 2026 tercatat sebesar Rp 8.100,4 triliun atau tumbuh 9,6% secara tahunan (year on year/yoy).

Meski masih tumbuh positif, angka tersebut turun dibandingkan posisi Maret 2026 sebesar Rp 8.208,2 triliun dengan pertumbuhan 11,1% yoy. Artinya, simpanan rupiah menyusut Rp 172,9 triliun secara bulanan.

Sementara itu, DPK valas pada April 2026 tercatat Rp 1.467,3 triliun atau tumbuh 8,6% yoy, relatif stagnan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 1.450,6 triliun.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai penurunan simpanan rupiah mengindikasikan adanya realokasi aset oleh masyarakat dan pelaku usaha, bukan semata-mata penarikan dana dari sistem keuangan.

Menurutnya, di tengah volatilitas pasar dan tingginya suku bunga, sebagian dana masyarakat berpotensi berpindah ke instrumen yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi seperti Surat Berharga Negara (SBN), deposito berjangka, reksadana pasar uang, hingga emas.

“Sebagian dana juga kemungkinan terserap untuk kebutuhan modal kerja perusahaan dan konsumsi rumah tangga,” ujar Rizal kepada [kontan.co.id](https://www.kontan.co.id), Minggu (7/6/2026).

Adapun kenaikan simpanan valas yang hanya sekitar Rp 29,7 triliun menunjukkan perpindahan dana ke valuta asing bukan menjadi faktor dominan. Karena itu, kondisi saat ini lebih tepat dipahami sebagai fenomena portofolio rebalancing dibandingkan aksi dolarisasi.

Rizal mengatakan, penurunan simpanan rupiah memang mulai memberikan tekanan terhadap likuiditas perbankan, terutama jika dana murah atau current account saving account (CASA) ikut mengalami penurunan.

Ketika bank kehilangan sumber dana berbiaya rendah, bank cenderung menaikkan suku bunga deposito guna mempertahankan likuiditas. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendorong kenaikan cost of fund (CoF).

Namun, selama penurunan simpanan masih bersifat sementara dan rasio likuiditas industri tetap memadai, tekanan tersebut dinilai masih dapat dikelola.

Menurutnya, apabila tren penurunan simpanan rupiah berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya dapat meluas terhadap fungsi intermediasi perbankan.

“Kenaikan CoF akan menekan margin bunga bersih (NIM), sehingga ruang bank untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang kompetitif menjadi semakin terbatas. Akibatnya, pertumbuhan kredit berpotensi melambat dan profitabilitas bank ikut tertekan,” katanya.

Untuk menjaga pertumbuhan dana murah, Rizal menilai bank perlu mengubah strategi dari sekadar bersaing pada tingkat bunga menjadi memperkuat ekosistem layanan transaksi yang memberi nilai tambah bagi nasabah.

“Penguatan digital banking, integrasi layanan pembayaran, payroll, cash management, transaksi UMKM, hingga program loyalitas menjadi kunci untuk mempertahankan dana mengendap di rekening,” jelasnya.

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto juga melihat adanya shifting dana masyarakat dari DPK tradisional ke instrumen moneter dan pasar modal yang menawarkan yield lebih tinggi.

Agar Capital Inflow, BI Rate Perlu Naik ke 6% dan Yield SBN/SRBI di Atas 7%

Minggu, 7 Juni 2026 19:41 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/agar-capital-inflow-bi-rate-perlu-naik-ke-6-dan-yield-sbnsrbi-di-atas-7>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah diminta menaikkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk menarik kembali aliran modal asing (capital inflow).

Pemerintah disarankan mengerek yield Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga kisaran 7%-7,5% serta menaikkan BI Rate ke level 6%.

Namun, langkah tersebut tidak akan efektif apabila sentimen negatif investor terhadap kebijakan pemerintah belum diperbaiki.

"Yang paling krusial justru dari sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah. Ini yang harus dikendalikan dulu. Kalau yang itu tidak dibenahi, berapa pun yield dinaikkan, inflow tidak akan masuk," ujar Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman kepada Kontan, Minggu (7/6/2026).

Ia mencontohkan pengalaman Turki beberapa tahun lalu ketika bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif untuk menahan pelemahan mata uang.

Namun, langkah tersebut gagal menarik arus modal karena kepercayaan investor terhadap pemerintah sedang merosot.

Menurut Juniman, setelah faktor kepercayaan investor diperbaiki, langkah berikutnya adalah meningkatkan attractiveness investasi di Indonesia melalui kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), maupun BI Rate.

Saat ini, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun pada Jumat berada di kisaran 6,87%, atau nyaris setara dengan asumsi yield dalam APBN sebesar 6,9%. Dalam kondisi ketidakpastian saat ini, investor diperkirakan akan meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi.

"Kalau hitung-hitungan kasar kami, paling tidak yield dikerek ke kisaran 7%-7,5%. Tanpa itu mungkin tidak ada oportunitas untuk masuk ke pasar kita, apalagi ditambah sentimen negatif yang ada," katanya.

Juniman menilai, apabila pemerintah dan BI ingin mendorong yield ke level tersebut, maka konsekuensinya BI Rate juga harus dinaikkan secara signifikan.

"Kalau mau membuat instrumen kita atraktif, BI Rate harus naik ke level 6%. Harus tinggi. Karena sekarang obligasi tenor satu tahun sudah di atas 7,2%, sementara BI Rate masih 5,25%, jaraknya terlalu jauh," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan suku bunga tinggi memiliki biaya ekonomi yang tidak kecil.

Kenaikan BI Rate berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah, dan memperbesar beban pembayaran bunga utang negara.

"Kalau sudah menaikkan tinggi itu, ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi yang dikorbankan. Pemerintah harus rela membayar biaya tersebut sebagai konsekuensi dari sentimen negatif yang berkembang di pasar," jelasnya.

Selain itu, Juniman juga menyoroti fenomena inverted yield curve atau kondisi ketika yield obligasi jangka pendek lebih tinggi dibandingkan obligasi jangka panjang.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor karena sering dianggap sebagai sinyal adanya masalah dalam perekonomian.

"Di mana-mana kalau terjadi inverted yield, itu salah satu tanda bahwa ekonomi negara tersebut ada masalah. Investor akan memberi sentimen negatif terhadap pasar obligasi," katanya.

Lebih lanjut, Juniman menegaskan bahwa penguatan rupiah tidak semata-mata bergantung pada kenaikan suku bunga.

Ia menilai kenaikan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Mei sebelumnya belum berhasil membalikkan arah pelemahan rupiah karena akar persoalannya berada pada faktor kepercayaan pasar.

"Persoalannya bukan sekadar berapa tinggi suku bunga yang membuat investor asing tertarik. Pemerintah harus memperbaiki sentimen negatif yang sudah terbangun di pasar. Itu yang harus dilakukan lebih dulu," ungkapnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperbaiki komunikasi publik dan menjelaskan secara transparan berbagai kebijakan yang memicu pertanyaan investor, mulai dari kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), pengelolaan investasi melalui Danantara, hingga berbagai kebijakan lain yang dinilai pasar berpotensi menimbulkan distorsi.

"Pemerintah harus menjawab kritik dan pertanyaan yang muncul dari investor, ekonom maupun lembaga pemeringkat. Kebijakan harus dijelaskan secara kredibel, akuntabel dan transparan agar kepercayaan pasar bisa kembali pulih," tegas Juniman.

Ketersediaan Kas Rp 513 Triliun Perkuat Ketahanan Fiskal, Ini Saran Ekonom

Minggu, 7 Juni 2026 18:40 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/ketersediaan-kas-rp-513-triliun-perkuat-ketahanan-fiskal-ini-saran-ekonm>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Posisi kas pemerintah sebesar Rp 513 triliun dinilai menjadi bantalan fiskal yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas keuangan negara dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian global dan gejolak pasar keuangan.

"Kas ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga belanja prioritas, membayar kewajiban tepat waktu, mengurangi tekanan pembiayaan di pasar, dan menghadapi gejolak sementara tanpa harus menerbitkan utang secara tergesa-gesa ketika imbal hasil sedang tinggi," ujar Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede kepada Kontan, Minggu (7/6).

Menurut Josua, di tengah kondisi rupiah yang masih bergejolak dan pasar keuangan yang sensitif terhadap isu fiskal, ketersediaan kas yang besar dapat menjadi sinyal positif bahwa pemerintah masih memiliki ruang kendali dalam mengelola keuangan negara.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa besarnya kas pemerintah tidak otomatis menjamin kondisi fiskal sepenuhnya aman. Menurutnya, efektivitas penggunaan dana tersebut menjadi faktor yang lebih penting dalam menjaga kredibilitas fiskal.

"Kas Rp 513 triliun adalah modal kepercayaan, bukan izin untuk melonggarkan disiplin fiskal," tegasnya.

Josua menjelaskan, dampak positif akan muncul apabila dana kas digunakan untuk menjaga kelancaran belanja produktif, memenuhi kewajiban pemerintah, menahan tekanan pembiayaan, serta memperkuat kepercayaan pasar.

Sebaliknya, apabila digunakan untuk membiayai program yang belum matang atau memperluas kewajiban baru secara tidak selektif, bantalan fiskal tersebut berpotensi cepat menipis dan menimbulkan kekhawatiran investor.

Selain itu, kecukupan kas pemerintah juga perlu dilihat dalam konteks kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.

Pada semester II, realisasi belanja negara umumnya meningkat, sementara pemerintah tetap harus memenuhi pembayaran bunga utang serta berpotensi menghadapi kenaikan subsidi dan kompensasi energi jika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah tetap tinggi.

Di sisi lain, penerimaan negara berisiko melambat apabila aktivitas ekonomi dan harga komoditas mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dapat membuat posisi kas yang saat ini terlihat besar menyusut lebih cepat dari perkiraan.

Josua juga mengidentifikasi sejumlah risiko utama yang perlu diwaspadai pemerintah. Pertama, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah yang dapat meningkatkan beban subsidi energi, kompensasi, serta kebutuhan valas pemerintah.

Kedua, tingginya suku bunga global yang berpotensi mendorong kenaikan biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pembayaran bunga utang.

Ketiga, risiko melemahnya penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) apabila pertumbuhan ekonomi melambat, sektor manufaktur menghadapi tekanan biaya produksi, dan harga komoditas tidak lagi sekuat sebelumnya.

Keempat, meningkatnya realisasi belanja program-program besar pada semester kedua yang belum sepenuhnya didukung tata kelola, sasaran penerima, dan pengukuran manfaat yang jelas.

Dari perspektif investor, Josua menilai posisi kas Rp 513 triliun dapat membantu menenangkan pasar. Namun, manfaat tersebut hanya akan optimal apabila disertai komunikasi yang transparan dari pemerintah.

Investor, menurutnya, perlu memperoleh kejelasan mengenai porsi kas yang benar-benar tersedia untuk digunakan, bagian yang telah dialokasikan untuk kewajiban tertentu, rencana penggunaan hingga akhir tahun, serta strategi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran tetap kredibel.

"Transparansi menjadi kunci agar kas pemerintah dibaca sebagai bantalan, bukan sebagai sumber risiko baru," katanya.

Untuk itu, Josua merekomendasikan agar pemerintah menggunakan bantalan kas secara selektif dengan memprioritaskan pembayaran kewajiban, perlindungan kelompok rentan secara tepat sasaran, menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali, serta memastikan setiap belanja memiliki dampak ekonomi yang nyata.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skenario penyesuaian belanja apabila harga minyak, nilai tukar rupiah, maupun imbal hasil SBN bergerak lebih buruk dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN.

"Dengan begitu, kas Rp 513 triliun tidak hanya menjadi angka besar di neraca pemerintah, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menjaga ketahanan fiskal, stabilitas rupiah, dan kepercayaan investor sampai akhir tahun," pungkask Josua.

OECD Ingatkan Risiko Defisit APBN 2026 Menembus Batas Aman

Minggu, 7 Juni 2026 17:02 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/oecd-ingatan-risiko-defisit-apbn-2026-menembus-batas-aman>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berpotensi melebar pada 2026 seiring meningkatnya beban subsidi energi akibat tingginya harga minyak dunia.

Dalam laporan OECD Economic Outlook terbaru, lembaga tersebut memproyeksikan defisit fiskal Indonesia meningkat dari 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 3,0% PDB pada 2026.

Pelebaran defisit terutama dipicu oleh kenaikan belanja subsidi energi jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pembekuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

OECD memperkirakan harga minyak yang lebih tinggi dapat menambah defisit anggaran sekitar 0,6% PDB melalui peningkatan pengeluaran subsidi.

Tekanan ini muncul ketika pemerintah juga masih menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran besar.

"Pemerintah telah menyatakan komitmennya menjaga defisit tetap di bawah batas fiskal 3%, yang mengharuskan adanya langkah kompensasi sekitar 0,3% PDB, termasuk pemangkasan belanja di sektor lain dan potensi windfall tax tak terduga pada ekspor komoditas," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Senin (7/6/2026).

Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

OECD menilai bantuan langsung kepada kelompok masyarakat rentan akan lebih efektif dibandingkan mempertahankan subsidi harga energi secara luas yang membebani anggaran negara.

Di tengah tantangan tersebut, OECD masih melihat posisi fiskal Indonesia relatif terjaga. Rasio utang pemerintah diproyeksikan bertahan di kisaran 41% PDB hingga 2027.

Ada Ketidapastian Kebijakan, OECD Ramal Ekonomi Indonesia Hanya 4,7% di 2026

Minggu, 7 Juni 2026 15:37 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/ada-ketidapastian-kebijakan-oecd-ramal-ekonomi-indonesia-hanya-47-di-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,7% pada 2026 sebelum kembali menguat ke level 5,0% pada 2027.

Perlambatan tersebut dipicu oleh kenaikan biaya energi global, ketidakpastian kebijakan, serta melemahnya pasar tenaga kerja yang menekan konsumsi dan investasi.

Dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, OECD menilai perekonomian Indonesia memasuki tahun ini dengan fondasi yang cukup kuat.

Produk domestik bruto (PDB) riil pada kuartal I-2026 tercatat tumbuh 5,6% secara tahunan, ditopang oleh permintaan domestik yang solid dan lonjakan belanja pemerintah.

Namun, sejumlah indikator terbaru menunjukkan momentum ekonomi mulai melemah.

Penjualan ritel tercatat turun 1,9% pada April dan kepercayaan konsumen juga mengalami penurunan seiring melemahnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja.

OECD memperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi akan menghadapi tekanan akibat meningkatnya harga energi serta ketidakpastian kebijakan.

"Kenaikan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan akan menekan konsumsi serta investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja," tulis OECD dalam laporan tersebut, dikutip Minggu (7/6/2026).

Di sisi lain, kontribusi ekspor bersih diproyeksikan netral terhadap pertumbuhan karena perlambatan permintaan global terhadap sejumlah komoditas utama Indonesia diperkirakan diimbangi oleh pelemahan impor akibat moderasi permintaan domestik.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan, inflasi Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 3,4% pada 2026.

OECD menyebut kenaikan harga energi global akan mulai merambat ke harga domestik, meskipun dampaknya sebagian tertahan oleh kebijakan pemerintah yang masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

OECD juga memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir 2026 karena kebijakan penahanan harga BBM membantu menjaga tekanan inflasi.

Sementara itu, kebijakan fiskal diproyeksikan tetap ekspansif melalui peningkatan belanja subsidi energi dan program makan bergizi gratis, meski sebagian dikompensasi oleh kenaikan pajak dan penghematan belanja di sektor lain.

Meski demikian, OECD mengingatkan risiko terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cenderung ke bawah.

Gangguan berkepanjangan di pasar energi internasional berpotensi memaksa pembatasan pasokan energi yang dapat menekan konsumsi dan produksi industri.

Selain itu, arus keluar modal yang berlanjut akibat ketidakpastian global maupun domestik berisiko menekan nilai tukar rupiah dan memperbesar tekanan inflasi melalui kenaikan biaya impor.

Di sisi positif, OECD menilai percepatan implementasi Danantara sebagai badan pengelola investasi negara dapat menjadi katalis pertumbuhan apabila mampu menarik investasi swasta dan mempercepat realisasi proyek infrastruktur serta hilirisasi industri.

OECD juga mendorong pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta memperkuat tata kelola investasi publik untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

PHK Capai 23.470 Pekerja hingga Mei, Kemnaker Siapkan Inspeksi ke Kawasan Industri

Minggu, 7 Juni 2026 15:26 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/phk-capai-23470-pekerja-hingga-mei-kemnaker-siapkan-inspeksi-ke-kawasan-industri>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 23.470 orang sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Angka tersebut menunjukkan adanya tambahan 8.045 pekerja dibandingkan posisi April 2026 yang tercatat sebanyak 15.425 orang.

Berdasarkan data Satu Data Ketenagakerjaan, pekerja yang terkena PHK tersebut merupakan peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pada periode Januari sampai Mei 2026 terdapat 23.470 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," tulis Kemnaker dalam publikasi terbarunya, Jumat (5/6/2026).

Secara wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbesar yakni mencapai 5.044 pekerja atau sekitar 21,49% dari total PHK nasional.

Posisi berikutnya ditempati Banten sebanyak 2.596 pekerja, Jawa Timur 2.332 pekerja, Kalimantan Timur 1.841 pekerja, dan DKI Jakarta 1.746 pekerja.

Meningkatnya jumlah PHK tersebut menjadi perhatian pemerintah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan Kemnaker akan melakukan inspeksi lapangan untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang diterima dari pekerja dan serikat buruh.

Menurut dia, laporan yang masuk tidak hanya terkait gelombang PHK di sejumlah kawasan industri, tetapi juga dugaan pelanggaran prosedur PHK hingga praktik pemberangusan serikat pekerja atau union busting.

"Setiap aspirasi dan laporan yang disampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional," kata Afriansyah dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Afriansyah menjelaskan inspeksi lapangan diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Selain melakukan inspeksi, Kemenaker juga akan memperkuat koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri dan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani persoalan ketenagakerjaan.

"Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi dugaan pelanggaran prosedur PHK terhadap pekerja, gelombang PHK di kawasan industri, dugaan praktik union busting, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)," ujarnya.

Kemnaker juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi memberikan masukan kepada DPR yang tengah membahas revisi aturan tersebut.

Pemerintah berharap penguatan koordinasi antarlembaga serta keterlibatan serikat pekerja dapat membantu menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di tengah meningkatnya kasus PHK.

Data PHK yang meningkat juga sejalan dengan tingginya jumlah pekerja yang mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan paparan BPJS Ketenagakerjaan pada 2025, sebanyak 52.850 pekerja telah menerima manfaat JKP pada periode Januari-April 2025.

Jumlah tersebut hampir menyamai total penerima manfaat JKP sepanjang 2024 yang mencapai 57.850 pekerja. Adapun nilai manfaat JKP yang telah dibayarkan hingga April 2025 mencapai Rp 258,61 miliar.

Meski demikian, hingga kini BPJS Ketenagakerjaan belum merilis data terbaru jumlah penerima manfaat JKP secara nasional untuk periode Januari-Mei 2026.

Sebagai informasi, program JKP memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK.

BI Disarankan Naikkan Spread SRBI hingga 275 Bps Jika Rupiah Terus Tertekan

Minggu, 7 Juni 2026 15:07 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-disarankan-naikkan-spread-srbi-hingga-275-bps-jika-rupiah-terus-tertekan>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dinilai sudah sangat komprehensif.

Chief Economist Bank Tabungan Negara (BTN), Myrdal Gunarto, mengatakan, otoritas moneter dan fiskal telah mengerahkan berbagai instrumen guna mengantisipasi potensi pelarian modal asing (capital outflow) di tengah ketidakpastian global.

Ia menilai salah satu instrumen yang cukup efektif untuk menarik kembali aliran dana asing adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Saat ini, spread imbal hasil SRBI tenor 12 bulan terhadap BI Rate telah mencapai lebih dari 200 basis poin (bps), yang menurutnya sudah cukup menarik bagi investor.

Namun, apabila tekanan terhadap rupiah semakin besar, BI masih memiliki ruang untuk meningkatkan spread tersebut guna memperkuat daya tarik aset domestik.

"Kalau memang dirasa mata uang rupiah kita itu melemahnya semakin tajam, ya pasti BI terus melakukan kenaikan spread, bisa jadi 250 bps atau malah mungkin bisa sampai 275 bps," ujar Myrdal kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).

Myrdal menilai tekanan di pasar keuangan saat ini tidak semata-mata berasal dari faktor domestik. Arus keluar modal asing dari pasar saham Indonesia lebih banyak dipicu sentimen global, termasuk aksi rebalancing indeks MSCI serta kecenderungan investor global mengurangi eksposur terhadap aset negara berkembang (emerging markets).

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah negara lain seperti India, Filipina, hingga Malaysia yang mata uangnya turut mengalami tekanan terhadap dolar AS.

Di sisi lain, Myrdal menilai fundamental fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang sangat baik. Ia menyoroti defisit anggaran yang masih terkendali di level sekitar 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Mei, meski pemerintah tengah mempercepat realisasi belanja negara.

Selain itu, kinerja penerimaan negara juga dinilai solid, ditopang oleh pertumbuhan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maupun Pajak Penghasilan (PPh).

Myrdal menambahkan, tantangan yang perlu diperkuat ke depan adalah aspek komunikasi kebijakan pemerintah kepada investor global.

Menurutnya, ketika kondisi global kembali kondusif dan ketidakpastian mereda, aliran modal asing berpotensi kembali masuk ke Indonesia.

Selain SRBI, ia juga menilai imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) masih kompetitif. Menurutya, selama yield SUN tenor 10 tahun berada sekitar 200 basis poin di atas imbal hasil US Treasury tenor yang sama, instrumen tersebut tetap menarik bagi investor asing.

"Sebenarnya kalau yield kita itu yang 10 tahun di atas 200 bps misalkan di 6,5% itu juga sudah menarik, karena kita lihat sekarang untuk di pasar SUN, investor asing juga relatif betah," imbuhnya.

Meski demikian, ia mengingatkan BI agar tetap berhati-hati dalam menaikkan imbal hasil SRBI. Kenaikan yang terlalu tinggi berisiko memicu efek crowding out dan mengganggu likuiditas di sektor keuangan.

Myrdal juga menekankan pentingnya menjaga pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Menurutnya, sumber likuiditas valas tidak hanya berasal dari pasar keuangan, tetapi juga dari hasil ekspor, investasi langsung asing (FDI), serta dana investor yang tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia.

"Jangan sampai ya kejadian seperti pada kuartal-I lalu nih, kalau kita lihat di post other investment kan kelihatan tuh terjadi perpindahan dana dari pasar atau dari sistem keuangan kita ke luar negeri," katanya.

Sebelumnya, BI dan Kementerian Keuangan sepakat memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan sinergi antara pemerintah dan bank sentral terus diperkuat agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan seirama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Perry, terdapat dua langkah utama yang akan ditempuh. Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik melalui penyesuaian imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan, termasuk melalui optimalisasi penempatan dana pemerintah di BI dengan peningkatan remunerasi.

Jumlah PHK Naik 8.045 Orang dalam Sebulan, Sinyal Industri Masuk Fase Tekanan Baru?

Minggu, 7 Juni 2026 14:24 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-phk-naik-8045-orang-dalam-sebulan-sinyal-industri-masuk-fase-tekanan-baru>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terlihat semakin nyata.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 23.470 orang periode Januari - Mei 2026.

Berdasarkan data Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut meningkat 8.045 orang dibandingkan April 2026 yang sebanyak 15.425 pekerja.

Ekonom dan Manajer Riset Strategis Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai lonjakan PHK dalam satu bulan terakhir perlu dicermati karena menunjukkan tekanan terhadap sektor usaha semakin besar.

"Angka PHK yang mencapai lebih dari 23.000 orang dalam lima bulan pertama tahun ini perlu dibaca bukan hanya dari besarnya jumlah, tetapi juga dari kecepatannya. Hanya dalam satu bulan jumlah PHK

bertambah 8.045 orang. Kenaikan yang sangat tajam dalam waktu singkat ini menunjukkan tekanan terhadap sektor usaha telah memasuki fase baru," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (7/6/2026).

Menurut Yusuf, jika sebelumnya perusahaan masih berupaya menahan kenaikan biaya produksi melalui penurunan margin keuntungan, kini sebagian pelaku usaha mulai mengambil langkah yang lebih ekstrem dengan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Ia menilai tekanan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal, mulai dari konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi global hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku.

Meski demikian, Yusuf menilai gelombang PHK yang terjadi saat ini lebih mencerminkan kerentanan struktural sektor industri dibandingkan dampak langsung dari pelemahan ekonomi domestik.

"Konflik di kawasan Iran dan gangguan distribusi melalui Selat Hormuz memang mendorong kenaikan biaya logistik dan bahan baku. Namun guncangan global ini sebenarnya menghantam struktur industri yang sudah lama rentan," katanya.

Menurut dia, hubungan antara pelemahan rupiah dan PHK terjadi secara bertahap. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor bahan baku meningkat sehingga mendorong kenaikan biaya produksi.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung menahan kenaikan harga jual agar tidak kehilangan pasar.

Namun ketika kemampuan menanggung biaya tambahan semakin terbatas, perusahaan mulai mengurangi produksi dan melakukan efisiensi tenaga kerja.

"Dengan kata lain, gelombang PHK yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh tekanan biaya daripada penurunan permintaan," ujarnya.

Yusuf mengingatkan bahwa risiko berikutnya justru berasal dari pelemahan daya beli masyarakat.

Ia menilai upah riil yang dalam beberapa periode terakhir tumbuh negatif menunjukkan kemampuan belanja masyarakat telah tertekan bahkan sebelum muncul berbagai gejolak eksternal.

Apabila kenaikan biaya produksi akhirnya diteruskan ke harga barang, daya beli berpotensi melemah lebih dalam dan menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jika hal itu terjadi, konsumsi rumah tangga akan melemah dan dapat memicu gelombang PHK berikutnya yang berasal dari sisi permintaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf memperkirakan dampak lanjutan dari tren PHK tidak selalu tercermin pada lonjakan tingkat pengangguran terbuka. Sebagian pekerja yang kehilangan pekerjaan formal kemungkinan akan beralih ke sektor informal.

Akibatnya, tantangan yang muncul bukan hanya meningkatnya jumlah pengangguran, tetapi juga memburuknya kualitas pekerjaan, menurunnya pendapatan pekerja, dan melemahnya perlindungan tenaga kerja.

Untuk meredam risiko tersebut, Yusuf mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini ketenagakerjaan guna mendeteksi potensi PHK sejak awal.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada dunia usaha melalui bantuan modal kerja, restrukturisasi utang, subsidi input strategis, relaksasi bea masuk bahan baku, serta percepatan restitusi pajak.

Di sisi lain, ia menilai akar persoalan terletak pada tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor.

Karena itu, agenda jangka menengah pemerintah perlu diarahkan pada penguatan industri hulu, substitusi impor, diversifikasi sumber pasokan, serta peningkatan investasi pada sektor-sektor yang rentan terhadap gejolak global seperti tekstil, petrokimia, besi, dan baja.

"Selama struktur industri domestik masih bergantung pada input impor, setiap gejolak global akan mudah berubah menjadi tekanan biaya yang berujung pada PHK," pungkas Yusuf.

Magelang Tempo Doeloe Hadirkan Wisata Sejarah, Dorong Ekonomi Kreatif dan Kebanggaan Budaya Lokal

Minggu, 7 Juni 2026 00:29 WIB

Didik Saptiyono

<https://wawasan.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0817219463/magelang-tempo-doeloe-hadirkan-wisata-sejarah-dorong-ekonomi-kreatif-dan-kebanggaan-budaya-lokal>

MAGELANG, suaramerdeka-wawasan.com – Suasana masa lalu kembali dihadirkan di jantung Kota Magelang melalui gelaran "Magelang Tempo Doeloe" 2026.

Kegiatan yang masuk rangkaian Hari Jadi ke-1.120 Kota Magelang itu selain untuk hiburan, juga diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta kecintaan warga terhadap sejarah daerahnya.

Acara yang digelar di Alun-alun Kota Magelang ini diharapkan tak sekadar menghadirkan kenangan masa lampau.

"Magelang Tempo Doeloe" 2026 juga diharapkan menjadi wadah promosi wisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai komunitas serta pelaku budaya lokal.

Hal ini seperti disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang Imam Baihaqi.

"Tujuan utama kami adalah meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberi wadah apresiasi bagi pelaku seni budaya lokal," kata Imam Baihaqi dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 6 Juni 2026.

Kegiatan bertema "Sang Legenda" tersebut berlangsung pada 5-7 Juni 2026 di Alun-Alun Kota Magelang.

Acara sendiri secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Magelang Sri Harso pada Jumat, 5 Juni 2026 malam.

Beragam sajian ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pameran benda antik, kendaraan lawas, galeri foto sejarah.

Selain itu di sini juga disajikan kuliner tradisional yang membawa pengunjung merasakan atmosfer Magelang pada masa lampau.

Masyarakat juga dapat mengikuti berbagai agenda pendukung seperti pertunjukan seni budaya, fragmen perjuangan.

Ada juga bincang sejarah, jelajah sepeda tua, hingga city tour heritage yang memperkenalkan jejak sejarah Kota Magelang.

Menurut Imam, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya yang dimiliki.

Penyelenggaraan Magelang Tempo Doeloe melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, BUMD, komunitas, hingga para kolektor barang antik.

Seluruh rangkaian acara terbuka untuk umum setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB.

Sementara itu, Wakil Walikota Magelang Sri Harso menilai tema "Sang Legenda" memiliki pesan penting di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Menurutnya, legenda tidak hanya merujuk pada tokoh besar atau peristiwa bersejarah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keteladanan, semangat perjuangan, dan warisan budaya yang terus relevan dari generasi ke generasi.

"Ini sarana pembelajaran hidup agar Kota Magelang terus maju dan berdaya saing tanpa kehilangan akar budayanya," ujarnya.

Ratusan Pelaku UMKM di Wonogiri Diberi Pelatihan AI Praktis oleh Kemenkomdigi

Minggu, 7 Juni 2026 21:43 WIB

Didik Saptiyono

<https://wawasan.suamerdeka.com/jawa-tengah/0817222228/ratusan-pelaku-umkm-di-wonogiri-diberi-pelatihan-ai-praktis-oleh-kemenkomdigi>

WONOGIRI, suamerdeka-wawasan.com – Kabupaten Wonogiri menjadi daerah pertama di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Pelatihan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) Praktis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pelatihan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Sebanyak 150 pelaku UMKM di Wonogiri mengikuti kegiatan yang digelar di Ruang Khayangan Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini.

Pelatihan tersebut, menghadirkan Dista Ayu Marsega, praktisi UMKM, mentor AI Praktis, sekaligus Duta Canva Indonesia, sebagai mentor.

Materi yang disampaikan mencakup pengenalan AI untuk promosi dan penjualan, teknik menyusun prompt, pembuatan caption dan iklan, desain visual, penyusunan slogan serta jingle promosi, hingga pembuatan website produk UMKM dengan memanfaatkan berbagai platform berbasis AI.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan, pemilihan Kabupaten Wonogiri karena memiliki potensi besar pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, produk lokal, serta UMKM yang tumbuh berbasis kearifan lokal masyarakat.

"Kabupaten Wonogiri adalah lokasi pertama yang kami pilih di Indonesia untuk pelaksanaan pelatihan ini," ujarnya yang disambut antusias para peserta.

Edwin menjelaskan, keberadaan UMKM memiliki posisi penting sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus pendukung ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam pemanfaatan teknologi digital, baik dari aspek literasi, akses teknologi maupun pemahaman terhadap model bisnis digital.

Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya memperkenalkan teknologi AI kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, serta daya saing usaha mereka.

“Mereka yg menguasai AI akan memiliki keilmuan lebih tinggi, kecepatan dalam bekerja, dan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu kami tidak ingin UMKM ketinggalan langkah,” katanya.

“UMKM harus secepatnya beradaptasi dengan AI sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang muncul di dunia digital,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Wiyanto, yang membuka kegiatan sekaligus membacakan sambutan Bupati Wonogiri, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan bagi pelaku usaha.

Menurutnya, penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli, serta memastikan keberlanjutan usaha di tengah perubahan zaman.

“Mendorong UMKM berkembang, berjalan bersama dengan upaya menjaga daya beli masyarakat, untuk memastikan roda usaha pelaku UMKM berputar,” katanya.

“Inilah kondisi yang terintegrasi, yang harus mendapatkan perhatian secara menyeluruh dari semua pihak,” katanya.

Data Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonogiri hingga akhir 2025 mencatat sebanyak 62.628 UMKM telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Jumlah tersebut terdiri atas 62.282 usaha mikro, 305 usaha kecil, dan 21 usaha menengah.

Sebagian besar UMKM tersebut bergerak di bidang perdagangan, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan.

Juga di bidang akomodasi, makanan dan minuman, konstruksi, transportasi, jasa pendidikan, hingga berbagai sektor jasa lainnya.

Wiyanto menambahkan, proses pendataan NIB di Wonogiri juga melibatkan mahasiswa penerima beasiswa berprestasi (Imapres).

Langkah tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi masyarakat untuk lebih mengenal teknologi dan layanan digital.

“Langkah pendataan UMKM dengan pemberian NIB, menjadi satu strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk membuka pintu pengembangan UMKM ketika dibutuhkan untuk melangkah lebih tinggi, salah satunya memasuki pasar digital dan marketplace yang memiliki jangkauan luas,” ujarnya.

Ia berharap pelatihan AI Praktis ini mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis sekaligus meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Peserta tampak antusias mengikuti sesi demi sesi yang berlangsung dari pagi hingga siang hari.

Selain praktik langsung, kegiatan juga diselingi interaksi interaktif, pembagian souvenir, doorprize, dan ice breaking yang membuat suasana pelatihan semakin hidup.

Investor Jepang Getol Jual Saham Global Capai Rp 270 Triliun, Terbesar Sejak 2021

Senin, 8 Juni 2026 16:35 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/investor-jepang-getol-jual-saham-global-capai-rp-270-triliun-terbesar-sejak-2021>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Investor Jepang menjual saham asing dengan kecepatan tercepat dalam sekitar lima tahun pada Mei, terdorong oleh kekhawatiran atas ketegangan di Timur Tengah dan indikasi bahwa reli pasar teknologi telah terlalu tinggi.

Data dari Kementerian Keuangan Jepang menunjukkan bahwa investor Jepang melepas saham asing senilai bersih ¥ 2,72 triliun (sekitar US\$ 16,98 miliar atau Rp 270 triliun) sepanjang Mei, penjualan bersih terbesar sejak April 2021. Sementara itu, indeks MSCI World yang sempat menyentuh rekor 1.138,3 minggu lalu, turun sekitar 2,9% bulan ini setelah laporan pekerjaan AS yang kuat memicu penjualan saham teknologi terkait kecerdasan buatan.

Di sisi lain, investor Jepang meningkatkan pembelian surat utang asing sebesar bersih ¥ 2,9 triliun, jumlah terbesar sejak Mei 2025. Data Kementerian Keuangan menunjukkan akun trust menjual saham asing bersih ¥ 3,38 triliun tetapi membeli obligasi senilai ¥ 3,16 triliun di pasar luar negeri.

Perusahaan manajemen investasi trust dan perusahaan asuransi jiwa membeli saham asing masing-masing bersih senilai ¥ 614,6 miliar dan ¥ 77,5 miliar pada bulan yang sama.

Data terpisah dari Bank of Japan menunjukkan bahwa sepanjang empat bulan pertama tahun ini, investor Jepang telah membeli saham AS senilai ¥ 1,91 triliun dan saham Eropa senilai ¥ 826,4 miliar. Saham Inggris dan Spanyol masing-masing dibeli senilai ¥ 285,5 miliar dan ¥ 80,1 miliar.

Ekonomi Jepang Melambat di Kuartal I-2026 Akibat Merosotnya Belanja Modal Perusahaan

Senin, 8 Juni 2026 07:25 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-jepang-melambat-di-kuartal-i-2026-akibat-merosotnya-belanja-modal-perusahaan>

KONTAN.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi Jepang dilaporkan kehilangan momentum pada kuartal Januari-Maret (Kuartal I) 2026 dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

Berdasarkan revisi data Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) yang dirilis oleh Kantor Kabinet pada hari Senin (8/6/2026) yang dilansir Reuters, perlambatan ini dipicu oleh lesunya belanja modal perusahaan, serta bayang-bayang risiko dari konflik bersenjata di Timur Tengah.

Data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Jepang tumbuh sebesar 1,8% secara tahunan (annualized) pada kuartal pertama.

Angka ini mengalami penurunan (revisi turun) jika dibandingkan dengan perkiraan awal (preliminary) yang berada di level 2,1%.

Meski melambat, capaian ini masih berada di atas ekspektasi moderat para ekonom yang memprediksi pertumbuhan di angka 1,3%.

Tanpa disetahunkan (non-annualized), PDB Jepang tercatat tumbuh 0,5%, sedikit lebih baik dari perkiraan konsensus pasar sebesar 0,3% dan sama dengan data awal yang dirilis sebelumnya.

Kontras Antara Konsumsi Domestik dan Belanja Modal

Laporan kuartalan ini menyoroti adanya ketimpangan antara daya beli masyarakat dan investasi sektor korporasi:

Konsumsi Sektor Swasta: Komponen yang menyumbang lebih dari separuh total perekonomian Jepang ini tumbuh positif sebesar 0,3%, sesuai dengan estimasi awal.

- Belanja Modal Perusahaan (Capital Expenditure): Sektor ini justru menyusut 0,7% pada kuartal pertama. Angka ini direvisi turun cukup dalam dari perkiraan awal yang sempat diproyeksikan naik 0,3%.
- Permintaan Eksternal (Ekspor Neto): Berkontribusi menambah 0,3 poin persentase terhadap PDB. Sementara permintaan domestik menyumbang 0,2 poin persentase. Kedua angka ini tidak mengalami perubahan dari rilis data perdana.

Hantaman Inflasi Akibat Blokade Selat Hormuz

Guna mengantisipasi dampak pembengkakan biaya hidup, pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada hari Rabu pekan lalu telah merampungkan draf anggaran belanja tambahan sebesar \$19 miliar untuk tahun fiskal ini.

Anggaran darurat tersebut dialokasikan untuk meredam dampak lonjakan biaya energi pada sektor rumah tangga akibat krisis geopolitik di Timur Tengah.

Hubungan Jepang dengan pasar energi global saat ini berada dalam posisi rentan. Serangan militer AS-Israel ke Iran pada akhir Februari lalu, yang disusul oleh pemblokiran efektif Selat Hormuz oleh Teheran, telah mengerek harga minyak dunia.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang menampung seperlima pasokan minyak dan gas global.

Ketergantungan Jepang yang sangat tinggi terhadap pasokan minyak mentah dari Timur Tengah membuat negara ini berada di garis depan yang paling terdampak.

Meroketnya harga bahan bakar mulai memicu inflasi di dalam negeri, mengikis daya beli masyarakat, serta mempersempit margin keuntungan korporasi.

Risiko penurunan ekonomi yang parah kini mengintai jika gangguan pasokan energi tersebut terus berlanjut.

Arah Kebijakan Moneter Bank of Japan (BOJ)

Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, Bank of Japan (BOJ) dijadwalkan akan menggelar rapat kebijakan moneter selama dua hari pada pekan depan.

Sejumlah sumber internal mengungkapkan kepada Reuters bahwa BOJ diperkirakan akan tetap melanjutkan rencana untuk menaikkan suku bunga acuan pada bulan ini.

Langkah pengetatan moneter tersebut akan tetap dieksekusi, kecuali jika terjadi eskalasi konflik militer yang luar biasa di Timur Tengah hingga merontokkan stabilitas pasar keuangan global secara ekstrem.

Dolar AS Makin Garang Senin (8/6), Peluang Kenaikan Suku Bunga The Fed Naik ke 70%

Senin, 8 Juni 2026 07:34 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-makin-garang-senin-86-peluang-kenaikan-suku-bunga-the-fed-naik-ke-70>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) kokoh di kisaran level tertinggi dalam dua bulan terakhir pada perdagangan hari Senin (8/6/2026).

Penguatan ini terjadi setelah rilis data ketenagakerjaan AS (Non-Farm Payrolls) yang tumbuh luar biasa, memicu para pelaku pasar untuk meningkatkan taruhan bahwa Bank Sentral AS (The Fed) akan menaikkan suku bunga acuan pada akhir tahun ini.

Di sisi lain, keperkasaan greenback membuat mata uang Yen Jepang kian terpuruk dan kembali masuk ke dalam zona intervensi pemerintah Tokyo.

Meskipun pergerakan awal pasar valas cenderung terbatas karena bursa Australia tutup memperingati hari libur nasional, indeks dolar AS tetap mempertahankan keuntungan besarnya.

Laporan ketenagakerjaan AS mencatat adanya penambahan 172.000 lapangan kerja baru pada bulan lalu, angka yang jauh melampaui estimasi konsensus para ekonom.

Dampak dari penguatan dolar AS ini langsung menekan mata uang global lainnya ke level terendah:

- Euro (EUR): Merosot ke level terendah dua bulan di posisi US\$1,1507.
- Poundsterling (GBP): Tertahan di level terendah tiga pekan pada posisi US\$1,3316.
- Dolar Australia (AUD): Merosot ke level terendah dua bulan di posisi US\$0,7016.
- Dolar Selandia Baru (NZD): Anjlok ke posisi US\$0,5779.

Ketahanan Ekonomi AS di Tengah Krisis Energi

"Laporan data ketenagakerjaan AS ini menggambarkan bahwa pasar tenaga kerja mereka tetap menguat secara struktural, meskipun saat ini sedang terjadi guncangan harga energi global akibat konflik," kata Jonas Goltermann, Kepala Ekonom Pasar di Capital Economics dilansir Reuters.

Kombinasi antara akselerasi pasar tenaga kerja dan risiko inflasi dari sektor energi membuat pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed pada akhir tahun ini menjadi kian masuk akal.

Capital Economics memproyeksikan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan meluncurkan dua kali kenaikan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada paruh kedua tahun ini.

Sebelum data tenaga kerja dirilis, investor global sebenarnya sudah mulai mengantisipasi kenaikan bunga The Fed akibat krisis energi global yang dipicu oleh perang Iran, yang berpotensi kuat mengerek inflasi dunia.

Berdasarkan indikator CME FedWatch Tool, pasar kini melihat adanya probabilitas lebih dari 70% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember mendatang, melonjak tajam dibandingkan prediksi pekan lalu yang baru sebesar 45%.

Yen Jepang Berada di Titik Kritis

Keperkasaan dolar AS menjadi mimpi buruk bagi mata uang Yen Jepang yang kini merosot ke level 160,29 per dolar AS.

Nilai ini mengikis habis seluruh keuntungan intervensi senilai 11,7 triliun yen (\$73,01 miliar) yang digelontorkan pemerintah Tokyo sebulan lalu saat mata uangnya menyentuh level terendah sejak Juli 2024 di posisi 160,72.

"Yen terus berada di bawah tekanan karena volatilitas selisih suku bunga (interest rate disadvantage) yang persisten. Bank of Japan (BOJ) dinilai masih terlalu lambat dalam melakukan normalisasi kebijakan, di saat bank sentral negara maju lainnya sudah bergerak agresif (hawkish)," jelas David Meier, ekonom di Julius Baer.

Kendati demikian, sejumlah sumber internal mengungkapkan kepada Reuters bahwa BOJ diperkirakan akan mengambil langkah berani untuk menaikkan suku bunga acuan pada bulan ini, dengan catatan tidak terjadi eskalasi konflik militer yang ekstrem di Timur Tengah hingga mengacaukan pasar finansial.

Rebound Tipis Pasar Kripto

Dari pasar aset kripto, Bitcoin terpantau berhasil naik lebih dari 1% ke level US\$62,838.60 pada Senin pagi, mencoba bangkit (rebound) setelah sempat jatuh ke level terendahnya sejak Oktober 2024 pada pekan lalu. Sementara itu, Ether menguat lebih dari 3% ke posisi US\$1.680,87.

Pergerakan Bitcoin sejak awal tahun ini dinilai cukup berat karena kalah saing dalam memperebutkan likuiditas global.

Booming saham teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) serta rencana mega IPO sejumlah raksasa teknologi seperti SpaceX ditengarai telah menarik minat modal investor keluar dari pasar mata uang kripto terbesar di dunia tersebut.

Investor Global Tinggalkan Indonesia, Kebijakan Ekonomi Prabowo Picu Kekhawatiran

Senin, 8 Juni 2026 15:36 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/investor-global-tinggalkan-indonesia-kebijakan-ekonomi-prabowo-picu-kekhawatiran>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Kepercayaan investor terhadap Indonesia melemah di tengah pelemahan tajam nilai rupiah dan meningkatnya kekhawatiran arah kebijakan ekonomi di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Sejak menjabat pada 2024, pemerintahan Prabowo disebut menjalankan kebijakan ekonomi yang agresif namun dinilai kurang konsisten. Salah satu program besar yang dicanangkan adalah penyediaan makan gratis untuk jutaan pelajar, sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan disiplin fiskal yang sudah dijaga selama bertahun-tahun.

Namun, sejumlah langkah kebijakan yang dianggap tidak lazim membuat pasar keuangan bergejolak. Di antaranya adalah sentralisasi ekspor komoditas melalui dana kekayaan negara besar bernama Danantara, serta rencana pemberian mandat pertumbuhan ekonomi kepada bank sentral yang dinilai mengancam independensinya.

Tekanan juga datang dari faktor eksternal, termasuk gejolak harga energi global. Kondisi ini membuat Indonesia, yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu pasar negara berkembang paling menjanjikan, kini mengalami penurunan sentimen investor.

Nilai tukar rupiah menjadi sorotan utama. Mata uang ini melemah lebih dari 8% sepanjang tahun ini dan sempat menyentuh level terendah baru sekitar Rp 18.190 per dolar AS. Pelemahan ini disebut bukan hanya akibat pasar, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi karena memicu arus keluar modal lebih lanjut.

Bank sentral Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Mei dan menghabiskan cadangan devisa sekitar US\$ 12 miliar untuk menahan laju pelemahan rupiah. Namun, tekanan tetap berlanjut.

Investor asing juga terus menarik dana dari pasar Indonesia. Arus keluar dari pasar saham mencapai sekitar US\$ 3,2 miliar hingga akhir Mei, yang merupakan yang terbesar sejak 2009. Kepemilikan asing pada obligasi pemerintah juga turun tajam ke level terendah dalam hampir dua dekade.

Lembaga pemeringkat internasional turut memberi sinyal waspada. Moody's dan Fitch Ratings telah memangkas prospek kredit Indonesia menjadi negatif, dengan alasan menurunnya kredibilitas kebijakan. Sementara itu, S&P Global Ratings menyatakan peringkat Indonesia akan bergantung pada upaya memperkuat ruang fiskal.

Di sisi lain, penyedia indeks MSCI juga tengah meninjau isu transparansi dan perdagangan saham Indonesia, meski penurunan status ke kategori lebih rendah dianggap belum pasti.

Jika terjadi penurunan peringkat kredit, investor besar berpotensi terpaksa menjual aset mereka, yang dapat memperburuk tekanan di pasar.

Investor juga menyoroti sejumlah keputusan kebijakan terbaru, termasuk revisi undang-undang yang memberikan parlemen kewenangan lebih besar dalam mengarahkan bank sentral serta menambahkan target pertumbuhan sektor riil dalam mandatnya. Hal ini dinilai dapat mengganggu independensi kebijakan moneter.

Selain itu, penunjukan anggota keluarga presiden ke posisi penting di bank sentral dan pengambilalihan ekspor komoditas oleh negara melalui Danantara menambah kekhawatiran pasar terhadap transparansi kebijakan.

Sejumlah investor menilai kondisi ini menciptakan "lingkaran negatif": pelemahan mata uang memicu arus keluar modal, yang kemudian memperlemah ekonomi dan memperburuk kepercayaan pasar.

Para pengelola dana global menilai bahwa tanpa perubahan arah kebijakan yang jelas, tekanan terhadap ekonomi Indonesia bisa berlanjut. Beberapa investor bahkan mulai mengurangi eksposur mereka terhadap aset Indonesia.

Meski demikian, sebagian analis masih menilai bahwa pemulihan masih mungkin terjadi jika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan memperkuat disiplin fiskal serta independensi lembaga ekonomi.

Secara keseluruhan, Indonesia saat ini dinilai berada dalam fase tekanan tinggi di pasar keuangan global, dengan kombinasi pelemahan mata uang, arus modal keluar, dan meningkatnya risiko kebijakan yang menjadi perhatian utama investor.

Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US\$ 144,9 Miliar Pada Mei 2026

Senin, 8 Juni 2026 10:40 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-indonesia-turun-jadi-us-1449-miliar-pada-mei-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengumumkan, posisi cadangan devisa Indonesia sebesar US\$ 144,9 miliar hingga akhir Mei 2026. Jumlah tersebut turun US\$ 1,3 miliar dibandingkan posisi akhir April 2026 yang mencapai US\$ 146,2 miliar.

Secara tahunan, posisi cadangan devisa juga sudah ambles US\$ 7,59 miliar dibandingkan akhir Mei 2025 yang tercatat sebesar US\$ 152,49 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan cadangan devisa pada Mei 2026 dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia.

“Perkembangan cadangan devisa Mei 2026 ini dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik,” ujar Denny dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2026).

Meski turun, Bank Indonesia menilai posisi cadangan devisa tetap berada pada level yang kuat. Per akhir Mei 2026, cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi tersebut juga jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Denny.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga, didukung oleh cadangan devisa yang memadai dan berlanjutnya aliran masuk modal asing.

Menurut Denny, persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional serta imbal hasil investasi domestik yang masih menarik menjadi faktor yang menopang arus modal masuk tersebut.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

BI: Uang Primer (M0) Tumbuh 14,2% pada Mei 2026, Capai Rp 2.214,6 Triliun

Senin, 8 Juni 2026 11:42 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-uang-primer-m0-tumbuh-142-pada-mei-2026-capai-rp-22146-triliun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat uang primer atau monetary base (M0) Adjusted pada Mei 2026 tumbuh 14,2% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp 2.214,6 triliun.

Meski masih tumbuh tinggi, laju pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 14,3% YoY.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan uang primer pada Mei 2026 didorong oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia serta peningkatan uang kartal yang beredar di masyarakat.

"Uang Primer (M0) Adjusted pada Mei 2026 tumbuh 14,2% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 14,3% (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun," ujar Denny dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2026).

Denny menjelaskan, pertumbuhan M0 Adjusted ditopang oleh kenaikan giro bank umum di Bank Indonesia Adjusted yang tumbuh 17,4% secara tahunan. Sementara itu, uang kartal yang diedarkan meningkat 15,8% yoy.

Menurut BI, perkembangan uang primer tersebut mencerminkan kondisi likuiditas yang tetap memadai di sistem keuangan. Pertumbuhan M0 juga telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas yang dilakukan Bank Indonesia melalui kebijakan pengendalian moneter yang telah disesuaikan (adjusted).

"Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 Adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted)," kata Denny.

Bank Indonesia sebelumnya menegaskan akan terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong penyaluran kredit bagi pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan Bea Cukai Hanya Tumbuh 0,7%, Ekonom Ingatkan Sinyal Perlambatan

Senin, 8 Juni 2026 17:33 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-bea-cukai-hanya-tumbuh-07-ekonom-ingatkan-sinyal-perlambatan>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang hanya mencapai 0,7% hingga Mei 2026 dinilai perlu dicermati secara hati-hati.

Meski masih mencatatkan pertumbuhan positif, angka tersebut menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya yang mampu tumbuh lebih tinggi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurrahman, mengatakan kinerja kepabeanan dan cukai belum dapat dikategorikan mengkhawatirkan.

Namun, laju pertumbuhan yang sangat terbatas menjadi sinyal yang perlu diwaspadai, terutama karena sektor ini berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan dan industri.

"Di satu sisi, angka ini masih menunjukkan pertumbuhan positif sehingga belum dapat dikatakan mengkhawatirkan. Namun, di sisi lain, ketika penerimaan perpajakan dan PNBPN mampu tumbuh dua digit, perlambatan pada kepabeanan dan cukai mengindikasikan adanya pelemahan aktivitas pada sektor-sektor yang menjadi basis penerimaannya," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, sektor-sektor yang menopang penerimaan kepabeanan dan cukai meliputi perdagangan internasional, impor bahan baku, hingga konsumsi barang kena cukai.

Karena itu, perlambatan penerimaan dapat menjadi cerminan melemahnya aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tersebut.

Rizal menilai pertumbuhan yang hanya 0,7% belum dapat dijadikan indikator kuat untuk memprediksi arah penerimaan hingga akhir tahun. Prospek penerimaan ke depan akan sangat bergantung pada faktor yang menjadi penyebab perlambatan saat ini.

Apabila perlambatan dipicu oleh menurunnya volume impor dan melemahnya aktivitas industri, maka prospek penerimaan kepabeanan dan cukai pada sisa tahun ini masih menghadapi tantangan.

Sebaliknya, apabila faktor utamanya berasal dari penurunan harga komoditas, efek basis tinggi (high base effect) pada tahun sebelumnya, atau perubahan pola perdagangan, maka peluang perbaikan pada semester II 2026 masih terbuka.

"Jika perlambatan disebabkan oleh melemahnya volume impor dan aktivitas industri, maka prospeknya masih relatif menantang," katanya.

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memantau realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Sejumlah indikator ekonomi riil perlu diperhatikan untuk membaca arah penerimaan pada bulan-bulan mendatang.

Beberapa indikator yang dinilai penting antara lain perkembangan impor bahan baku dan barang modal, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur, konsumsi rumah tangga, serta kinerja ekspor.

Menurutnya, perbaikan pada indikator-indikator tersebut akan menjadi sinyal positif bagi penerimaan kepabeanan dan cukai.

"Jika sektor riil mulai membaik, maka penerimaan kepabeanan dan cukai berpotensi kembali menguat pada paruh kedua tahun ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun hingga Mei 2026, tumbuh 0,7% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Rp122,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif setelah beberapa bulan sebelumnya penerimaan kepabeanan dan cukai masih mengalami kontraksi.

"Bea cukai naik 0,7%, sudah positif dua bulan berturut-turut. Nanti akan naik lagi lebih bagus," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Dari total penerimaan tersebut, cukai menyumbang Rp90,4 triliun atau tumbuh 0,2% yoy. Sementara penerimaan bea masuk mencapai Rp21,5 triliun atau naik 9,7% yoy. Adapun penerimaan bea keluar tercatat Rp11,9 triliun, masih terkontraksi 8,9% yoy.

Menurut Purbaya, pertumbuhan penerimaan cukai didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau pada kuartal I-2026. Ia menepis anggapan bahwa produksi rokok mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah.

"Produksi tembakau naik. Ada yang bilang sama saya turun, salah. Kebijakan kita kan tidak menaikkan cukai, harusnya naik," katanya.

Sementara itu, pertumbuhan bea masuk yang tetap kuat ditopang oleh meningkatnya impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh 10,67% secara tahunan.

Purbaya menilai data tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas manufaktur nasional sedang mengalami peningkatan.

"Impor bahan baku dan bahan penolong tumbuh 10,67%. Artinya aktivitas manufacturing sedang meningkat. Kalau tidak, angka ini tidak akan tumbuh," ujarnya.

BI Rilis Kurva Imbal Hasil Pasar Uang, Demi Perkuat Transparansi Pembentukan Harga

Senin, 8 Juni 2026 17:37 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-rilis-kurva-imbalance-hasil-pasar-uang-demi-perkuat-transparansi-pembentukan-harga>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) meluncurkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang sebagai upaya memperkuat efisiensi dan transparansi pembentukan harga di pasar uang domestik.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kurva imbal hasil tersebut mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder sehingga dapat menjadi acuan yang lebih akurat dan berbasis transaksi nyata bagi seluruh pelaku pasar.

"Kurva ini mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder, sehingga memberikan acuan yang lebih akurat dan berbasis transaksi nyata bagi seluruh pelaku pasar," ujar Denny dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang mulai diluncurkan pada 8 Juni 2026 dan dapat diakses melalui website resmi Bank Indonesia www.bi.go.id pada menu Fungsi Utama – Moneter – INDONESIA dan Harga Pasar Uang Lainnya.

Denny menjelaskan, kurva imbal hasil tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (RRT) harga dan volume transaksi aktual instrumen Repurchase Agreement (Repo) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder.

Data yang dipublikasikan mencakup transaksi Repo tenor satu bulan serta SRBI tenor tiga bulan, enam bulan, dan 12 bulan. Publikasi akan dilakukan setiap hari Senin atau pada hari kerja pertama setiap minggunya pukul 10.00 WIB dengan memuat data harian pada minggu kerja sebelumnya.

Menurut BI, peluncuran publikasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) dalam memperkuat reformasi suku bunga acuan domestik dan mendorong terbentuknya pasar keuangan yang modern, transparan, efisien, serta berbasis transaksi.

Adapun NWGBR merupakan kelompok kerja yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia.

BI berharap publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang tersebut dapat meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar uang, mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder, memperdalam pasar keuangan domestik, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Rupiah Ditutup Melemah di Rp18.178/US\$

Senin, 8 Juni 2026 15:54 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111241/rupiah-ditutup-melemah-di-rp18-178-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan sore ini dengan pelemahan 0,87% ke Rp18.178/US\$, Senin (8/6/2026). Ini menjadi posisi penutupan (closing) terlemah sepanjang sejarah.

Rupiah ditutup pada level terendah sepanjang masa, Rp18.178/US\$ setelah melemah 0,87% pada sesi perdagangan Senin (8/6/2026). (Bloomberg)

Pelemahan rupiah dipicu oleh menguatnya indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama, berada di 100,09. Begitu juga dengan harga minyak mentah dunia kembali terkerek naik 5,09% menjadi US\$97,83 per barel, setelah ketidakpastian geopolitik kembali menghangat pasca penyerangan rudal Iran ke arah Israel.

Kondisi ini membawa pergerakan mata uang kawasan di zona merah. Setelah ringgit dan rupiah, rupee India menyusul bersama baht Thailand, peso Filipina dan dolar Taiwan.

Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 1,8%, disusul dolar Singapura dan yuan offshore menguat terbatas masing-masing 0,06% dan yuan China serta yen Jepang masing-masing 0,05% dan 0,04%.

Hari ini, pelemahan rupiah didorong dengan data cadangan devisa yang tergerus selama lima bulan beruntun sebanyak US\$11,57 miliar. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyebut pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000/US\$ dan penurunan tajam IHSG sebagai gejala memburuknya kepercayaan pasar, bukan semata-mata pelemahan nilai tukar biasa.

Dia menilai tekanan yang datang bersamaan dari luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri, dolar AS masih kuat karena ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat semakin mundur, ketegangan Timur Tengah meningkatkan risiko harga minyak, dan investor global cenderung mengurangi aset negara berkembang.

"Dari dalam negeri, pasar semakin sensitif terhadap arah kebijakan fiskal, pelebaran defisit, kebutuhan subsidi energi, tata kelola Danantara, isu transparansi pasar saham, serta kekhawatiran terhadap independensi otoritas moneter," papar Josua.

Faktor luar negeri masih menjadi pemicu awal dengan porsi sekitar 55% sampai 60%, menurut Josua. Terutama melalui penguatan dolar AS, risiko harga minyak, dan arus modal global yang keluar dari aset berisiko.

Namun faktor dalam negeri sudah membesar, sekitar 40-45%, karena tekanan global menjadi jauh lebih kuat ketika investor meragukan konsistensi kebijakan.

"Faktor global menjelaskan mengapa hampir semua mata uang negara berkembang tertekan, tetapi faktor domestik menjelaskan mengapa rupiah dapat melemah lebih dalam dan IHSG terkoreksi lebih tajam. Dengan kata lain, tekanan luar negeri menyalakan api, tetapi ketidakpastian kebijakan domestik memperbesar rambatannya," demikian Josua.

Sore ini, IHSG terkoreksi 4,28%, melanjutkan tren yang berlangsung sejak pekan lalu. Namun IHSG tidak sendirian, di mana KOSPI dan KOSDAQ melemah paling dalam masing-masing 8,29% dan 9,08%. Disusul NIKKEI 2253,95%, dan Taiwan TAIEX sebesar 3,48%.

Langkah Konkret

Josua menambahkan, untuk memperbaiki rapor rupiah yang telah cukup lama 'merah', pemerintah perlu menunjukkan langkah yang konkret, bukan hanya komunikasi penenang.

Pertama, pemerintah perlu menegaskan kembali disiplin defisit dan memastikan defisit tetap di bawah 3% PDB dengan jalur konsolidasi yang kredibel.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan negara agar belanja prioritas tidak bergantung berlebihan pada utang.

Ketiga, tata kelola Danantara harus dibuat transparan melalui laporan keuangan berkala, audit independen, batas utang yang jelas, pemisahan tegas antara investasi komersial dan penugasan negara, serta kepastian bahwa risikonya tidak otomatis berpindah ke APBN.

Keempat, independensi Bank Indonesia harus dijaga karena pasar sangat sensitif terhadap kesan bahwa kebijakan moneter terlalu diarahkan untuk membiayai pertumbuhan jangka pendek.

Kelima, reformasi pasar modal perlu dipercepat, khususnya transparansi kepemilikan, porsi saham publik, tata kelola emiten, dan perlindungan investor.

Tanpa langkah konkret yang serius, maka arus modal asing keluar berpotensi akan membesar.

Josua memperkirakan, dalam skenario dasar jika tidak ada penurunan peringkat resmi dari S&P dan tidak ada eskalasi besar pada harga minyak, tambahan arus modal keluar dari saham dan obligasi hingga beberapa bulan ke depan dapat berada di kisaran US\$3 miliar hingga US\$5 miliar, atau sekitar Rp54 triliun sampai Rp90 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000/US\$.

Namun, dalam skenario berat, jika terjadi penurunan peringkat, risiko penurunan status pasar saham oleh MSCI, harga minyak bertahan tinggi, dan komunikasi kebijakan tetap tidak meyakinkan, maka Josua memperkirakan arus keluar dapat melebar ke kisaran US\$7 miliar hingga US\$10 miliar.

"Tekanan terbesar mungkin di pasar saham, sedangkan pasar obligasi relatif lebih tertahan karena porsi asing di SBN sudah lebih rendah dibandingkan periode 2013 dan investor domestik berperan lebih besar," katanya

Sebagai catatan, hari ini imbal hasil di pasar obligasi mengalami kenaikan, dan hampir semua imbal hasil berada di kisaran 7%. Imbal hasil tenor 10 tahun tercatat naik 38,4 basis poin menjadi 7,26%.

Disusul tenor 5 tahun naik 39,2 bps menjadi 7,33%. Bahkan, tenor 1 tahun mencatatkan imbal hasil tertinggi di 7,28%.

Selain SUN berdenominasi rupiah, tekanan juga datang dari pasar global. Aksi jual obligasi Indonesia berdenominasi dolar AS (INDON) menguat setelah data ketenagakerjaan AS pada Mei menunjukkan pasar tenaga kerja yang tetap kuat dan resilien.

Data tersebut memperbesar peluang Federal Reserve mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama, bahkan membuka ruang bagi kenaikan suku bunga tambahan jika lonjakan harga energi akibat

ketegangan di Selat Hormuz kembali mendorong inflasi. Dalam kondisi tersebut, investor cenderung meminta premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset negara berkembang, termasuk Indonesia

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp386 T per Mei 2026, 46% dari Target

Senin, 8 Juni 2026 15:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111227/pemerintah-tarik-utang-baru-rp386-t-per-mei-2026-46-dari-target/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp386 triliun sampai Mei 2026 untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pembiayaan utang sampai lima bulan pertama tahun ini sudah mencapai hampir separuh dari total target pemerintah sepanjang 2026. Tepatnya, porsi penerbitan utang baru tercatat 46,4% dari target APBN yang sebesar Rp832,2 triliun.

"Kemudian, pembiayaan non utang Rp6,5 triliun atau 4,4% dari target yang mencapai Rp143,1 triliun," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta pekan lalu, dikutip Senin (8/6/2026).

Secara rinci dipaparkan, total pembiayaan anggaran sampai Mei 2025 tercatat Rp379,4 triliun atau 55,1% terhadap total target APBN Rp689,1 triliun. Angkanya meningkat 16,2% dibanding pembiayaan anggaran periode yang sama tahun lalu, yakni Rp326,5 triliun.

"Pembiayaan APBN dikelola secara prudent (hati-hati) dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Terkait pasar surat utang negara, Purbaya menjelaskan bahwa pergerakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tetap stabil di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini tercermin dari yield SBN tenor 10 tahun yang terjaga di level 6,68%.

Kemudian, selisih imbal hasil yield spread SBN terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menjadi acuan atau US Treasury relatif rendah dibanding beberapa negara pasar berkembang. Hal ini menunjukkan risiko Indonesia relatif rendah.

Uang Primer (M0) Tumbuh 14% Lebih dalam 2 Bulan Beruntun

Senin, 8 Juni 2026 11:19 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111182/uang-primer-m0-tumbuh-14-lebih-dalam-2-bulan-beruntun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumumkan data uang primer atau M0 adjusted periode Mei. Terjadi pertumbuhan positif lebih dari 14% selama dua bulan beruntun.

Pada Senin (8/6/2026), BI melaporkan jumlah M0 per akhir Mei sebesar Rp 2.214,6 triliun. Melonjak 14,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan tersebut melanjutkan kenaikan April yang sebesar 14,3% yoy.

Perkembangan M0 dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy). Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

"Uang Primer (M0) adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas. Mulai Januari 2025, Bank Indonesia melakukan penyesuaian perhitungan M0 adjusted untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan uang primer dan pengaruh dari kebijakan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia," terang laporan BI.

RI Diproyeksi Kena Tarif Impor AS 18%, Bertahap dari 24 Juli

Senin, 8 Juni 2026 10:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111172/ri-diproyeksi-kena-tarif-impor-as-18-bertahap-dari-24-juli/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan Amerika Serikat (AS) bakal mengenakan tarif baru terhadap produk impor asal Indonesia sekitar 18%, dari sebelumnya 10%. Besaran tarif ini akan mulai diterapkan secara bertahap mulai 24 Juli 2026.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi wijono Moegi arso menjelaskan tarif baru yang akan berlaku ini berlandaskan penyelidikan pasal 301 Undang-Undang (UU) Perdagangan AS 1974, khususnya terkait dengan tudingan atas praktik kerja paksa (forced labor) maupun kapasitas berlebih (excess capacity).

Tarif tersebut nantinya akan menggantikan tarif global 10% yang habis masa berlakunya pada 24 Juli 2026. Saat ini, Indonesia untuk sementara waktu masih dikenakan tarif global 10%.

Bea masuk global ini berlaku untuk seluruh negara dan sama rata untuk seluruh produk, usai Mahkamah Agung AS pada awal 2026 membatalkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump sebelumnya yang berbasis Undang-Undang Kedaruratan Ekonomi AS (IEEPA). Guna mengakali putusan MA ini, Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global dan dilanjutkan dengan tarif berbasis penyelidikan pasal 301.

"Saat ini, Indonesia dikenai tarif sementara sebesar 10% yang bersifat temporer dan akan berakhir pada 24 Juli 2026. Setelah masa berlaku tarif sementara tersebut berakhir, struktur tarif akan disusun secara bertahap," kata Susi wijono dalam keterangan tertulis kepada Bloomberg Technoz dikutip Senin (8/6/2026).

Susi wijono menyebut tarif 18% yang diperkirakan bakal diterapkan AS ke Indonesia ini mencakup dua komponen. Komponen pertama yakni yang terkait dengan kerja paksa sebesar 10% dan diberlakukan terlebih dahulu.

Diketahui, Donald Trump memang memberlakukan gelombang tarif impor baru sebesar 10% hingga 12,5%. Tarif baru menasar total 60 negara mitra dagang yang dinilai AS gagal mengatasi kerja paksa.

Perwakilan Dagang AS (USTR) menyebutkan, sebanyak 54 negara gagal memberlakukan dan menegakkan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa, antara lain Argentina, China, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Inggris atau dikenakan tarif 54%.

Sementara enam negara lain gagal menegakkan larangan impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa. Indonesia masuk dalam kategori ini bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan dikenakan tarif 10%.

Adapun komponen kedua atau tambahan berkaitan dengan kelebihan kapasitas struktural. Tarif tambahan ini akan ditambahkan beberapa minggu setelah penerapan tarif kerja paksa 10% pada 24 Juli 2026. Namun, Susiwijono menyebut akan ada pengecualian terhadap sejumlah komoditas.

"Melalui mekanisme penumpukan (stacking) komponen-komponen tersebut—disertai dengan pengecualian (exclusions) atas sejumlah produk yang telah disepakati—tarif final untuk Indonesia diproyeksikan akan berada pada tingkat 18%. Angka ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir proses, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapannya," jelas Susiwijono.

Dia menuturkan besaran final tarif berbasis pasal 301 ini masih sangat bergantung pada proses penyelesaian proses hukum dan administrasi di AS. Negara-negara terdampak, termasuk Indonesia, disebut akan diberikan kesempatan untuk memberikan komentar tambahan (comment period) serta untuk didengar pendapatnya sebelum implementasi penuh tarif ini.

"Dengan demikian, angka 18% merupakan proyeksi akhir yang masih tunduk pada penyelesaian proses resmi," ucap dia

Mengenai pengecualian, pemerintah AS disebut berkomitmen untuk mengecualikan sejumlah produk dari tarif 18% ini. Diketahui, Indonesia dan AS telah menandatangani Agreement in Reciprocal Trade (ART) pada awal tahun. Komoditas asli ditanam di Indonesia hingga sejumlah produk manufaktur seperti tekstil dikecualikan dari tarif 19% yang sebelumnya disepakati.

Menurut Susiwijono, proses penyelidikan pasal 301 ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama perdagangan bilateral lebih luas antara kedua negara. Dampak positif yang didapatkan Indonesia salah satunya adalah dukungan untuk proses akses menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Sejumlah komitmen yang telah disepakati dinilai turut mendukung proses akses Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)," terangnya.

Ihwal tarif kerja paksa, Susi menilai Indonesia mendapatkan keuntungan dengan tarif sebesar 10% bersama dengan lima negara lain. Tarif yang lebih rendah dari 54 negara lainnya itu menunjukkan Indonesia telah menyampaikan komitmen terkait isu kerja paksa.

Pemerintah Indonesia pun disebut telah menempuh seluruh tahapan yang disyaratkan secara konsisten dan kooperatif. Tahapan itu meliputi telah penyampaian tanggapan tertulis, partisipasi dalam dengar pendapat publik, kehadiran pada serangkaian konsultasi, serta penyerahan seluruh pembaruan informasi yang diminta oleh USTR.

"Keterlibatan aktif ini menjadi dasar bagi pertimbangan yang lebih baik atas posisi Indonesia," imbuh Susiwijono.

Isu Perdagangan Lainnya

Di sisi lain, pemerintah Indonesia dan AS dalam pertemuan bilateral pada sela-sela agenda MCM OECD 2026 di Paris turut membicarakan isu perdagangan lain. Di antaranya adalah ketentuan perizinan impor (import licensing) komoditas pertanian seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, serta bungkil kedelai (soybean meal).

Kemudian, peluang akses pasar produk tembaga (copper cathode) yang tunduk pada tarif Section 232, serta tindak lanjut atas Perjanjian Subsidi Perikanan (WTO Fisheries Subsidies Agreement).

Penyelesaian isu-isu pertanian secara tepat waktu, kata Susiwiwono, menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran implementasi kerangka kesepakatan secara keseluruhan.

Promosikan Surat Utang RI, Purbaya Bakal ke China dan Inggris

Senin, 8 Juni 2026 08:48 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111161/promosikan-surat-utang-ri-purbaya-bakal-ke-china-dan-inggris/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana terbang ke China dan Inggris pada pertengahan Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempromosikan instrumen surat utang Indonesia kepada investor global.

Purbaya mengatakan akan bertolak ke China pada 16 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memperkenalkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond kepada investor.

“Minggu depan saya akan ke China. Tanggal 16 [Juni] ke China untuk promosi Panda Bond,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, dikutip Senin (8/6/2026).

Setelah dari Negeri Panda, Purbaya akan melanjutkan lawatan ke Inggris. Dia akan bertemu investor dan menyampaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat.

“Untuk meyakinkan bahwa memang kita menjalankan kebijakan ekonomi yang baik,” ujarnya.

Menurut Purbaya, rangkaian kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis investor. Langkah tersebut juga mendukung strategi diversifikasi sumber pembiayaan negara melalui penerbitan surat utang.

Sebelumnya, Purbaya menargetkan penerbitan Panda Bond dapat direalisasikan pada Juni 2026. Dia mengaku telah menerima laporan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto terkait persiapan penerbitan instrumen tersebut. Penerbitan Panda Bond menjadi salah satu strategi diversifikasi pembiayaan.

Strategi itu ditempuh agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bergantung pada satu sumber pendanaan tertentu.

Dalam kesempatan terpisah, Bank Indonesia (BI) sebelumnya juga menyatakan mendukung penerbitan instrumen keuangan berdenominasi renminbi. Instrumen tersebut mencakup Panda Bond dan Dim Sum Bond oleh pemerintah Indonesia.

Dukungan itu diberikan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing (valas) domestik.

Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta bulan lalu mengatakan, penerbitan Panda Bond dapat menjadi alternatif penempatan renminbi. Menurut Thomas, instrumen tersebut juga dapat memperkuat likuiditas mata uang China di pasar domestik.

Thomas menambahkan, BI juga memanfaatkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). BI turut mendukung penyediaan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar offshore sebagai alternatif penempatan likuiditas rupiah di pasar luar negeri.

Investor Asal Malaysia Bidik Investasi Berbagai Sektor di Jateng

Senin, 8 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/investor-asal-malaysia-bidik-investasi-berbagai-sektor-di-jateng/>

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima audiensi investor dari The Marq International SDN BHD asal Kuala Lumpur, Malaysia bersama tim teknis Jakarta Konsultan Grup, di kantornya, Senin (8/6/2026).

Pertemuan itu membahas tindak lanjut rencana investasi di bidang energi terbarukan, geothermal, pertanian, dan infrastruktur.

Luthfi menyampaikan apresiasi atas rencana investasi perusahaan tersebut di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung investasi yang masuk ke wilayahnya, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dukungan itu diwujudkan melalui perizinan yang mudah, kondusivitas wilayah, kawasan industri, dan tenaga kerja.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Luthfi yang juga didampingi direktur sejumlah BUMD, menawarkan berbagai peluang investasi yang dapat digarap di Jawa Tengah.

Misalnya dalam energi terbarukan, PT JPEN yang merupakan BUMD milik Pemprov Jateng sedang fokus pada pemanfaatan CNG sebagai alternatif LPG. Begitu juga PT JTAB menawarkan pengembangan agribisnis dan agrowisata di Jawa Tengah. Kemudian PT PRPP menawarkan pengembangan kawasan PRPP secara lebih komprehensif.

Selain itu di bidang infrastruktur, Luthfi menawarkan potensi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, serta Dry Port di Batang dan Kendal, untuk mendukung logistik kawasan industri dan ekonomi khusus.

“Untuk sektor pariwisata, kami punya seribu desa wisata dan aglomerasi wisata. Selain itu juga sedang kami upayakan pengembangan wisata ramah muslim,” katanya.

Sementara itu, CEO The Marq International SDN BHD, Steven Wei, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dia menilai, Jawa Tengah merupakan salah satu tempat yang sangat terbuka untuk investor.

“Saya gembira karena Pak Gubernur sangat mendukung untuk membuat kerja sama. Tidak hanya dengan Malaysia tetapi juga China, Korea, dan negara lain yang terhubung dengan kami. Ini waktu yang tepat untuk investasi ke Jawa Tengah,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

Dorong Pelestarian Lingkungan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat, Jepara Perkuat Budaya Gotong Royong di Karimunjawa

Senin, 8 Juni 2026

Penulis: Diskominfo Jepara/YFR, Editor: Di/UI, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadariah/dorong-pelestarian-lingkungan-dan-penguatan-ekonomi-masyarakat-jepara-perkuat-budaya-gotong-royong-di-karimunjawa/>

JEPARA – Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata, Pemerintah Kabupaten Jepara terus memperkuat budaya gotong royong, khususnya di Karimunjawa. Pasalnya, Karimunjawa merupakan destinasi wisata unggulan, yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Hal itu disampaikan Bupati Jepara melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Moh Ali, pada penilaian Lomba Desa dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2026, di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Sabtu (6/6/2026).

Pihaknya berharap, semangat gotong royong terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan warga, serta menjaga kelestarian lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

Untuk itu, lanjutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, instansi lintas sektor, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.

“Alun-alun, jalan protokol, dan kawasan wisata harus selalu terjaga kebersihannya sebagai wajah utama Karimunjawa,” kata Moh Ali.

Terkait penilaian BBGRM, imbuhnya, terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian, yaitu bidang kemasyarakatan, ekonomi, lingkungan, serta sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Pelaksana Harian (Plh) Camat Karimunjawa Muslichan menyampaikan, budaya gotong royong masyarakat Karimunjawa masih terjaga dengan baik, dan menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan daerah.

“Gotong royong masyarakat Karimunjawa masih sangat kuat, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung sektor pariwisata,” ujar Muslichan.

Menurutnya, semangat kebersamaan masyarakat terlihat dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk kawasan wisata bahari yang menjadi daya tarik utama Karimunjawa. Kesadaran kolektif tersebut juga berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, yang banyak bergantung pada sektor pariwisata dan UMKM.

Rupiah Melemah, Pemprov Jateng Terus Upayakan Jaga Nadi UMKM

Senin, 8 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/rupiah-melemah-pemprov-jateng-terus-upayakan-jaga-nadi-umkm/>

SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayahnya, di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM. Sebab, UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah, sehingga perlu terus dibina agar lebih tahan menghadapi dinamika ekonomi. Apalagi, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 4,2 juta unit usaha.

Bersarnya jumlah itu, lanjut dia, menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekonomi daerah. Karenanya, pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha agar bertahan, tetapi juga naik kelas melalui akses permodalan, pendampingan, pengemasan produk, hingga pemasaran.

Selain modal, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kualitas produk agar UMKM lebih kompetitif. Pendampingan tersebut mencakup pembenahan packaging (pengemasan), pemasaran, hingga peluang masuk ke rantai ekspor.

“UMKM merupakan backbone-nya (tulang punggung) ekonomi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi andalan kita, sehingga selalu kita bina,” ujar Luthfi, di sela Rapat paripurna DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang, Senin (8/8/2026).

Walakin, terkait dampak pelemahan rupiah terhadap bahan baku, Luthfi mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sektor jasa keuangan, perbankan, pelaku usaha, dan lainnya.

“Kita harus gandeng BI, kemudian OJK, kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

Awal Juni, Harga Kebutuhan Pokok di Temanggung Relatif Terkendali

Senin, 8 Juni 2026

Penulis: Aiz; Nin;Ekp, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/awal-juni-harga-kebutuhan-pokok-di-temanggung-relatif-terkendali/>

TEMANGGUNG – Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kliwon Temanggung terpantau stabil pada awal Juni 2026. Berdasarkan pemantauan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung, Kamis (4/6/2026), tidak terdapat perubahan harga pada komoditas utama dibandingkan hari sebelumnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dinkopdag Kabupaten Temanggung, Pontjo Marbagyo, mengatakan cabai dan bawang merah masih menjadi komoditas dengan harga relatif tinggi dibandingkan bahan pokok lainnya.

Harga cabai rawit merah tercatat Rp71.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp60.000 per kilogram, cabai merah besar Rp57.000 per kilogram, dan cabai merah keriting Rp53.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah berada di kisaran Rp49.333 per kilogram.

Untuk komoditas beras, harga beras medium IR 64 tercatat Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp14.800 per kilogram, sedangkan beras SPHP Bulog dijual Rp12.500 per kilogram.

Harga gula pasir curah berada pada kisaran Rp17.500 per kilogram dan gula pasir kemasan Rp17.750 per kilogram. Adapun minyak goreng Minyakita dijual Rp15.700 per liter, sementara minyak goreng curah maupun kemasan premium masing-masing Rp21.000 per liter.

Pada kelompok protein hewani, daging ayam ras karkas diperdagangkan Rp37.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Harga daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram, paha depan Rp140.000 per kilogram, sedangkan sandung lamur dan tetelan masing-masing Rp87.500 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas hortikultura masih berada pada kisaran harga yang relatif terjangkau. Tomat dijual Rp11.000 per kilogram, kentang Rp14.500 per kilogram, sawi hijau Rp7.300 per kilogram, kangkung Rp6.300 per kilogram, serta jeruk lokal Rp15.000 per kilogram.

Pontjo menegaskan, hingga awal Juni 2026 seluruh komoditas yang dipantau masih berada dalam kondisi terkendali tanpa adanya gejolak yang berarti.

“Seluruh komoditas yang dipantau belum mengalami kenaikan, maupun penurunan harga,” ujarnya.

Warga Temanggung, Mustofa (36), mengaku kondisi harga kebutuhan pokok dalam beberapa hari terakhir relatif stabil. Ia berharap situasi tersebut dapat terus terjaga sehingga tidak membebani masyarakat.

“Semoga harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ana (43), salah seorang pedagang di Pasar Kliwon, berharap harga tetap terkendali karena kenaikan harga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, dan berdampak pada omzet penjualan.

“Harga sejumlah kebutuhan sempat naik dalam beberapa waktu terakhir. Daya beli masyarakat mulai menurun, sehingga omzet penjualan ikut berkurang,” ujarnya.

Kota Magelang Raih Penghargaan Terbaik I Penurunan Tingkat Pengangguran se-Jawa-Bali

Senin, 8 Juni 2026

Yandip Prov Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kota-magelang-raih-penghargaan-terbaik-i-penurunan-tingkat-pengangguran-se-jawa-bali/>

KOTA MAGELANG – Kota Magelang meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Tingkat Kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamar Chaniago, pada malam penganugerahan yang berlangsung di Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Acara yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil merumuskan dan menjalankan kebijakan ketenagakerjaan secara efektif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain menerima penghargaan, Kota Magelang juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar atas capaian tersebut.

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, yang hadir menerima penghargaan menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan di Kota Magelang.

“Kami akan terus memperkuat berbagai program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja dan berusaha,” ujar Damar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang, Susilowati, menjelaskan, penurunan tingkat pengangguran didukung oleh berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan, layanan antar kerja, penyelenggaraan job fair, serta penguatan program penempatan tenaga kerja.

Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan wirausaha baru juga menjadi faktor penting dalam membuka peluang kerja dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) ini membuktikan bahwa program pengendalian pengangguran lokal yang telah dilaksanakan Pemkot Magelang melalui Disnaker telah berhasil memberikan layanan bagi pencari kerja, serta mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri,” kata Susilowati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, Handini Rahayu, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang terus menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2023, TPT Kota Magelang tercatat sebesar 5,25 persen. Angka tersebut turun menjadi 4,40 persen pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 4,31 persen pada tahun 2025.

“Capaian ini menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan,” jelas Handini.

Pemerintah Kota Magelang berkomitmen mempertahankan tren positif tersebut melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 Diharap Hasilkan Direktori Usaha Ekonomi Digital

Senin, 8 Juni 2026

Yandip Jateng Prov

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sensus-ekonomi-2026-diharap-hasilkan-direktori-usaha-ekonomi-digital/>

KABUPATEN SEMARANG – Sebanyak 1.056 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 mulai melakukan pendataan usaha ekonomi warga Kabupaten Semarang secara door to door, mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang Dewi Trirahayuni, pada pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 angkatan ke dua, di Abimantrana Ballroom The Wujil, Bergas, Senin (8/6/2026). Menurutnya, pelatihan 1.056 petugas pendataan SE 2006 dibagi dalam tiga gelombang, di empat tempat pelatihan (training center) di empat hotel. Para petugas itu dikelompokkan dalam 42 kelas, agar materi pelatihan dapat dipahami secara efektif.

Disampaikan, ada pertanyaan spesifik yang akan ditanyakan kepada warga, guna mengungkap usaha ekonomi berbasis digital. Kategori usaha ini belum jamak dilakukan warga saat pelaksanaan SE 2016 lalu. Tahun ini, akan menjadi salah satu fokus pendataan.

“Kita belum memiliki direktori usaha ekonomi digital. Lewat SE 2026 ini nanti akan ditanyakan kepada warga responden, tentang usaha produktif berbasis digital,” ujarnya.

Dewi mencontohkan, usaha penjualan aneka produk dari rumah lewat online, pembuatan konten kreatif melalui aneka platform digital, selama ini belum tersentuh pendataan. Padahal, model usaha ini ditengarai memberikan kontribusi yang besar, terhadap perekonomian nasional.

Para petugas pendataan, lanjut Dewi, nantinya harus bekerja keras mengungkap data usaha ini. Tiap petugas akan bekerja delapan jam sehari dan menjangkau 22 wilayah RT.

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro berharap, para petugas dapat memperoleh data yang akurat dari warga responden. Peran mereka sangat penting, guna mendapatkan data valid usaha ekonomi warga.

“Lakukan komunikasi dengan baik. Catat data riil dan jangan sulap data,” tegasnya.

Harga Minyak Dunia Ditutup Naik Senin (8/6): Brent ke US\$ 94,25 & WTI ke US\$ 91,30

Selasa, 9 Juni 2026 05:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/harga-minyak-dunia-ditutup-naik-senin-86-brent-ke-us-9425-wti-ke-us-9130>

KONTAN.CO.ID - Harga minyak dunia ditutup menguat pada perdagangan Senin (8/6/2026), meskipun sempat memangkas kenaikan tajam setelah Iran dan Israel menyatakan telah menghentikan serangan satu sama lain menyusul seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk meredakan konflik.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent ditutup naik US\$ 1,16 atau 1,3% ke level US\$ 94,25 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US\$ 0,76 atau 0,8% menjadi US\$ 91,30 per barel.

Sebelumnya, kedua kontrak minyak tersebut sempat melonjak lebih dari 5% pada awal perdagangan setelah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Sejak konflik terbaru pecah lebih dari 100 hari lalu, harga Brent telah melonjak sekitar 31%, sedangkan WTI naik sekitar 37%. Pada April lalu, Brent bahkan sempat menyentuh level di atas US\$ 126 per barel.

Sentimen pasar sempat memanas setelah Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas petrokimia di Iran barat daya yang diklaim digunakan untuk memproduksi rudal balistik.

Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan telah menyerang fasilitas serupa di Kota Haifa, Israel.

Aksi saling serang tersebut terjadi setelah Israel kembali menggempur wilayah Lebanon yang menjadi basis kelompok Hizbullah yang didukung Iran.

Teheran berulang kali menegaskan bahwa kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik harus mencakup penghentian operasi militer Israel di Lebanon.

"Kontrak minyak mentah bergerak lebih tinggi dalam perdagangan yang masih sangat sensitif setelah Iran dan Israel saling melancarkan serangan rudal selama akhir pekan," kata Senior Vice President Trading BOK Financial, Dennis Kissler.

Trump Desak Penghentian Konflik

Presiden AS Donald Trump pada Senin meminta Iran dan Israel segera menghentikan aksi militer mereka.

Pernyataan tersebut membantu meredakan sebagian kekhawatiran pasar, meskipun risiko gangguan pasokan energi masih tetap tinggi.

Analisis UBS Giovanni Staunovo mengatakan, investor masih mencermati potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi jalur sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.

Duta Besar Iran untuk Rusia bahkan menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap dibuka, tetapi dengan sejumlah persyaratan yang akan ditetapkan oleh Iran dan Oman, termasuk kemungkinan penerapan biaya transit.

Sementara itu, Komandan Pasukan Quds Iran, Esmail Qaani, menyebut akan dibentuk sabuk keamanan baru yang membentang dari Selat Hormuz hingga Selat Bab el-Mandeb di dekat Yaman, serta mencakup kawasan Teluk dan Laut Merah.

Analisis SEB Research Erik Meyersson menilai, pasar saat ini berharap tercapai kesepakatan terbatas yang mampu mencegah gangguan lebih lanjut terhadap jalur energi global tanpa harus menyelesaikan seluruh akar konflik yang ada.

Di sisi lain, kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran mengumumkan larangan bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel untuk melintasi Laut Merah.

Langkah tersebut menambah kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi energi dan perdagangan global.

OPEC+ Tambah Target Produksi

Di tengah kekhawatiran pasokan, kelompok OPEC+ pada Minggu (7/6/2026) menyepakati kenaikan target produksi minyak untuk keempat kalinya dalam empat bulan terakhir.

Namun, sejumlah analis menilai keputusan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pasokan riil karena banyak negara anggota masih kesulitan memenuhi kuota produksinya.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terganggunya jalur distribusi akibat konflik Timur Tengah, serta penurunan kapasitas produksi Rusia akibat serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi negara tersebut.

Kepala Analisis Geopolitik Rystad Energy Jorge Leon menilai, dampak fisik dari keputusan OPEC+ terhadap pasar minyak saat ini sangat terbatas.

"Dalam kondisi pasar saat ini, dampak riil dari keputusan tersebut hampir mendekati nol," ujarnya.

Sementara itu, Arab Saudi kembali memangkas harga jual resmi (official selling price/OSP) minyak mentah untuk pasar Asia pada Juli 2026, menandai penurunan harga untuk bulan kedua berturut-turut.

Efek AI, Ekonomi Korea Selatan Tumbuh 1,8% di Q1-2026

Selasa, 9 Juni 2026 11:50 WIB

Heesu Lee

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111320/efek-ai-ekonomi-korea-selatan-tumbuh-1-8-di-q1-2026/2>

Bloomberg, Perekonomian Korea Selatan (Korsel) tumbuh lebih cepat pada awal tahun dibandingkan estimasi awal. Perkembangan positif ini memperkuat sikap bank sentral yang kian cenderung

mengetatkan kebijakan, seiring dengan lonjakan ekspor di sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Berdasarkan data dari Bank of Korea (BOK) yang dirilis pada hari Selasa (9/6), Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Selatan tumbuh 1,8% pada periode Januari-Maret jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Angka ini sedikit lebih cepat daripada estimasi awal sebesar 1,7%. Capaian tersebut menandai laju pertumbuhan kuartalan terkuat sejak kuartal keempat tahun 2021, sekaligus melampaui estimasi median dari survei Bloomberg.

Revisi naik ini utamanya didorong oleh investasi fasilitas dan konsumsi swasta yang lebih kuat. Di sisi lain, volume ekspor melonjak 5,9% dari kuartal sebelumnya berkat berkahnya pengiriman cip semikonduktor yang tengah berada dalam tren naik tajam.

Data ini menambah bukti bahwa keuntungan dari tren global pemanfaatan AI terus merembet ke berbagai sektor perekonomian Korsel. Saat BOK merilis estimasi awal PDB-nya pada April lalu, raksasa teknologi SK Hynix Inc juga melaporkan lonjakan laba kuartalan hingga lima kali lipat. Fenomena ini dipicu oleh melambungnya harga cip memori yang menggarisbawahi kuatnya permintaan pasar terkait AI.

Secara rinci, investasi fasilitas melonjak hingga 6,6% dan konsumsi swasta meningkat 0,6%. Angka ini direvisi naik dari estimasi awal seiring dengan menguatnya belanja masyarakat, baik untuk sektor barang maupun jasa. Sementara itu, investasi konstruksi terpantau tumbuh 1,4%, sedangkan belanja pemerintah justru mengalami penurunan sebesar 0,4%.

Dalam laporan terpisah, BOK juga merevisi naik estimasi pertumbuhan ekonomi mereka untuk tahun 2025. Bank sentral menyatakan bahwa PDB riil Korsel berekspansi sebesar 1,1% pada tahun lalu, naik dari estimasi sebelumnya yang berada di angka 1%.

Angka pertumbuhan yang lebih kokoh ini muncul di saat BOK mulai mengadopsi nada kebijakan yang lebih ketat di bawah kepemimpinan Gubernur yang baru, Shin Hyun Song. Para penentu kebijakan memang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada bulan lalu. Namun, dua anggota dewan menyuarakan perbedaan pendapat dan lebih memilih opsi kenaikan suku bunga. Selain itu, proyeksi diagram titik dari dewan gubernur mencakup potensi kenaikan suku bunga acuan hingga menyentuh 3,25% dalam enam bulan ke depan.

Gubernur Shin menyatakan bahwa indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, serta risiko finansial yang berkaitan dengan sektor perumahan kini semakin mengarah pada arah kebijakan yang sama. Menurutnya, keselarasan indikator ini berhasil meminimalkan dilema pilihan kebijakan (trade-offs) yang biasanya memperumit pengambilan keputusan moneter bank sentral.

Ekspor China Naik 19,4% pada Mei 2026, Ditopang Permintaan AI dan Aksi Borong Barang

Selasa, 9 Juni 2026 10:31 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-china-naik-194-pada-mei-2026-ditopang-permintaan-ai-dan-aksi-borong-barang>

KONTAN.CO.ID - Kinerja perdagangan luar negeri China kembali menunjukkan ketahanan pada Mei 2026. Ekspor Negeri Tirai Bambu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan pasar, didorong oleh percepatan

pengiriman barang sebelum dampak kenaikan biaya energi global terasa lebih luas serta kuatnya permintaan produk semikonduktor dan perangkat berbasis kecerdasan buatan (AI).

Melansir Reuters, berdasarkan data bea cukai China yang dirilis Selasa (9/6/2026), nilai ekspor China dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) meningkat 19,4% secara tahunan (year on year/YoY) pada Mei 2026.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan 14,1% pada April dan melampaui proyeksi ekonom yang memperkirakan kenaikan sekitar 15%.

Di sisi impor, pertumbuhan juga tetap kuat. Impor China naik 27,4% secara tahunan pada Mei, lebih tinggi dibanding kenaikan 25,3% pada April dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 25%.

Kinerja ekspor yang solid menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor perdagangan China yang menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Sejumlah ekonom menilai lonjakan ekspor masih ditopang oleh aksi pembelian lebih awal (front-loading) dari para importir global yang berupaya mengamankan pasokan barang sebelum biaya energi dan logistik meningkat lebih jauh akibat konflik di kawasan Teluk.

Selain itu, permintaan global terhadap semikonduktor dan perangkat keras AI masih menjadi penopang utama ekspor manufaktur China.

Namun demikian, sejumlah indikator mulai menunjukkan bahwa momentum tersebut berpotensi mereda.

Data aktivitas manufaktur China pada Mei menunjukkan pesanan ekspor baru mengalami penurunan tajam dari level tertinggi dalam dua tahun yang tercatat pada April.

Sebelumnya, pelaku logistik dan pergudangan melaporkan lonjakan aktivitas akibat banyak perusahaan asing yang berlomba mengamankan pasokan barang.

Kini, setelah persediaan meningkat, pembeli diperkirakan mulai mengurangi pemesanan sambil menunggu perkembangan konflik dan peluang tercapainya gencatan senjata.

Ekspor yang kuat sebelumnya membantu ekonomi China yang bernilai sekitar US\$ 20 triliun mencatat pertumbuhan kuartal pertama di atas ekspektasi pasar. Namun, sejumlah analis menilai momentum ekonomi mulai melambat dalam beberapa bulan terakhir.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa lemahnya permintaan domestik membuat ekonomi China semakin rentan terhadap perlambatan ekonomi global, sekaligus meningkatkan peluang pemerintah untuk meluncurkan stimulus tambahan.

Di tengah kondisi tersebut, Beijing juga menghadapi tekanan internasional yang semakin besar untuk memperkuat konsumsi domestik.

Sejumlah negara menilai model pertumbuhan yang terlalu bergantung pada ekspor dan manufaktur berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perdagangan global.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam laporan terbarunya menyebut hampir 60% peningkatan pangsa pasar perusahaan-perusahaan China dapat dijelaskan oleh berbagai bentuk subsidi yang diterima.

Sementara itu, riset terbaru Federal Reserve AS menunjukkan surplus perdagangan China terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia kini telah melampaui 1%, lebih tinggi dibanding puncak yang pernah dicapai Jepang maupun Jerman pada akhir abad ke-20.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kelebihan kapasitas industri China diperkirakan akan terus memengaruhi peta manufaktur global dalam beberapa tahun ke depan.

Di sisi diplomatik, pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bulan lalu memang membantu meredakan ketegangan kedua negara.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan terobosan berarti, baik terkait sengketa tarif perdagangan maupun kerja sama dalam upaya penyelesaian konflik Iran.

Secara keseluruhan, surplus perdagangan China pada Mei 2026 tercatat sebesar US\$ 105,43 miliar, meningkat dibanding US\$ 84,8 miliar pada April dan jauh melampaui perkiraan pasar sebesar US\$ 92,1 miliar.

Ekspor dan Impor China Meningkat di Mei 2026, Tapi ke Pasar AS Turun

Selasa, 9 Juni 2026 11:05 WIB

Reporter: Rizki Caturini, Editor: Rizki Caturini

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-dan-impor-china-meningkat-di-mei-2026-tapi-ke-pasar-as-turun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor China melonjak 19,4% secara tahunan ke rekor tertinggi sebesar US\$ 376,78 miliar pada Mei 2026, jauh melebihi perkiraan 15% dan meningkat tajam dari kenaikan 14,1% pada April.

Ini merupakan peningkatan tercepat sejak Februari, karena perusahaan terus membangun persediaan untuk mengantisipasi tekanan harga energi yang berasal dari perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Untuk lima bulan pertama tahun ini, total ekspor China masih naik 15,5% secara tahunan menjadi US\$ 1,71 triliun. Selama periode tersebut, ekspor meningkat ke negara-negara ASEAN (20,3%), Uni Eropa (16,4%), Hong Kong (45,5%), Korea Selatan (28,5%), dan Jepang (7,1%), tetapi menurun ke Amerika Serikat (AS) (-2,7%).

Seperti dikutip Tradingeconomics, Selasa (9/6), impor China juga melonjak 27,4% year-on-year menjadi US\$ 271,35 miliar pada Mei 2026, meningkat dari pertumbuhan 25,3% pada bulan sebelumnya dan melampaui perkiraan pasar sebesar 25%.

Ini merupakan bulan ke-12 berturut-turut pertumbuhan pembelian, didorong oleh permintaan domestik yang kuat meskipun tekanan inflasi meningkat akibat gangguan rantai pasokan dan biaya energi yang tinggi karena perang di Timur Tengah.

Selama enam bulan pertama tahun ini, impor melonjak 24,5% menjadi US\$ 1.261,69 miliar, didorong oleh permintaan yang lebih tinggi dari negara-negara ASEAN (21,0%), Uni Eropa (8,6%), Jepang (27,8%), Hong Kong (173,2%), dan Korea Selatan (56,5%), tetapi turun dari AS (-5,5%).

Impor peralatan pengolahan data melonjak 65,1%, sementara pembelian semikonduktor dan sirkuit terpadu masing-masing naik 11,5% dan 52,1%.

Terjadi peningkatan volume pada minyak nabati (24,2%), bijih tembaga (36,7%), minyak olahan (6,74%), logam tanah jarang (40,6%), dan tembaga mentah (26,1%), tetapi terjadi penurunan pada gas alam (-10,1%), batubara (-2,9%), dan baja (-8,5%).

Ekspor China Melesat Ditopang Boom AI

Selasa, 9 Juni 2026 15:25 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-china-melesat-ditopang-boom-ai>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Kinerja perdagangan China kembali menunjukkan kekuatan pada Mei 2026. Pertumbuhan ekspor Negeri Tirai Bambu justru semakin kencang di tengah gejolak global akibat konflik Iran yang sempat memicu kekhawatiran terhadap perlambatan permintaan dunia.

Laporan Reuters, data bea cukai China yang dirilis Selasa (9/6) menunjukkan nilai ekspor negara tersebut melonjak 19,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 14,1% pada April dan melampaui perkiraan ekonom yang sebelumnya memperkirakan kenaikan sekitar 15%.

Di sisi lain, impor China juga tumbuh kuat sebesar 27,4% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 25,3% pada bulan sebelumnya. Capaian tersebut turut melampaui ekspektasi pasar.

Kuatnya ekspor China ditopang oleh tingginya permintaan global terhadap produk-produk teknologi tinggi, terutama semikonduktor yang menjadi tulang punggung perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Senior China Strategist ANZ, Xing Zhaopeng, mengatakan kenaikan harga chip masih menjadi faktor utama yang menopang ekspor China.

"Harga memori naik sekitar 20% dibanding bulan sebelumnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekspor sirkuit terpadu mencapai 111% pada Mei," ujarnya.

Data menunjukkan ekspor peralatan pemrosesan data otomatis China melonjak 66,1% secara tahunan. Sementara itu, ekspor produk teknologi tinggi naik 50,9% dan pengiriman mobil meningkat 39%.

Menurut Xing, gelombang investasi AI global masih akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perdagangan China. "Cerita AI masih jauh dari selesai. Industri chip sedang mengubah lanskap perdagangan China," katanya.

Lonjakan investasi AI di berbagai negara telah meningkatkan permintaan terhadap semikonduktor untuk pusat data dan perangkat elektronik canggih. Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi China yang memiliki basis manufaktur teknologi yang besar.

Meski demikian, sejumlah indikator mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Data aktivitas manufaktur China pada Mei memperlihatkan pesanan ekspor baru turun tajam setelah mencapai level tertinggi dalam dua tahun pada April lalu.

Kinerja ekspor yang kuat turut membantu ekonomi China tumbuh lebih baik dari perkiraan pada kuartal pertama tahun ini. Namun, lemahnya permintaan domestik masih menjadi perhatian utama karena membuat ekonomi China rentan terhadap pelemahan ekonomi global.

Tekanan internasional terhadap Beijing juga semakin meningkat. Sejumlah negara menilai model pertumbuhan China yang bertumpu pada ekspor dan subsidi industri telah menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan global.

Laporan terbaru dari Organisation for Economic Cooperation and Development bahkan menyebut hampir 60% peningkatan pangsa pasar perusahaan China dapat dijelaskan oleh dukungan subsidi yang mereka terima.

Sementara itu, riset terbaru dari Federal Reserve System menunjukkan surplus perdagangan China terhadap perekonomian global telah melampaui 1% dari PDB dunia, level yang lebih tinggi dibandingkan puncak yang pernah dicapai Jepang maupun Jerman pada akhir abad ke-20.

Pada Mei 2026, surplus perdagangan China tercatat mencapai US\$ 105,43 miliar. Nilai tersebut meningkat dari US\$ 84,8 miliar pada April dan melampaui proyeksi pasar sebesar US\$ 92,1 miliar.

Ekspor Elektronik Malaysia Berpotensi Tembus US\$ 197 Miliar

Selasa, 9 Juni 2026 15:40 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-elektronik-malaysia-berpotensi-tembus-us-197-miliar>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri semikonduktor diperkirakan akan terus menjadi motor penggerak ekspor Malaysia pada tahun ini. Bahkan, ekspor sektor listrik dan elektronik (electrical and electronics/E&E) negara tersebut berpotensi melampaui 800 miliar ringgit Malaysia atau sekitar US\$ 197 miliar.

Presiden Malaysia Semiconductor Industry Association (MSIA), Wong Siew Hai, mengatakan tren pertumbuhan ekspor elektronik Malaysia masih akan berlanjut setelah mencatat kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir.

Data menunjukkan ekspor E&E Malaysia mencapai 711 miliar ringgit pada 2025, meningkat dari 601 miliar ringgit pada tahun sebelumnya. Semikonduktor menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 65% dari total ekspor sektor tersebut.

"Saya tidak melihat pertumbuhan ini melambat. Saya melihat tren ini akan terus berlanjut. Bahkan, angkanya bisa lebih tinggi tahun ini," ujar Wong dalam wawancara dengan Bloomberg TV.

Optimisme tersebut muncul di tengah berbagai tantangan global yang masih membayangi industri cip. Salah satunya adalah kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga helium menyusul konflik di Iran. Helium merupakan salah satu bahan penting yang digunakan dalam proses manufaktur semikonduktor.

Meski demikian, Wong menegaskan hingga saat ini operasional industri cip Malaysia belum mengalami gangguan. Menurutnya, perusahaan-perusahaan semikonduktor di negara itu masih mampu menjaga kinerja di tengah ketegangan geopolitik, tekanan tarif perdagangan global, serta penguatan nilai tukar ringgit.

Wong menilai Malaysia sedang berada pada momentum penting untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok semikonduktor global. Ia menyebut peluang yang dihadapi saat ini sebagai kesempatan yang hanya datang sekali dalam satu generasi.

Sebagai salah satu pusat manufaktur cip di Asia Tenggara, Malaysia dinilai memiliki posisi strategis karena dapat melayani kebutuhan pasar Amerika Serikat maupun China. Keunggulan tersebut menjadi modal bagi negara itu untuk naik ke segmen industri semikonduktor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Selain itu, Malaysia juga berupaya menarik lebih banyak investasi dari Jepang untuk memperkuat ekosistem industri cip domestik dan menutup sejumlah celah dalam rantai pasok semikonduktor nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jepang selama tiga hari. Kunjungan itu diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dan investasi baru, termasuk di sektor teknologi dan semikonduktor.

Dengan permintaan cip global yang masih kuat, terutama untuk kebutuhan kecerdasan buatan (AI), pusat data, dan kendaraan listrik, prospek ekspor elektronik Malaysia diperkirakan tetap cerah dalam beberapa tahun ke depan.

The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Sepanjang 2026, Inflasi Masih Jadi Tantangan

Selasa, 9 Juni 2026 18:15 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/the-fed-diprediksi-tahan-suku-bunga-sepanjang-2026-inflasi-masih-jadi-tantangan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mayoritas ekonom memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), akan mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran saat ini hingga akhir 2026. Pandangan tersebut menguat seiring tekanan inflasi yang dipicu konflik geopolitik dinilai lebih persisten dari perkiraan sebelumnya.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters yang dilakukan pada 4–9 Juni terhadap 102 ekonom, sekitar 70% responden atau 72 ekonom memperkirakan suku bunga acuan The Fed akan tetap berada di kisaran 3,50%–3,75% sepanjang tahun depan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan survei bulan sebelumnya yang hanya menunjukkan kurang dari separuh responden memiliki pandangan serupa.

Bahkan, pasar kontrak berjangka suku bunga kini mulai memperhitungkan kemungkinan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga pada akhir 2026. Laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat untuk Mei yang lebih kuat dari ekspektasi pada Jumat lalu juga memperkecil peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.

Saat ini, inflasi di Amerika Serikat tercatat hampir dua kali lipat dari target The Fed sebesar 2%. Di sisi lain, aktivitas ekonomi masih relatif stabil sehingga tidak memberikan tekanan bagi bank sentral untuk segera melonggarkan kebijakan moneter.

Sejumlah anggota Federal Open Market Committee (FOMC) bahkan telah membuka peluang perlunya kenaikan suku bunga pada akhir tahun apabila tekanan inflasi terus berlanjut.

Ketua Baru The Fed Hadapi Tantangan

Survei Reuters juga menunjukkan tidak ada ekonom yang memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan FOMC 16–17 Juni mendatang, yang menjadi rapat pertama di bawah kepemimpinan Ketua The Fed Kevin Warsh.

Kepala Ekonom Wells Fargo, Tom Porcelli, menilai ruang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga sangat terbatas dalam kondisi saat ini.

Ia mengatakan, "Akan sangat sulit bagi The Fed untuk membenarkan tindakan apa pun pada saat ini maupun dalam waktu yang dapat diperkirakan. Akan sangat sulit mendapatkan konsensus dari para pejabat The Fed untuk menyetujui gagasan pemangkasan suku bunga."

Menurut Porcelli, satu-satunya kondisi yang dapat membuka peluang tersebut adalah apabila konflik di Iran segera mereda.

"Satu-satunya cara hal itu bisa terjadi adalah jika kita menemukan jalan keluar dari konflik Iran dalam waktu yang sangat dekat. Namun, saat ini tidak ada indikasi bahwa kita sedang menuju ke arah tersebut," ujarnya.

Hasil survei ini mengindikasikan bahwa Warsh, yang dinominasikan Presiden Donald Trump dan berada di bawah tekanan untuk menurunkan suku bunga, kemungkinan akan kesulitan memperoleh dukungan internal untuk kebijakan tersebut.

Banyak ekonom juga memperkirakan The Fed akan menghapus bias pelonggaran kebijakan dari pernyataan resminya bulan ini.

Mayoritas analis telah menggeser ekspektasi pemangkasan suku bunga ke tahun depan atau bahkan menghapus proyeksi tersebut sama sekali. Hanya sebagian kecil yang memperkirakan langkah kebijakan berikutnya justru berupa kenaikan suku bunga.

Sejumlah ekonom juga memperkirakan pembaruan proyeksi kuartalan atau "dot plot" The Fed akan menunjukkan suku bunga tetap stabil sepanjang tahun ini, dengan sebagian kecil mulai mengindikasikan kemungkinan kenaikan, berbeda dengan proyeksi Maret lalu yang masih memperkirakan satu kali penurunan suku bunga.

Senior Strategist Rabobank untuk Amerika Serikat, Philip Marey, mengatakan, "Risiko kini lebih mengarah pada inflasi yang lebih persisten, pemangkasan suku bunga yang lebih sedikit, bahkan kemungkinan kenaikan suku bunga, dibandingkan penyelesaian cepat atas situasi yang ada. Skenario yang lebih optimistis praktis sudah sirna."

Tekanan Inflasi Masih Membayangi

Survei Reuters terpisah menunjukkan inflasi harga konsumen di Amerika Serikat diperkirakan naik menjadi 4,2% pada bulan lalu, level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan meningkat menjadi 2,9%.

Di sisi lain, indikator inflasi pilihan The Fed, yakni Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, tercatat naik menjadi 3,8% secara tahunan pada April, tertinggi sejak Mei 2023. Indikator tersebut diproyeksikan rata-rata berada di level 3,9% pada kuartal II, 3,8% pada kuartal III, dan 3,6% pada kuartal IV tahun ini.

Pada bulan lalu, sebagian besar ekonom masih menilai tekanan inflasi saat ini yang terutama dipicu lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah bersifat sementara.

Namun pengalaman pada 2022 menunjukkan penilaian serupa ternyata keliru. Saat itu, lonjakan harga yang dipicu antara lain oleh invasi Rusia ke Ukraina justru bertahan lebih lama dan memaksa bank-bank sentral menjalankan salah satu siklus kenaikan suku bunga paling agresif dalam beberapa dekade.

Ekonom AS TD Securities, Eli Nir, mengatakan, "Guncangan pasokan seharusnya hanya terjadi sekali dan bersifat sementara. Namun jika guncangan itu datang secara beruntun, hal tersebut dapat mengubah ekspektasi inflasi dengan cara yang sebelumnya tidak kita perkirakan."

Ia menambahkan, "Mereka khawatir guncangan pasokan berubah menjadi tekanan yang lebih persisten karena pada 2022 mereka salah memperkirakannya. Saat itu, kita semua memang keliru."

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran Amerika Serikat relatif tidak berubah. Tingkat pengangguran diperkirakan bertahan di sekitar 4,3% atau sedikit lebih tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan rata-rata sekitar 2% dalam beberapa tahun mendatang.

BI Rate Naik ke 5,5%, Rupiah Menguat Nyaris ke Bawah Rp18.000/US\$

Selasa, 9 Juni 2026 13:08 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111332/bi-rate-naik-ke-5-5-rupiah-menguat-nyaris-ke-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah berbalik menguat pada sesi perdagangan Selasa (9/6/2026) siang, setelah Bank Indonesia mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan dan memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan.

Volatilitas rupiah hari ini mampu diredam setelah BI kembali mengerek suku bunga acuan BI Rate sebanyak 25 basis poin (bps) menjadi 5,5%. Setelah pengumuman, rupiah menguat 0,2%, lalu penguatan berlanjut sebesar 0,44% ke posisi Rp18.090/US\$ pada 12:54 WIB.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ yang ditetapkan pemerintah," sebut BI dalam keterangannya.

Sesuai Undang-undang dan praktik yang berjalan selama ini, BI setiap hari Selasa mengadakan RDG Mingguan untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG Bulanan.

Dalam evaluasi sejak RDG Bulanan 19-20 Mei 2026, nilai tukar rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan.

Langkah ini ditempuh BI setelah imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga naik. Selama ini SRBI jadi salah satu alat utama bank sentral untuk menarik dana dan menopang nilai tukar. Imbal hasil SRBI juga secara konsisten mengalami kenaikan di seluruh tenor.

Imbal hasil tenor 3 bulan naik dari 6,47% menjadi 6,62%, tenor 6 bulan naik dari 6,69% menjadi 6,87%, sementara tenor 12 bulan melonjak dari 6,94% menjadi 7,24%. Meski begitu, kenaikan imbal hasil tersebut tetap disokong oleh minat investor yang cukup tinggi dengan adanya lonjakan volume transaksi. Misalnya, untuk SRBI tenor 12 bulan volume perdagangan melesat dari Rp405 miliar menjadi hampir Rp7 triliun dalam sehari.

"Kenaikan struktur suku bunga SRBI dimaksud dilakukan sesuai mekanisme pasar dan untuk menjadikan investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif dengan negara lain," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Selasa (9/6/2026).

Purbaya Tekankan Kebijakan Fiskal ke 8 Program Prioritas

Selasa, 9 Juni 2026 14:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111336/purbaya-tekankan-kebijakan-fiskal-ke-8-program-prioritas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kebijakan fiskal pada 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional. Hal itu disampaikan dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Purbaya memerinci delapan klaster program prioritas nasional yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; dan penurunan kemiskinan.

“Sementara pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Purbaya di hadapan DPR RI.

Oleh karena itu, kata Purbaya, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Dia menegaskan pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif guna mendorong kinerja perekonomian sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan.

“Sejalan dengan hal tersebut, postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB, yang ditopang pendapatan negara sebesar 11,82% sampai dengan 12,44% PDB untuk mendukung belanja negara sebesar 13,62% hingga 14,80% PDB,” jelasnya.

Di sisi lain, Purbaya menyebut dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek ke depan, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat,” tuturnya.

Postur Fiskal dan Asumsi Makro 2027

Pemerintah menetapkan sejumlah indikator makro ekonomi utama untuk mengawal ketahanan fiskal, antara lain:

- Kurs rupiah di kisaran Rp16.800/US\$ hingga Rp17.500/US\$
- Suku Bunga SBN Tenor 10 Tahun: Dipatok pada rentang 6,5% hingga 7,3%.
- Defisit APBN 2027: Dijaga ketat di kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% dari PDB, yang lebih rendah dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92%.
- Pendapatan Negara: Target 11,82% hingga 12,40% dari PDB.
- Belanja Negara: Alokasi 13,62% hingga 14,80% dari PDB untuk membiayai program prioritas nasional.
- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mencapai 5,8% hingga 6,5% sebagai batu loncatan menuju target 8% pada 2029.

Di sektor energi, postur fiskal akan ditopang oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran US\$70-US\$95 per barel, target lifting minyak bumi 602.000 hingga 615.000 barel per hari (bpd), serta lifting gas bumi 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.

Purbaya Beber Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi 2027

Selasa, 9 Juni 2026 15:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111353/purbaya-beber-strategi-capai-pertumbuhan-ekonomi-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029.

Oleh karenanya, Purbaya membeberkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Pertama, pemerintah akan mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan.

Kemudian, pemerintah juga akan mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan mendorong peran dana antara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis, sekaligus investasi jangka panjang untuk leverage aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global.

“Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik,” kata Purbaya.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat.

Purbaya juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan melaksanakan program unggulan secara efektif dan berkualitas sehingga memiliki multiplier effect yang kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” katanya.

Purbaya berharap melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Rupiah Ditutup Menguat 0,65%, Hampir di Bawah Rp18.000/US\$

Selasa, 9 Juni 2026 15:08 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111374/rupiah-ditutup-menguat-0-65-hampir-di-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Selasa (9/6/2026) dengan penguatan 0,65% di posisi Rp18.065/US\$, setelah Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5%.

Penguatan rupiah juga mendapat tenaga dari koreksi yang terjadi pada indeks dolar Amerika Serikat (AS) terhadap enam mata uang utama. Indeks dolar AS tercatat menyusut 0,11% ke 99,93, menyusul harga minyak yang kembali jinak ke posisi US\$92,98 per barel, setelah terkoreksi 1,35% pada 14:50 WIB.

Sentimen ini membawa ruang penguatan bagi mata uang kawasan. Won Korea Selatan memimpin di zona hijau, disusul rupiah, ringgit Malaysia, peso Filipina, yuan offshore, yuan China, dolar Singapura, rupee India, baht Thailand dan dolar Hong Kong. Sebaliknya, hanya dolar Taiwan dan yen Jepang yang tercatat melemah sore ini.

Upaya Bank Indonesia

Selain tertopang oleh laju penguatan mata uang kawasan, penguatan rupiah sore ini juga didorong oleh langkah agresif BI dalam menjaga nilai tukar rupiah. Kenaikan BI Rate di luar jadwal (offcycle) didorong oleh pelemahan rupiah yang lebih tajam dibandingkan perkiraan sejak Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Mei lalu.

BI menilai, pelemahan tersebut dipicu oleh kombinasi meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri, sentimen penghindaran risiko (risk-off) global yang menguat, serta keluarnya dana investasi portofolio asing dari pasar keuangan domestik.

Selain itu, pengetatan kebijakan ini mencerminkan langkah antisipatif BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah tingginya ketidakpastian global.

Selain menaikkan suku bunga acuan, BI juga sebelumnya telah menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Imbal hasil SRBI tenor 12 bulan naik menjadi 7,25%, demi menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah dan membawa investor kembali masuk ke pasar Indonesia.

Yield SRBI tenor 12 bulan terkerek naik jadi 7,25%, tertinggi sejak Januari 2025. (Bloomberg)

BI juga akan meningkatkan intensitas operasi moneter melalui lelang SRBI dua kali sepekan serta memperkuat intervensi di pasar valuta asing.

Sementara, upaya lainnya ditawarkan BI dalam bentuk 'diskon' biaya swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10%, sehingga biaya investasi bagi investor asing menjadi lebih rendah dan diharapkan dapat mendorong arus masuk modal portofolio.

Salah satu kekhawatiran investor asing adalah risiko rupiah semakin melemah setelah mereka masuk ke pasar keuangan Indonesia. Karena itu, biasanya mereka membeli instrumen lindung nilai ini. Dengan 'diskon' biaya lindung nilai ini, menjadi sinyal kuat bahwa otoritas moneter sangat ingin menarik kembali arus modal masuk ke pasar domestik.

Utang Baru RI 46% dari Target APBN, Purbaya Akui Front Loading

Selasa, 9 Juni 2026 18:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111395/utang-baru-ri-46-dari-target-apbn-purbaya-akui-front-loading>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan front loading di awal tahun ihwal penarikan utang baru atau porsi penerbitan utang tersebut tercatat 46,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp832,2 triliun.

Front loading merupakan kebijakan memupuk persediaan lebih banyak di awal tahun dibandingkan di tengah maupun akhir tahun.

“Sebagian depannya front loading-kan. Ke belakang seperti biasa, sesuai dengan jadwalnya,” kata Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp386 triliun sampai Mei 2026 untuk membiayai APBN.

Purbaya menjelaskan pembiayaan utang sampai lima bulan pertama tahun ini sudah mencapai hampir separuh dari total target pemerintah sepanjang 2026. Tepatnya, porsi penerbitan utang baru tercatat 46,4% dari target APBN yang sebesar Rp832,2 triliun.

"Kemudian, pembiayaan non utang Rp6,5 triliun atau 4,4% dari target yang mencapai Rp143,1 triliun," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta pekan lalu.

Secara terperinci, total pembiayaan anggaran sampai Mei 2025 tercatat Rp379,4 triliun atau 55,1% terhadap total target APBN Rp689,1 triliun. Angkanya meningkat 16,2% dibanding pembiayaan anggaran periode yang sama tahun lalu, yakni Rp326,5 triliun.

"Pembiayaan APBN dikelola secara prudent (hati-hati) dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Terkait pasar surat utang negara, Purbaya menjelaskan bahwa pergerakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tetap stabil di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini tercermin dari yield SBN tenor 10 tahun yang terjaga di level 6,68%.

Kemudian, selisih imbal hasil yield spread SBN terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menjadi acuan atau US Treasury relatif rendah dibanding beberapa negara pasar berkembang. Hal ini menunjukkan risiko Indonesia relatif rendah.

Menkeu Ungkap Strategi Penguatan Pendapatan dalam KEM PPKF 2027

Selasa, 9 Juni 2026 19:20 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111396/menkeu-ungkap-strategi-penguatan-pendapatan-dalam-kem-ppkf-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi penguatan pendapatan dalam rapat tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).

“Pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik,” kata Purbaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan iklim investasi dan kelestarian lingkungan.

Komitmen ini menurut Purbaya diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

“Sementara itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan,” kata Purbaya

Bendahara Negara juga menegaskan, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.

“Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, upaya ini didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,8%-6,5% di APBN 2027 Terlalu Optimistis

Selasa, 9 Juni 2026 20:37 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/target-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-58-65-di-apbn-2027-terlalu-optimistis>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Sarimin menilai asumsi dasar ekonomi makro yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 masih terlalu optimistis dan sulit tercapai, terutama terkait target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Menurut Wijayanto, sejumlah asumsi makro yang digunakan pemerintah berpotensi sulit dicapai mengingat kondisi perekonomian dan pasar keuangan saat ini yang masih dalam tekanan dan ketidakpastian tinggi.

"Asumsi PPKF 2027 terlalu optimistis, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipatok Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, padahal saat ini sudah berada di sekitar Rp 18.100 per dolar AS," ujar Wijayanto kepada Kontan, Selasa (9/6/2026).

Selain nilai tukar, ia juga menilai asumsi imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang berada di kisaran 6,8%-7,3% serta target inflasi 1,5%-3,5% masih tergolong terlalu rendah jika mempertimbangkan berbagai risiko global dan domestik yang masih membayangi perekonomian.

Karena itu, Wijayanto memandang target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8%-6,5% menjadi kurang realistis. "Artinya target pertumbuhan 5,8%-6,5% terlalu optimistis," katanya.

Ia menilai pemerintah sebaiknya menggunakan asumsi makro yang lebih konservatif dalam penyusunan APBN 2027.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjaga kredibilitas target-target fiskal yang ditetapkan.

"Dalam kondisi seperti saat ini, idealnya pemerintah menggunakan asumsi yang lebih konservatif, lalu fokus pada kualitas pertumbuhan, bukan sekadar nominal pertumbuhan," ungkapnya.

Menurut Wijayanto, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian utama pemerintah agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya beli.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 lebih realistis berada pada kisaran 5,0% hingga 5,4%.

"Menurut hemat saya, target realistis pertumbuhan ekonomi 2027 adalah 5,0%-5,4%," pungkasnya.

Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2027 Maksimal 2,4%, Tax Ratio Naik hingga 10,50%

Selasa, 9 Juni 2026 16:39 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-targetkan-defisit-apbn-2027-maksimal-24-tax-ratio-naik-hingga-1050>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah merancang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 pada kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sejalan dengan itu, pemerintah juga menargetkan rasio pajak (tax ratio) meningkat ke level 10,02% hingga 10,50% terhadap PDB.

Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menjelaskan, rancangan APBN 2027 disusun untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

"Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah merancang defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB," ujar Purbaya dalam rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82% hingga 12,40% terhadap PDB. Sementara itu, tax ratio ditargetkan berada pada rentang 10,02% hingga 10,50% terhadap PDB.

Di sisi belanja, pemerintah memperkirakan belanja negara berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal tahun 2027 akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga akan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Target tersebut ditopang oleh peningkatan investasi yang diproyeksikan tumbuh 6,5% hingga 7,5%, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki modal kuat untuk mencapai target tersebut. Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan (year on year/yoy), menjadi pertumbuhan triwulan pertama tertinggi sejak 2014.

Selain itu, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%, surplus neraca perdagangan telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, dan cadangan devisa mencapai US\$ 144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor.

Untuk mendukung agenda pembangunan nasional, pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal pada delapan klaster prioritas, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Di bidang kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5%, tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,3% hingga 4,87%, serta rasio gini membaik ke level 0,362 hingga 0,367.

Pemerintah optimistis target-target tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

BI Rate Naik Jadi 5,5%, Ekonom: Beban Kelas Menengah Kian Berat

Selasa, 9 Juni 2026 16:06 WIB

Reporter: Selvi Mayasari, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-rate-naik-jadi-55-ekonom-beban-kelas-menengah-kian-berat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,5% dinilai belum cukup kuat mengangkat rupiah keluar dari tekanan. Di sisi lain, kebijakan moneter agresif tersebut justru berpotensi menambah beban kelas menengah dan menekan konsumsi domestik.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai persoalan rupiah saat ini bukan semata karena selisih suku bunga, melainkan menyangkut kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Masalah rupiah hari ini bukan sekadar soal kurang menariknya imbal hasil aset rupiah. Masalahnya lebih dalam, yakni turunnya kepercayaan pasar terhadap kesinambungan fiskal, meningkatnya kebutuhan valuta asing, tekanan harga energi global, serta kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional,” ujar Achmad dalam jawaban tertulis, Selasa (9/6/2026).

Seperti diketahui, pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Sebelumnya, pada RDG Mei 2026, BI juga telah menaikkan bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu mengubah arah tekanan terhadap rupiah secara signifikan.

Achmad mengatakan, kenaikan bunga memang dapat memberi jeda psikologis terhadap pelemahan rupiah, tetapi belum menyentuh akar persoalan.

“Dalam situasi sekarang, pasar tidak hanya menghitung bunga, tetapi juga risiko,” katanya.

Ia mencontohkan rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp 18.190 per dolar Amerika Serikat (AS), meski kemudian sedikit pulih pasca kenaikan bunga acuan.

Menurut Achmad, kondisi tersebut ibarat menekan rem mobil ketika jalan yang dilalui justru rusak.

“Kebijakan suku bunga dapat dianalogikan sebagai rem mobil. Ketika kendaraan melaju terlalu cepat, rem diperlukan. Namun bila masalahnya adalah jalan berlubang, ban aus, bahan bakar bocor, dan pengemudi memberi sinyal tidak konsisten, menekan rem lebih dalam tidak otomatis membuat perjalanan aman,” jelasnya.

Ia mengatakan, tekanan terhadap rupiah juga diperburuk oleh melebarnya defisit transaksi berjalan serta mulai terkurasnya cadangan devisa.

Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan kuartal I-2026 mencapai US\$ 4 miliar atau 1,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibanding kuartal IV-2025 sebesar US\$ 2,5 miliar.

Sementara itu, posisi cadangan devisa akhir Mei 2026 tercatat turun menjadi US\$ 144,9 miliar dari sebelumnya US\$ 146,2 miliar pada April 2026.

Di sisi lain, inflasi domestik sebenarnya masih relatif terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 3,08% secara tahunan, sementara inflasi inti hanya 2,59%.

Karena itu, Achmad bilang, kenaikan bunga saat ini lebih ditujukan untuk mempertahankan nilai tukar dibanding meredam inflasi.

Namun konsekuensinya, biaya kredit rumah tangga dan dunia usaha akan semakin mahal. Menurutnya, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak.

“Kenaikan bunga tidak terjadi di atas fondasi sosial yang kuat. Ia jatuh di atas kelas menengah yang sudah rapuh,” ujarnya.

Ia memperkirakan, kenaikan bunga 75 basis poin dapat menambah beban bunga KPR rumah tangga dengan sisa pokok Rp 500 juta hingga sekitar Rp 3,75 juta per tahun.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, kenaikan BI Rate juga berisiko memperbesar beban fiskal pemerintah karena biaya penerbitan surat utang menjadi lebih mahal.

Menurut Achmad, pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyerahkan stabilisasi rupiah kepada Bank Indonesia semata.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal, menjaga independensi BI, serta melindungi daya beli kelas menengah agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam.

“Rupiah tidak akan kuat hanya karena bunga naik. Rupiah akan kuat bila pasar percaya bahwa APBN terkendali, bank sentral independen, kebijakan ekspor jelas, subsidi dikelola hati-hati, dan pertumbuhan dibangun dari sektor riil,” tutupnya.

Pemerintah Pusat Pacu Jateng Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pembangunan Strategis Dikebut

Selasa, 9 Juni 2026 14:37 WIB

Adityo Dwi Riyantoto, Editor : Baskoro Septiadi

<https://radarsemarang.jawapos.com/amp/jateng/2606090028/pemerintah-pusat-pacu-jateng-jadi-penggerak-pertumbuhan-ekonomi-nasional-pembangunan-strategis-dikebut>

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepakat mempercepat pembangunan strategis di berbagai sektor untuk mengembalikan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional sekaligus "jangkar Nusantara".

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).

Menurut Rachmat, Jawa Tengah memiliki posisi historis dan strategis yang sangat penting dalam perjalanan bangsa. Karena itu, provinsi ini perlu kembali didorong menjadi salah satu penopang utama kemajuan Indonesia.

"Saya merasa Jawa Tengah ini penting sekali. Jangkar Indonesia itu sebenarnya Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga banyak terjadi di Jawa Tengah," kata Rachmat.

Ia menilai Jawa Tengah memiliki modal besar untuk menjadi penggerak pembangunan nasional, mulai dari kekuatan sejarah, sektor pertanian, industri, hingga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat juga meminta paparan langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi mengenai berbagai persoalan mendasar dan potensi pembangunan di Jawa Tengah.

Dari hasil diskusi itu, ia melihat Jawa Tengah memiliki keunggulan berupa tenaga kerja yang ulet, produktif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ekonomi.

Menurutnya, potensi tersebut harus didukung dengan pembangunan yang lebih merata hingga ke desa-desa dan kawasan tertinggal.

"Dari penjelasan Gubernur, saya semakin menyadari bahwa pembangunan yang harus dilakukan bukan dari Jakarta, bukan dari Semarang, tetapi dari desa-desa dan kawasan yang paling tertinggal. Ini sejalan dengan arah pembangunan nasional," ujarnya.

Selain penguatan sumber daya manusia, pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga dry port guna memperkuat konektivitas dan meningkatkan daya saing daerah.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan dukungan dan arahan dari Kementerian PPN/Bappenas menjadi faktor penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Tengah, terutama di kawasan Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada konektivitas jalan, tetapi juga penguatan sektor pertanian melalui peningkatan infrastruktur sumber daya air.

"Dari luasan lahan sekitar 1,5 juta hektare, Jawa Tengah mampu menghasilkan sekitar 9,5 juta ton gabah pada 2025. Ke depan tantangan kita adalah musim kemarau yang semakin panjang, sehingga kami meminta dukungan agar embung-embung yang ada dapat dimaksimalkan," kata Luthfi.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.

Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Jawa Tengah, sekaligus upaya mengembalikan peran strategis provinsi ini sebagai salah satu jangkar pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. (*)

Pertumbuhan Ekonomi Jateng dan Kinerja Swasembada Pangan Dibawah Kepemimpinan Ahmad Luthfi Tuai Pujian

Selasa, 9 Juni 2026 20:26

Agus Hermanto

https://www.rmoljawatengah.id/pertumbuhan-ekonomi-jateng-dan-kinerja-swasembada-pangan-dibawah-kepemimpinan-ahmad-luthfi-tuai-pujian#google_vignette

Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor" belum lama ini berlangsung di Jakarta. Dalam acara itu mengemuka sejumlah hal menarik, diantaranya capaian Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi yang dinilai berhasil dalam meraih pertumbuhan ekonomi dan berkinerja baik menjalankan program swasembada pangan. Berita Jawa Tengah

Capaian Jawa Tengah itu menuai pujian berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi.

Frederica Widyasari menyebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memiliki program swasembada pangan yang disusun berdasarkan pemetaan potensi daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program yang tepat, sehingga capaian program menggembirakan.

"Pak Luthfi punya program padi dan jagung (swasembada pangan) yang mendukung ketahanan pangan nasional," kata Frederica dalam konferensi yang dilaksanakan di Balai Kartini Grand Ballroom Jakarta, Senin 25 Mei 2026.

Menurut Frederica menyampaikan, strategi yang dijalankan wujud komitmen kuat memajukan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karenanya, OJK juga mendorong sektor jasa keuangan ikut serta menukung program yang telah dijalankan di daerah.

Capaian produksi padi di Jawa Tengah hingga April 2026 pun tergolong tinggi. Per Triwulan I 2026 telah mencapai 4.696.422 ton atau sekitar 44,48 persen dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton. Sementara berdasarkan data BPS, prognosa padi Jateng periode Januari - Juni 2026 sebesar 5.674.991 ton GKG. Angka ini menduduki peringkat 2 setelah Jawa Timur. Berita Jawa Tengah

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya yang untuk menggejot produktifitas. Sebab, di 2026 ini, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding pada 2025. Untuk mengatasinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah diinstruksikan untuk menjamin ketersediaan air.

Langkah berikutnya adalah menyiapkan petani milenial. Caranya, dengan melatih petani-petani muda melalui Program Kecamatan Berdaya. Langkah itu dilakukan dengan cara berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

Selain itu, papar Luthfi, Pemprov Jateng juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk.

Keberhasilan program swasembada pangan secara tidak langsung turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang berkontribusi pula pada pertumbuhan ekonomi di level nasional.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I - 2026 sebesar 5,89%. Angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%.Berita Jawa Tengah

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto pun memberikan pujian atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sebab, pertumbuhan ekonomi Jateng di atas nasional.

"Kalau daerah (pertumbuhan ekonomi) di bawah nasional, akan jadi bandul (memperberat)," ujarnya.

Dalam acara itu, Gubernur Ahmad Luthfi ditunjuk OJK menjadi salah satu narasumber dan memaparkan hasil kerjanya di bidang swasembada pangan.

Inflasi IHK China Tertahan di Tengah Lonjakan Harga Pabrik

Rabu, 10 Juni 2026 11:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111456/inflasi-ihk-china-tertahan-di-tengah-lonjakan-harga-pabrik/2>

Bloomberg, Laju inflasi konsumen di China secara tak terduga mandek pada bulan Mei. Di sisi lain, harga-harga di tingkat produsen justru melonjak dengan kecepatan tertinggi dalam hampir empat tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh lonjakan harga komoditas global yang mulai membawa ekonomi terbesar kedua di dunia ini mendekati akhir dari rekor deflasi panjangnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional (NBS) China pada hari Rabu (10/6), Indeks Harga Konsumen (IHK) tumbuh 1,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Laju ini sama persis dengan pencapaian bulan sebelumnya, namun meleset dari estimasi median para ekonom dalam survei Bloomberg yang memproyeksikan angka 1,3%. Kemerosotan harga daging babi hingga 16% menjadi penahan utama dengan menyumbang kontraksi 0,3 poin persentase pada IHK.

Sebaliknya, inflasi di tingkat produsen atau Producer Price Index (PPI) melesat menjadi 3,9% (yoy), selaras dengan perkiraan pasar dan naik signifikan dari posisi April sebesar 2,8%. Sementara itu, IHK inti—yang menyisihkan komponen bergejolak seperti bahan makanan dan energi—turut mengejutkan pasar karena tumbuh lebih lambat di angka 1,1%, turun dari capaian April sebesar 1,2%.

Setelah perilisan data tersebut, nilai tukar mata uang yuan China langsung menghapus keuntungan yang sempat diraih terhadap dolar AS dalam perdagangan domestik. Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun terpantau bergerak stabil di kisaran level 1,7%.

"Akselerasi elektrifikasi, integrasi mendalam kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di berbagai sektor, serta meningkatnya permintaan terhadap daya komputasi telah mendongkrak harga di industri-industri seperti logam non-besi, mesin listrik, dan komputer," jelas ahli statistik NBS, Dong Lijuan, dalam pernyataan resmi yang menyertai rilis data tersebut.

Demam teknologi AI global saat ini memang mulai merembet ke sektor harga karena melonjaknya permintaan pasar terhadap barang elektronik asal China, mulai dari komponen cip hingga papan sirkuit cetak. Volume ekspor China melompat lebih dari 19% (yoy) pada bulan Mei—rekor tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Lompatan ini sebagian besar didorong oleh siklus investasi global yang menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk pembangunan pusat data berskala besar di Amerika Serikat.

Selain itu, reli harga komoditas seperti aluminium dan tembaga ikut mengerek naik harga jual pabrik. Sektor logam non-besi mendapatkan berkah besar berkat tingginya permintaan bahan baku untuk menopang infrastruktur teknologi AI.

Di sisi lain, krisis energi global yang dipicu oleh perang di Iran turut membangkitkan kembali tekanan inflasi di China. Meski demikian, pabrik-pabrik yang langsung berhadapan dengan konsumen akhir masih terseok-seok untuk meneruskan beban kenaikan biaya bahan baku ini kepada pembeli. Lemahnya permintaan domestik selama bertahun-tahun serta masalah kelebihan pasokan telah menciptakan persaingan ketat di antara perusahaan industri China, yang pada akhirnya menahan laju pemulihan inflasi.

Bloomberg Economics memprediksi bahwa deflator PDB—sebuah indikator makro yang mengukur perubahan harga di seluruh lini perekonomian—berpotensi mengakhiri tren penurunan yang telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut pada kuartal ini.

India Bebaskan Pajak Obligasi Asing, Investor Luar Negeri Langsung Serbu Pasar

Rabu, 10 Juni 2026 15:07 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/india-bebaskan-pajak-obligasi-asing-investor-luar-negeri-langsung-serbu-pasar>

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Pemerintah India memutuskan untuk membebaskan investor asing dari pajak atas obligasi pemerintah serta memperluas akses ke pasar surat utang. Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan daya tarik India bagi investor luar negeri, mendorong aliran modal baru, dan memperkuat peluang masuk negara tersebut ke indeks global.

Langkah-langkah kebijakan diumumkan pada Jumat lalu sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak yang menekan nilai tukar dan neraca eksternal India. Pemerintah menghapus pajak pemotongan (withholding tax) dan pajak keuntungan modal (capital gains tax) bagi investasi asing di obligasi pemerintah.

Selain itu, akses terhadap berbagai surat utang kini lebih luas tanpa batasan investasi, serta diperkenalkan insentif bagi bank untuk menghimpun simpanan valas dari warga India non-residen dan bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman luar negeri.

“Perubahan ini benar-benar menjadi game-changer untuk aliran dana asing,” kata Jennifer Taylor, kepala Emerging Market Debt dan Systematic Fixed Income di State Street Investment Management, yang mengelola sekitar US\$ 5,6 triliun aset.

Sejak kebijakan diumumkan, laju aliran modal asing meningkat signifikan, dengan pembelian obligasi pemerintah senilai lebih dari US\$ 1 miliar hanya dalam tiga sesi perdagangan. Sebelumnya, sepanjang tahun berjalan, pembelian hanya mencapai US\$ 1,6 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah turun 10–30 basis poin di seluruh kurva, dengan penurunan terbesar pada tenor pendek.

Taylor menilai penghapusan pajak membuat obligasi pemerintah India lebih menarik secara relatif, dan mendorong partisipasi investor asing di seluruh kurva imbal hasil, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya pinjaman pemerintah.

Beberapa investor menekankan bahwa reformasi ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar dengan membuka jalan bagi obligasi India masuk ke indeks global, seperti Bloomberg Global Aggregate Index. Hal ini akan membawa aliran modal yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Niel Clement, manajer portofolio di BNP Paribas Asset Management, menyebut langkah-langkah ini memperluas peluang bagi investor asing, mengarahkan aliran dana ke pasar domestik, dan memperkuat posisi India untuk masuk ke indeks global. Bloomberg Index Services diperkirakan akan meminta masukan investor bulan ini terkait kemungkinan penambahan obligasi pemerintah India ke indeks utamanya.

Meski demikian, para investor memperingatkan bahwa prospek aliran modal asing tetap bergantung pada stabilitas rupee. “Masalah utama bagi investor luar negeri tetap pada mata uang,” kata Rong-Ren Goh, kepala makro dan tematik Asia Fixed Income di Eastspring Investments. Pelemahan rupee telah menurunkan daya tarik obligasi India, meski setelah penghapusan pajak obligasi, nilai tukar mendapat sedikit pelepasan dan terakhir berada di 95,16 per dolar AS.

Ekonom Citi merevisi perkiraan neraca pembayaran India secara signifikan, dari defisit US\$ 60 miliar menjadi surplus US\$ 5 miliar, yang diharapkan dapat mendukung stabilitas rupee. Namun, volatilitas suku bunga global dan tekanan inflasi akibat harga energi masih menjadi tantangan bagi pasar obligasi.

Investor menilai, dengan langkah-langkah baru ini, India menunjukkan pendekatan konstruktif untuk memperluas akses pasar dan mendorong aliran modal asing dalam jangka panjang.

Defisit Dagang AS Menyusut Imbas Lonjakan Ekspor Minyak

Rabu, 10 Juni 2026 05:00 WIB

Mark Niquette- Bloomberg News

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111410/defisit-dagang-as-menyusut-imbaskan-lonjakan-ekspor-minyak/2>

Bloomberg, Defisit perdagangan Amerika Serikat menyempit pada April seiring lonjakan ekspor minyak membantu menutupi kenaikan impor peralatan untuk pembangunan pusat data.

Kesenjangan perdagangan barang dan jasa menyusut 1,2% dibanding bulan sebelumnya menjadi US\$55,9 miliar, menurut data Departemen Perdagangan AS pada Selasa. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibanding median estimasi ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan defisit US\$56,1 miliar.

Nilai ekspor meningkat 2,6% pada April dibanding bulan sebelumnya, didorong lonjakan 60% ekspor minyak mentah serta kenaikan pengiriman fuel oil dan produk minyak bumi lainnya. Sementara itu, impor naik 2%, dipimpin oleh komputer dan semikonduktor.

Perang Iran dan penutupan efektif Selat Hormuz menekan arus pasokan minyak di kawasan, sehingga mendorong harga lebih tinggi. Produsen AS berupaya mengisi kekurangan pasokan tersebut. Pada April, AS mencatat volume ekspor minyak tertinggi sepanjang sejarah, menurut data US Energy Information Administration, sementara pengiriman bensin, diesel, dan bahan bakar jet juga melonjak.

Keuntungan besar yang diraih produsen AS dari kenaikan harga minyak membantu mengimbangi lonjakan impor barang modal terkait pembangunan pusat data di AS. Impor komputer, aksesoris komputer, peralatan telekomunikasi, dan semikonduktor melonjak 83% pada April dibanding setahun sebelumnya.

Perang juga menambah volatilitas perdagangan bulanan setelah perubahan kebijakan tarif yang terus berganti sepanjang 2025 di bawah Presiden AS Donald Trump. Banyak tarif tersebut dibatalkan Mahkamah Agung AS pada Februari, tetapi pemerintahan Trump kemudian mengusulkan tarif baru minimal 10% terhadap impor dari 60 mitra dagang.

Survei terbaru para purchasing manager menunjukkan perusahaan-perusahaan AS mulai menimbun barang untuk mengantisipasi kenaikan harga terkait perang. Fenomena itu mengulang lonjakan impor tahun lalu menjelang penerapan tarif "Liberation Day" Trump.

Ekonom Bloomberg Troy Durie mengatakan pertumbuhan impor April terkonsentrasi pada produk terkait AI, menandakan ekspansi pembangunan infrastruktur AI masih berlangsung kuat. Di sisi lain, ekspor meningkat karena lonjakan pengiriman produk minyak bumi untuk menutupi kekurangan pasokan global akibat penutupan Selat Hormuz.

Laporan tersebut juga akan menjadi bahan dalam negosiasi lanjutan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada yang diperkirakan melewati tenggat perpanjangan 1 Juli. Defisit perdagangan barang AS dengan Meksiko menyempit seiring ekspor ke negara itu mencapai rekor tertinggi, sementara defisit dengan Kanada justru melebar.

Sementara itu, defisit perdagangan barang AS dengan China menyempit. Sebaliknya, defisit dengan Vietnam, salah satu negara yang paling diuntungkan dari pergeseran rantai pasok sejak ketegangan dagang AS-China pada masa jabatan pertama Trump melebar.

Ekspor jasa perjalanan, atau belanja wisatawan asing di AS, turun pada April ke level terendah dalam lebih dari dua tahun, sehingga menekan total ekspor jasa.

Setelah disesuaikan dengan inflasi, defisit perdagangan barang AS menyempit menjadi US\$84,3 miliar pada April. Laporan Selasa juga mencakup revisi tahunan terhadap data statistik perdagangan AS.

Inflasi Produsen China Sentuh Level Tertinggi Hampir 4 Tahun pada Mei 2026

Rabu, 10 Juni 2026 09:00 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-produsen-china-sentuh-level-tertinggi-hampir-4-tahun-pada-mei-2026>

KONTAN.CO.ID - Inflasi produsen di China terus meningkat pada Mei 2026 dan mencapai level tertinggi dalam hampir empat tahun terakhir.

Kenaikan tersebut mencerminkan masih kuatnya tekanan biaya akibat tingginya harga energi global di tengah ketegangan geopolitik yang berlangsung.

Melansir Reuters, Data Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China yang dirilis Rabu (10/6/2026) menunjukkan, indeks harga produsen atau Producer Price Index (PPI) naik 3,9% secara tahunan (year on year/YoY) pada Mei 2026.

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,8% pada April dan melampaui perkiraan ekonom dalam survei Reuters yang memproyeksikan kenaikan sebesar 3,8%.

Kenaikan ini juga menjadi yang tertinggi sejak Juli 2022, menandakan tekanan biaya di sektor manufaktur masih terus meningkat.

Sementara itu, indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) China naik 1,2% secara tahunan pada Mei 2026.

Angka tersebut sama dengan capaian bulan sebelumnya, namun sedikit di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 1,3%.

Secara bulanan, CPI tercatat turun 0,1%, sejalan dengan perkiraan analis. Kondisi ini berbalik dibandingkan April yang mencatat kenaikan 0,3% secara bulanan.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan harga di tingkat produsen semakin kuat akibat lonjakan biaya energi, permintaan konsumen domestik masih relatif moderat sehingga laju inflasi konsumen belum mengalami percepatan signifikan.

Perkembangan inflasi di China menjadi perhatian pelaku pasar global mengingat negara tersebut merupakan konsumen energi terbesar dunia sekaligus pusat manufaktur utama yang memasok berbagai produk ke pasar internasional.

Kenaikan harga produsen yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan biaya produksi berbagai sektor industri dan pada akhirnya dapat diteruskan ke konsumen apabila tekanan biaya terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Dolar AS Menguat Tipis Rabu (10/6), Konflik Timur Tengah Kembali Jadi Sorotan

Rabu, 10 Juni 2026 08:08 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-menguat-tipis-rabu-106-konflik-timur-tengah-kembali-jadi-sorotan>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak stabil terhadap mayoritas mata uang utama dunia pada perdagangan Rabu (10/6/2026), setelah Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran.

Pelaku pasar juga menanti rilis data inflasi AS yang dinilai krusial dalam menentukan arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed).

Militer AS pada Selasa (9/6/2026) melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Teheran telah menembak jatuh helikopter Apache milik AS di Selat Hormuz.

Insiden tersebut menambah ketidakpastian terhadap prospek perdamaian kedua negara dan berpotensi mengganggu gencatan senjata yang masih rapuh.

Meski demikian, Trump berupaya meredam kekhawatiran pasar dengan menyebut insiden tersebut bukan masalah besar dan memastikan pilot helikopter dalam kondisi selamat.

Ekonom Commonwealth Bank of Australia Harry Ottley menilai, konflik AS-Iran secara keseluruhan masih mengarah pada jalur deeskalasi meskipun sempat terjadi pelanggaran gencatan senjata dalam beberapa hari terakhir.

Melansir Reuters, Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang utama tercatat naik tipis 0,01% ke level 100,02.

Sementara itu, euro melemah 0,05% ke posisi US\$ 1,1537 dan poundsterling turun 0,04% menjadi US\$ 1,337 per dolar AS.

Status AS sebagai produsen energi utama dinilai membuat ekonominya relatif lebih tahan terhadap gejolak harga minyak dibandingkan negara-negara lain.

Kondisi ini mendorong permintaan aset safe haven berupa dolar AS di tengah konflik Iran, sekaligus menekan mata uang seperti euro dan yen Jepang.

Di Jepang, pasar kini hampir sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BOJ) pada pertemuan kebijakan 16 Juni mendatang. Namun, analis menilai langkah tersebut belum tentu cukup untuk memperkuat yen secara signifikan.

Analisis pasar IG Tony Sycamore mengatakan, penguatan yen akan lebih bergantung pada sinyal kebijakan yang lebih agresif dari Gubernur BOJ Kazuo Ueda terkait percepatan kenaikan suku bunga berikutnya.

Tanpa sinyal tersebut, pemerintah Jepang diperkirakan masih harus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang mata uangnya.

Yen Jepang tercatat melemah tipis 0,03% ke level 160,38 per dolar AS, masih berada di sekitar level 160 yang selama ini dianggap sebagai batas psikologis yang berpotensi memicu intervensi otoritas Jepang.

Pada hari yang sama, data menunjukkan harga grosir Jepang naik 6,3% secara tahunan pada Mei 2026, lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan mencerminkan meningkatnya tekanan inflasi akibat konflik di Timur Tengah.

Fokus pasar kini tertuju pada data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS bulan Mei yang akan dirilis kemudian hari.

Data tersebut dinilai penting untuk mengukur apakah tekanan inflasi akibat tingginya harga energi semakin meluas dan berpotensi mendorong The Fed kembali menaikkan suku bunga.

Analisis senior Mitsubishi UFJ Bank Akihiko Yokoo mengatakan, apabila data inflasi menunjukkan tekanan harga yang semakin kuat, dolar AS berpotensi memperoleh tambahan dukungan dari pasar.

Selain data inflasi AS, investor juga menantikan pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis (11/6), yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Di pasar mata uang lainnya, dolar Australia melemah 0,1% ke level US\$ 0,7021, sedangkan dolar Selandia Baru turun 0,17% ke posisi US\$ 0,5812.

Inflasi Produsen Jepang Naik 6,3%, Imbas Kejutan Energi Akibat Konflik Timur Tengah

Rabu, 10 Juni 2026 07:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-produsen-jepang-naik-63-imb-kejut-an-energi-akibat-konflik-timur-tengah>

KONTAN.CO.ID - Tren kenaikan harga di tingkat grosir (wholesale prices) Jepang terus memperpanjang lonjakannya secara signifikan sepanjang tahun hingga bulan Mei.

Melansir Reuters, data resmi pemerintah yang dirilis pada Rabu (10/6/2026) pagi menunjukkan bahwa angka inflasi produsen melesat di luar dugaan, sekaligus mengonfirmasi adanya tekanan biaya logistik dan energi yang kian berat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Berdasarkan laporan dari Bank of Japan (BOJ), Indeks Harga Barang Perusahaan (CGPI) yang mengukur pergerakan harga yang dikenakan oleh sesama korporasi atas barang dan jasa mereka melonjak 6,3% secara tahunan (YoY) pada Mei.

Realisasi ini melampaui median proyeksi pasar yang memperkirakan kenaikan di level 5,5%, serta mencatatkan akselerasi dari rapor bulan April yang berada di angka 5,3% setelah direvisi.

Biaya Impor Berbasis Yen Meroket Tajam

Pemicu utama dari memanasnya harga di tingkat hulu ini adalah pembengkakan biaya pengadaan bahan baku dari luar negeri yang harus ditanggung oleh pelaku industri di Jepang.

Kondisi ini diperparah oleh nilai tukar Yen yang terus melemah terhadap mata uang global utama.

Data BOJ mencatat pergerakan indikator biaya impor sebagai berikut:

- Indeks Harga Impor Berbasis Yen (Mei): Melambung tinggi hingga 25,5% secara tahunan.
- Indeks Harga Impor Berbasis Yen (April): Berada di posisi 21,0% (setelah direvisi naik).

Sementara itu, secara bulanan (month-on-month), harga grosir di negeri sakura tersebut tercatat tumbuh sebesar 0,9% pada bulan Mei.

Angka pertumbuhan bulanan ini terpantau melandai jika dibandingkan dengan lonjakan tajam pada bulan April yang sempat menyentuh angka 2,8%.

Kombinasi antara mahalnya harga komoditas energi dunia dan merosotnya daya beli mata uang domestik kini menaruh beban berat di pundak para pelaku usaha di Jepang, yang pada gilirannya berpotensi mengalirkan tekanan inflasi ini langsung ke tingkat konsumen akhir dalam beberapa bulan ke depan.

Penerbitan Surat Utang Terkait AI Naik Dua Kali Lipat, Bisa Capai US\$ 570 Miliar

Rabu, 10 Juni 2026 16:08 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/penerbitan-surat-utang-terkait-ai-naik-dua-kali-lipat-bisa-capai-us-570-miliar>

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Pendanaan untuk kebutuhan bisnis artificial intelligence (AI) makin meningkat. Morgan Stanley memperkirakan penerbitan utang global terkait artificial intelligence (AI) akan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi hampir US\$ 570 miliar pada tahun 2026.

Peningkatan pasokan obligasi dan aktivitas pasar kredit ini karena perusahaan-perusahaan hyperscaler beralih ke sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (capex) besar-besaran yang didorong oleh AI.

Perusahaan teknologi yang telah lama mengandalkan arus kas yang kuat semakin beralih ke pembiayaan utang seiring dengan meningkatnya kebutuhan investasi.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (10/6/2026), Morgan Stanley memperkirakan penerbitan utang global terkait AI mencapai hampir US\$ 236 miliar per 31 Mei 2026, empat kali lipat lebih banyak daripada periode yang sama tahun lalu.

Perusahaan hyperscaler—Alphabet, Amazon, Microsoft, dan Meta—diperkirakan akan mengeluarkan surat utang senilai US\$ 700 miliar tahun ini.

Morgan Stanley memprediksi penerbitan akan meningkat pada paruh kedua tahun 2026, seiring dengan belanja modal (capex) perusahaan hyperscaler yang melampaui US\$ 1 triliun pada tahun 2027.

"Perusahaan hyperscaler telah memperluas basis investor mereka melalui penerbitan non-USD," sebut Morgan Stanley.

"Latar belakang (ekonomi) fundamental tetap kuat, tetapi untuk saat ini kami pikir pergerakan harga (obligasi) sebagian besar didorong oleh ekspektasi pasokan," tambah Morgan Stanley.

Morgan Stanley juga menyebut, pembiayaan untuk perusahaan chip, yang mengalami peningkatan di pasar publik dan swasta, bergeser ke kesepakatan jangka pendek yang sepenuhnya dilunasi dari waktu ke waktu.

Defisit Dagang AS Menyusut Imbas Lonjakan Ekspor Minyak

Rabu, 10 Juni 2026 05:00 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111410/defisit-dagang-as-menyusut-imbaskan-lonjakan-ekspor-minyak/2>

Bloomberg, Defisit perdagangan Amerika Serikat menyempit pada April seiring lonjakan ekspor minyak membantu menutupi kenaikan impor peralatan untuk pembangunan pusat data.

Kesenjangan perdagangan barang dan jasa menyusut 1,2% dibanding bulan sebelumnya menjadi US\$55,9 miliar, menurut data Departemen Perdagangan AS pada Selasa. Angka tersebut sedikit lebih

rendah dibanding median estimasi ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan defisit US\$56,1 miliar.

Nilai ekspor meningkat 2,6% pada April dibanding bulan sebelumnya, didorong lonjakan 60% ekspor minyak mentah serta kenaikan pengiriman fuel oil dan produk minyak bumi lainnya. Sementara itu, impor naik 2%, dipimpin oleh komputer dan semikonduktor.

Perang Iran dan penutupan efektif Selat Hormuz menekan arus pasokan minyak di kawasan, sehingga mendorong harga lebih tinggi. Produsen AS berupaya mengisi kekurangan pasokan tersebut. Pada April, AS mencatat volume ekspor minyak tertinggi sepanjang sejarah, menurut data US Energy Information Administration, sementara pengiriman bensin, diesel, dan bahan bakar jet juga melonjak.

Keuntungan besar yang diraih produsen AS dari kenaikan harga minyak membantu mengimbangi lonjakan impor barang modal terkait pembangunan pusat data di AS. Impor komputer, aksesoris komputer, peralatan telekomunikasi, dan semikonduktor melonjak 83% pada April dibanding setahun sebelumnya.

Perang juga menambah volatilitas perdagangan bulanan setelah perubahan kebijakan tarif yang terus berganti sepanjang 2025 di bawah Presiden AS Donald Trump. Banyak tarif tersebut dibatalkan Mahkamah Agung AS pada Februari, tetapi pemerintahan Trump kemudian mengusulkan tarif baru minimal 10% terhadap impor dari 60 mitra dagang.

Defisit Dagang AS Menyempit pada April

Survei terbaru para purchasing manager menunjukkan perusahaan-perusahaan AS mulai menimbun barang untuk mengantisipasi kenaikan harga terkait perang. Fenomena itu mengulang lonjakan impor tahun lalu menjelang penerapan tarif “Liberation Day” Trump.

Ekonom Bloomberg Troy Durie mengatakan pertumbuhan impor April terkonsentrasi pada produk terkait AI, menandakan ekspansi pembangunan infrastruktur AI masih berlangsung kuat. Di sisi lain, ekspor meningkat karena lonjakan pengiriman produk minyak bumi untuk menutup kekurangan pasokan global akibat penutupan Selat Hormuz.

Laporan tersebut juga akan menjadi bahan dalam negosiasi lanjutan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada yang diperkirakan melewati tenggat perpanjangan 1 Juli. Defisit perdagangan barang AS dengan Meksiko menyempit seiring ekspor ke negara itu mencapai rekor tertinggi, sementara defisit dengan Kanada justru melebar.

Sementara itu, defisit perdagangan barang AS dengan China menyempit. Sebaliknya, defisit dengan Vietnam, salah satu negara yang paling diuntungkan dari pergeseran rantai pasok sejak ketegangan dagang AS-China pada masa jabatan pertama Trump melebar.

Ekspor jasa perjalanan, atau belanja wisatawan asing di AS, turun pada April ke level terendah dalam lebih dari dua tahun, sehingga menekan total ekspor jasa.

Setelah disesuaikan dengan inflasi, defisit perdagangan barang AS menyempit menjadi US\$84,3 miliar pada April. Laporan Selasa juga mencakup revisi tahunan terhadap data statistik perdagangan AS.

Purbaya Beber Strategi Jaga Inflasi pada Tahun Depan

Rabu, 10 Juni 2026 21:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111551/purbaya-beber-strategi-jaga-inflasi-pada-tahun-depan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan mengendalikan inflasi pada tahun depan di rentang 1,5% hingga 3,5%. Hal itu dilakukan dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas, terutama pangan dan energi.

Purbaya menegaskan pemerintah terus mengantisipasi risiko imported inflation melalui koordinasi dengan bank sentral. Di samping itu, sinergi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan otoritas moneter melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan efektivitas pengendalian inflasi.

“Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan laju inflasi pada Mei 2026 tercatat 3,08% secara tahunan (year-on-year/yoy). IHK dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,4 pada Mei 2026.

Angka ini jauh lebih tinggi dibanding proyeksi konsensus yang memperkirakan inflasi Mei 2026 hanya akan mencapai 2,94% (yoy). Angka itu juga lebih tinggi ketimbang realisasi inflasi pada April yang sebesar 2,42%.

Menariknya, kenaikan harga tak lagi hanya terjadi pada komponen pangan, tetapi hampir seluruh kelompok pengeluaran, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan BPS, kelompok makanan dan minuman naik 4,94%, transportasi 2,3%, restoran 2,24%, kesehatan 1,70%, pendidikan 1,15%, hingga perawatan pribadi mencapai 10,35%.

Postur Fiskal dan Asumsi Makro 2027

Selain inflasi, pemerintah menetapkan sejumlah indikator makro ekonomi utama untuk mengawal ketahanan fiskal, antara lain:

- Kurs rupiah di kisaran Rp16.800/US\$ hingga Rp17.500/US\$
- Suku Bunga SBN Tenor 10 Tahun: Dipatok pada rentang 6,5% hingga 7,3%.
- Defisit APBN 2027: Dijaga ketat di kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% dari PDB, yang lebih rendah dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92%.
- Pendapatan Negara: Target 11,82% hingga 12,40% dari PDB.
- Belanja Negara: Alokasi 13,62% hingga 14,80% dari PDB untuk membiayai program prioritas nasional.
- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mencapai 5,8% hingga 6,5% sebagai batu loncatan menuju target 8% pada 2029.

Di sektor energi, postur fiskal akan ditopang oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran US\$70-US\$95 per barel, target lifting minyak bumi 602.000 hingga 615.000 barel per hari (bpd), serta lifting gas bumi 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.

BI Ungkap 7 Jurusan Terbaru Jaga Stabilisasi Rupiah

Rabu, 10 Juni 2026 15:50 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111509/bi-ungkap-7-jurus-terbaru-jaga-stabilisasi-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperbarui kebijakan moneter yang difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) imbas konflik di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).

Sebagai informasi, rupiah membuka perdagangan Rabu (10/6/2026) dengan penguatan 0,79% ke posisi Rp17.918/US\$, melanjutkan penguatan yang terjadi kemarin. Tak lama berselang, apresiasi rupiah berubah menjadi 0,61% ke Rp17.949/US\$ pada 09:12 WIB.

Penguatan rupiah bisa dibaca sebagai respons atas pengetatan moneter yang dilakukan BI. Suku bunga acuan naik 25 bps ke 5,5%.

Berikut 7 kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah:

1. Intervensi dalam jumlah yang besar untuk stabilkan nilai tukar rupiah dari gejolak global seperti di pasar spot tunai yakni Domestic Non-deliverable Forward (DNDF) di dalam negeri maupun off shore Non-deliverable forward (NDF).
“Kami yakinkan bahwa cadangan devisa kita lebih dari cukup, 6 bulan impor, termasuk juga pakai ukuran-ukuran standar internasional,” kata Perry.
2. BI juga telah menyesuaikan kebijakan suku bunga lantaran suku bunga global terus merangkak naik. Walhasil, BI telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada bulan lalu sebesar 50 basis poin (bps) dan teranyar 25 bps, sehingga BI Rate saat ini menjadi 5,5%.
“Untuk inflow dan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi,” jelas Perry.
3. Menarik kembali modal asing atau investasi portofolio, khususnya melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), baik berkaitan dengan struktur suku bunga maupun juga memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai bagi investor asing yang masuk ke dalam negeri.
4. BI juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan khususnya telah mengaktifkan kembali window lelang Repo dengan tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan.
“Sehingga kapan pun, berapa pun bank yang memerlukan likuiditas dengan menggunakan Repo dengan underlying SBN, SRBI maupun yang lain datang bisa datang ke BI,” ujarnya.
Dia menyebut BI akan memenuhi likuiditas perbankan sehingga pertumbuhan uang primer diproyeksikan akan tetap double digit di atas 10%. Adapun pada Maret 2026, pertumbuhan uang primer (M0) yakni 11,8 kemudian pada Mei 2026 menjadi 14,8.
5. BI telah mengurangi transaksi-transaksi yang tanpa underlying dengan batasan pembelian dolar di pasar domestik. BI telah menurunkan threshold kewajiban penyampaian underlying transaksi tunai beli valuta asing (valas) dari US\$50 ribu menjadi US\$25 per pelaku per bulan.
“Sepanjang ada underlying silakan, tapi tentu saja ini untuk mengurangi transaksi-transaksi yang spekulatif,” tuturnya.

6. BI telah melakukan perluasan pasar valas domestik, tidak hanya dolar-rupiah, tetapi juga yuan-rupiah sudah ditransaksikan di dalam negeri. Di sisi lain, local currency transaction (LCT) penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi yuan dengan Indonesia sangat besar pada tahun lalu atau lebih dari US\$25 miliar per tahun.
“Sekarang tahun ini per bulan US\$3,7 miliar bahkan mendekati US\$4 miliar dan ini kami gunakan untuk pengembangan transaksi yuan dan rupiah di dalam negeri yang terhubung dengan Hongkong dan China Daratan.
“Kami juga terus mendukung mendorong penggunaan transaksi currency dengan lokal khususnya juga dengan Indonesia dan Jepang. Yen-rupiah telah banyak juga digunakan,” imbuh Perry.
7. BI terus meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank dan korporasi khususnya transaksi valas bahwa bank yang berasal dari korporasi maupun dari individu harus ada underlying-nya. “Itu kami BI dan OJK melakukan pengawasan secara langsung,” imbuhnya.

Purbaya Targetkan Ekonomi 2027 Tumbuh 6,5%, Begini Siasatnya

Rabu, 10 June 2026 13:45 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111468/purbaya-targetkan-ekonomi-2027-tumbuh-6-5-begini-siasatnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 akan berada di kisaran 5,8%-6,5%. Hal ini merupakan bagian dari jalur untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 sesuai dalam janji Presiden Prabowo Subianto di awal masa kepemimpinannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, untuk mendukung target tersebut, komponen investasi ditargetkan untuk tumbuh mencapai kisaran 6,5% hingga 7,5%, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Hal ini disampaikan Purbaya saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6).

"Arah kebijakan ekonomi dan fiskal 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya, Rabu (10/6/2026).

Strategi tersebut dijalankan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan investasi strategis guna memperkuat transformasi ekonomi nasional.

Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga.

Di saat yang sama, pemerintah akan menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, pemerintah terus menjaga kebijakan fiskal agar responsif dan antisipatif. Berbagai langkah strategis ditempuh antara lain menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Rupiah di Luar Negeri Sudah di bawah Rp18.000/US\$

Rabu, 10 Juni 2026 08:36

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111428/rupiah-di-luar-negeri-sudah-di-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah membuka perdagangan di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) dengan stagnasi dan berada di Rp17.899/US\$, setelah sempat menguat 1,61% pada sesi penutupan.

Tak lama berselang, rupiah di luar negeri kembali melemah 0,45% ke posisi Rp17.974/US\$ pada 07:17 WIB. Pergerakan rupiah di pasar luar negeri juga tertopang oleh langkah Bank Indonesia (BI) yang secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin (bps) ke 5,5%.

Selain itu, indeks dolar AS yang sebelumnya sempat bertengger di level 100,01, kini kembali ke posisi 99,98 meskipun masih berpotensi menguat akibat serangan antara AS dan Iran yang kembali terjadi.

Pasukan AS dikabarkan melakukan penyerangan yang mereka sebut sebagai 'bela diri' terhadap Iran, beberapa jam setelah Presiden Donald Trump menuduh Teheran menembak jatuh sebuah helikopter militer AS di lepas pantai Oman.

Ketegangan yang kembali terjadi membuat harga minyak mentah Brent kembali terkerek naik 1,73% ke US\$93,03 per barel. Kondisi ini membuat sebagian mata uang bergerak melemah.

Di pasar yang sudah buka, baht Thailand melemah 0,27%, disusul ringgit Malaysia 0,19%, lalu dolar Singapura 0,05%, dan yen Jepang 0,04%.

Sebaliknya, won Korea Selatan masih melanjutkan penguatan kemarin sebesar 0,53%, disusul yuan offshore 0,03%.

Naiknya suku bunga acuan sebesar 25 bps di luar jadwal regular memang cukup berhasil memberi sinyal kepada pasar bahwa bank sentral tak akan tinggal diam dalam menghadapi tekanan nilai tukar.

Meski demikian, respons pasar sejauh ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi rupiah tak sekadar berkaitan dengan tingkat suku bunga. Sejak kenaikan suku bunga sebesar 50 bps pada Mei lalu, kinerja rupiah tetap kurang menggembirakan dan merosot 2,6%.

Menurut Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson, kenaikan suku bunga acuan kemarin kemungkinan masih jauh dari cukup untuk membalikkan sentimen negatif pasar dan menstabilkan rupiah.

"Kecuali pemerintah melakukan perubahan kebijakan yang kredibel dan mampu secara signifikan mengurangi risiko investasi yang terakumulasi," kata Henderson dalam catatannya.

Dia memperkirakan BI perlu menaikkan suku bunga sebesar 75 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), yang dijadwalkan pada 18 Juni mendatang, agar dapat secara nyata memperlambat laju depresiasi rupiah.

Pandangan Henderson yang menilai keputusan BI menaikkan suku bunga acuan dapat dibaca sebagai langkah pengobatan pereda gejala, belum menjadi penyelesaian atas sumber 'penyakit' rupiah.

Intervensi di pasar valas dan kenaikan suku bunga memang dapat memperlambat laju depresiasi, akan tetapi tak cukup untuk memulihkan kepercayaan jika pasar masih melihat adanya peningkatan risiko kebijakan.

Faisal Rachman, Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% pada kuartal III-2026. "Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan," kata Faisal.

Lionel Priyadi, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, memproyeksikan BI akan lebih agresif. "Kami memperkirakan Bank Indonesia akan kembali mengumumkan kenaikan suku bunga pada 18 Juni mendatang sebesar 50 basis poin (bps), sehingga BI Rate menjadi 6%," sebut Lionel.

Dengan upaya pengetatan moneter yang telah dilakukan, bagaimana pergerakan rupiah hari ini?

Analisis Teknikal

Secara teknikal, rupiah berpotensi melanjutkan rebound hari ini. Ada peluang menguat ke resistance paling potensial hingga menembus level Rp18.000/US\$, dan juga kembali menuju Rp17.950/US\$.

Jika nantinya nilai rupiah berhasil menguat hingga Rp17.900/US\$, maka ada kemungkinan untuk melanjutkan tren penguatan menembus Rp17.700/US\$.

Sedangkan rupiah memiliki level support psikologis di level Rp18.100/US\$. Apabila level ini berhasil tertembus, maka mengonfirmasi laju support selanjutnya di Rp18.200/US\$.

Arah Kebijakan Fiskal: Dorong Pertumbuhan-Perkuat Kesejahteraan

Rabu, 10 Juni 2026 08:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111415/arah-kebijakan-fiskal-dorong-pertumbuhan-perkuat-kesejahteraan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2027 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Purbaya menyebut kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat," ujar Purbaya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan serta masukan yang diberikan seluruh fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF 2027.

Pemerintah juga menyambut dukungan DPR terhadap target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8%-6,5% sebagai bagian dari upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, serta mengoptimalkan peran Danantara dalam mendukung investasi produktif di sektor strategis.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan perluasan lapangan kerja.

Pemerintah memastikan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat akan terus diperkuat agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat maupun perekonomian nasional.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menargetkan inflasi 2027 berada di kisaran 1,5%-3,5%, dengan asumsi nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,5%-7,3%.

Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) di level US\$70-US\$95 per barel untuk mengantisipasi gejolak pasar energi global sekaligus menjaga APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber.

Sejalan dengan tema pembangunan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, arah kebijakan fiskal 2027 akan difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan serta ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Prioritas pembangunan tersebut akan diperkuat melalui penguatan sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, perluasan basis penerimaan, serta penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sisi belanja, pemerintah menekankan peningkatan kualitas belanja negara agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk lewat penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah juga memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan secara prudent dan inovatif guna menjaga ketahanan fiskal. Defisit APBN 2027 dirancang berada pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap PDB.

Selain itu, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif melalui sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund untuk menopang transformasi ekonomi nasional.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah optimistis APBN 2027 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong transformasi ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keyakinan Konsumen dan Konsumsi Rumah Tangga RI Masih Terjaga

Rabu, 10 Juni 2026 15:07 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111507/keyakinan-konsumen-dan-konsumsi-rumah-tangga-ri-masih-terjaga/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) Mei 2026 menunjukkan sinyal bahwa fundamental konsumsi rumah tangga Indonesia masih cukup kuat, meski kualitas optimismenya mulai menurun.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun menjadi 120 pada periode Mei. Turun dibandingkan posisi April yang sebesar 123.

IKK di atas 100 mengindikasikan bahwa konsumen masih optimistis memandang perekonomian saat ini hingga enam bulan mendatang. Namun, skor IKK pada Mei menjadi yang terendah dalam delapan bulan terakhir.

Ini menjadi gambaran bahwa masyarakat kini mulai merasakan tekanan ekonomi pada pendapatan, pekerjaan, dan kemampuan membeli barang-barang bernilai besar.

Meski begitu, ekspektasi enam bulan ke depan masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya kondisi akan membaik.

Kenaikan ekspektasi tersebut ditopang oleh ekspektasi lapangan kerja naik menjadi 128,1, ekspektasi kegiatan usaha naik menjadi 124,5.

Artinya, masyarakat masih percaya bahwa perusahaan akan kembali berekspansi, peluang kerja akan membaik dan aktivitas bisnis akan meningkat dalam enam bulan ke depan.

Optimisme tersebut juga didukung oleh belanja pemerintah yang tetap berjalan, proyek-proyek infrastruktur yang masih berlanjut, serta kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil.

Akan tetapi, optimisme ini juga mulai kehilangan kekuatannya karena ekspektasi penghasilan justru turun tipis dari 136,9 menjadi 136,5.

Dari laporan IKK juga terlihat bahwa tabungan konsumen mulai menurun. Rasio tabungan (saving ratio) tercatat turun menjadi 17,5% pada Mei, dari posisi April sebesar 18,2%.

Di saat yang sama, rasio cicilan meningkat menjadi 10,2% dari sebelumnya 9,7%. Meski begitu, konsumsi tetap terjaga di level 72,3%, dari posisi sebelumnya 72,1%.

Angka konsumsi yang masih terjaga mengindikasikan bahwa rumah tangga tetap mempertahankan konsumsinya, meski harus mengorbankan tabungan dan menambah beban cicilan. Secara makro, pola ini terjadi jika pendapatan tidak tumbuh secepat kebutuhan pengeluaran.

Menurut Samuel Sekuritas, data IKK ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik sedang memasuki fase normalisasi, bukan akselerasi.

Selain itu, hasil survei konsumen edisi Mei ini juga menunjukkan bahwa tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan masih relatif terkendali, meskipun inflasi umum (headline inflation) belakangan meningkat.

“Kondisi ini memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan sikap kebijakan moneternya saat ini sambil tetap memfokuskan perhatian pada stabilitas nilai tukar rupiah,” sebut Samuel Sekuritas dalam catatannya.

Samuel Sekuritas memperkirakan, risiko penurunan sentimen yang lebih tajam berpotensi muncul jika tidak didukung oleh stimulus fiskal yang memadai dan perbaikan prospek dunia usaha.

Sebab, di tengah kebijakan moneter yang ketat, kenaikan inflasi terutama harga pangan, serta kondisi rupiah yang masih terdepresiasi dapat terus menekan daya beli rumah tangga dalam jangka pendek.

Upaya Pemprov Jateng Stabilkan Harga dan Serapan Produksi Telur

Rabu, 10 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/upaya-pemprov-jateng-stabilkan-harga-dan-serapan-produksi-telur/>

SEMARANG — Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu (10/6/2026).

Audiensi tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, serta kelebihan pasokan, dan kurangnya daya serap pasar.

Ketua Umum KPUS, Suwardi mengatakan, produksi telur di Jawa Tengah saat ini surplus. Produksi telur di Jawa Tengah secara keseluruhan per hari sekitar 2.300 ton, sedangkan kebutuhan per hari maksimal sekitar 1.600 ton. Jumlah kebutuhan tersebut ketika daya beli masyarakat baik.

Harga telur di kandang atau di tingkat produsen saat ini rata-rata Rp21.000 per kg. Sangat jauh dari harga acuan pembelian (HAP) telur ayam sebesar Rp26.500 per kg. Hal itu berdampak pada margin keuntungan peternak.

“Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun,” kata dia.

Suwardi berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menyerap telur lebih banyak, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maka, dia berharap Gubernur Ahmad Luthfi dapat mengoordinasikan berkaitan dengan penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Tengah.

Sebelum bertemu Ahmad Luthfi, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan yang sama. Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak tersebut.

Merespons persoalan yang dihadapi oleh para peternak unggas tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan kepada Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah guna melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Dia juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi dan UMKM, untuk menyiapkan langkah-langkah mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk ketersediaan pasokan pakan ternak.

“Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya,” beber Luthfi.

Terkait dengan harga telur tersebut, juga sempat disinggung Ahmad Luthfi dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis yang digelar di Grhadika Bhakti Praja Semarang.

Menurut dia, surplus telur telah berdampak pada rendahnya harga beli di tingkat petani. Karenanya, perlu adanya intervensi pemerintah dan stakeholder, terkait agar harga telur tidak di bawah HAP.

“Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera,” tandas gubernur. (Humas Jateng)

Gubernur Ahmad Luthfi Minta Kabupaten/ Kota Petakan Potensi Ekonomi Kreatif

Rabu, 10 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/gubernur-ahmad-luthfi-minta-kabupaten-kota-petakan-potensi-ekonomi-kreatif/>

SALATIGA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh kabupaten/ kota segera memetakan potensi ekonomi kreatif di wilayahnya. Pemetaan itu, kata dia, penting agar produk ekonomi kreatif daerah punya spesialisasi, sekaligus jadi panduan promosi untuk menembus pasar lebih luas.

“Ekonomi kreatif itu tidak terbatas tempat, waktu, dan umur. Selama manusia mempunyai kreativitas, di situ akan tumbuh,” kata Luthfi, dalam acara Ngobrol Kreatif Gubernur Jawa Tengah dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, di Hotel Wahid Prime Kota Salatiga, Rabu (10/6/2026).

Menurut Luthfi, ekonomi kreatif menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah, di tengah tekanan geopolitik global dan keterbatasan fiskal pemerintah. Karenanya, pemerintah harus hadir mendampingi pelaku ekonomi kreatif, agar potensi tersebut berkembang sesuai karakter masing-masing daerah.

“Kehadiran negara, pejabat, bupati, wali kota, dan dinas terkait, harus ikut kebersamai mereka. Jangan dilepas. Mereka harus kita beri wadah,” ujarnya.

Luthfi menilai, Jawa Tengah memiliki banyak sentra ekonomi kreatif yang belum dikenal luas. Karena itu, dia meminta potensi lokal, mulai dari kerajinan, seni, produk UMKM, industri kreatif, hingga wisata, dipetakan dan dikemas dalam materi promosi yang mudah diakses.

Peta ekonomi kreatif itu, kata Luthfi, tidak boleh hanya menjadi data internal pemerintah. Peta tersebut harus menjadi panduan yang dapat menunjukkan kekuatan tiap daerah.

Selain pemetaan, Luthfi mendorong kegiatan pameran ekonomi kreatif digelar rutin secara bergilir di kabupaten/ kota. Dengan begitu, produk dan karya kreatif suatu daerah tidak hanya dikenal di wilayahnya sendiri, tetapi juga menjangkau daerah lain.

“Saya ingin ekonomi kreatif mengadakan kegiatan setiap bulan, muter di seluruh kabupaten kota. Ekonomi kreatif di sini belum tentu sama dengan daerah lain,” tuturnya.

Luthfi juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menyediakan ruang pajang atau display produk UMKM. Menurutnya, pelaku usaha kecil membutuhkan ruang jualan, ruang bertemu, akses pasar, dan tempat berkolaborasi.

Dia juga mendorong pemanfaatan aset pemerintah yang tidak terpakai, untuk ruang kreatif anak muda. Menurutnya, aset pemprov maupun kabupaten/ kota yang mangkrak lebih baik digunakan untuk aktivitas ekonomi kreatif, daripada dibiarkan tidak produktif.

Dalam kesempatan itu, salah satu pelaku kreatif asal Purbalingga, Santosa menyampaikan, kebutuhan tempat untuk ruang edukasi dan eksplorasi komunitas kreatif.

Mendengar aspirasi itu, Luthfi langsung menghubungi kepala daerah setempat melalui telepon di hadapan peserta forum. Dia meminta pemerintah daerah mencarikan tempat yang dapat dimanfaatkan komunitas kreatif tersebut.

Dalam dialog lain, sejumlah pelaku ekonomi kreatif menyampaikan kebutuhan penguatan sentra industri, showroom, ruang promosi, akses jalan, hingga kemudahan pengembangan usaha lintas daerah.

Menanggapi hal itu, Luthfi menegaskan usaha kreatif tidak boleh dibatasi sekat administratif yang tidak relevan. Pelaku usaha yang ingin berkembang ke daerah lain, kata dia, harus mendapat ruang sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Luthfi menegaskan, ekonomi kreatif Jawa Tengah harus memiliki daya saing dan daya dobrak. Karena itu, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa harus bergerak bersama menyediakan ruang, membuka akses, memetakan potensi, dan memperkuat jejaring pelaku kreatif. (Humas Jateng)*ul

KUBE Ciptakan Peluang Kerja dan Kurangi Kemiskinan di Kota Magelang

Rabu, 10 Juni 2026

Rudi, Diskominsta

<https://www.magelangkota.go.id/view/kube-ciptakan-peluang-kerja-dan-kurangi-kemiskinan-di-kota-magelang>

KOTA MAGELANG - Kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif.

Pemerintah kini mendorong pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, dalam kegiatan Pembinaan Program KUBE di Kelurahan Rejowinangun Utara, Selasa (9/6/2026).

"Esensi KUBE bukan terletak pada bantuan modal yang diberikan, melainkan pada kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi," tandas Damar.

Damar menyebut bantuan yang diterima kelompok usaha hanyalah stimulus awal. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesungguhan anggota dalam mengelola usaha, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kekompakan kelompok.

Ia juga mengaitkan program KUBE dengan capaian Kota Magelang yang berhasil mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka terbaik se Jawa-Bali.

Pencapaian ini merupakan deretan prestasi bagi Kota Magelang dalam pengelolaan kesejahteraan dan jaminan sosial terbaik di Jawa Tengah.

Keberhasilan tersebut membuktikan penciptaan lapangan kerja tidak selalu bergantung pada industri besar, tetapi juga dapat tumbuh dari usaha-usaha kecil yang berkembang di tengah masyarakat.

"Ini salah satu strategi kami, dalam upaya menyiapkan SDM yang punya skill tertentu agar bisa bekerja di sektor mana pun. Kami (Kota Magelang) tidak punya lahan besar (untuk bangun industri besar), kami ini kota jasa dan perdagangan," ungkapnya.

Kepala Dinsos Kota Magelang, Bambang Nuryanta, mengutarakan program KUBE digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2026.

Setiap kelompok KUBE beranggotakan 10 keluarga miskin usia produktif yang berdomisili berdekatan dan terdaftar dalam basis data kesejahteraan sosial.

Kelompok dapat mengembangkan berbagai jenis usaha seperti perdagangan, jasa, peternakan, industri rumah tangga, pengolahan makanan, pertanian, maupun perikanan.

"Melalui program ini, setiap kelompok yang sudah punya embrio usaha, mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp20 juta, yang digunakan untuk pengadaan barang dan sarana usaha sesuai proposal yang telah disetujui," katanya.

Selain bantuan modal, pemerintah juga melakukan monitoring dan supervisi secara berkala untuk memastikan usaha berjalan sesuai ketentuan. (prokompimkotamgl)

BI Jateng Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Pertamina: Jaga Pasokan Bahan Pangan di Daerah Defisit

Rabu, 10 Juni 2026 15:31 WIB

Penulis: Rezanda Akbar D, Editor: rika irawati

<https://banyumas.tribunnews.com/bisnis/92731/bi-jateng-antisipasi-dampak-kenaikan-harga-pertamax-jaga-pasokan-bahan-pangan-di-daerah-defisit>

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Bank Indonesia Jawa Tengah langsung menyiapkan langkah untuk mengantisipasi inflasi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamina dan Pertamina Green.

Diketahui harga BBM nonsubsidi Pertamina dan Pertamina Green naik mulai 10 Juni 2026.

Harga Pertamina naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 dan harga Pertamina Green naik Rp4.100 menjadi Rp17.000.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M Noor Nugroho mengatakan, BI telah mengantisipasi potensi tekanan inflasi tersebut melalui kebijakan moneter.

Satu di antaranya, menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 9 Juni 2026.

"Kalau efek dari BBM ke inflasi, kami kemarin baru saja melaksanakan RDG, tanggal 9 Juni dan kembali menaikkan BI Rate 25 basis poin," ujar Noor Nugroho se usai rapat koordinasi dalam rangka kerjasama antardaerah intra Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (10/6/2026).

"Diantaranya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi 2027 supaya tetap berada dalam target 2,5 persen plus minus 1 persen," sambungnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM memang memiliki potensi menimbulkan tekanan inflasi karena berdampak pada biaya distribusi dan biaya produksi berbagai sektor usaha.

"Kalau kenaikan BBM potensinya memang ada karena ada efek tidak langsungnya, biaya distribusi dan biaya produksi juga naik."

"Tapi, mudah-mudahan bisa diantisipasi dengan berbagai langkah yang kita lakukan, termasuk kenaikan suku bunga," ujarnya.

Jaga Pasokan Bahan Pangan

Selain kebijakan moneter, BI Jawa Tengah juga memperkuat upaya pengendalian inflasi dari sisi pasokan.

Satu di antaranya, menjembatani kerja sama antara daerah surplus dan daerah defisit komoditas pangan melalui kegiatan business matching.

Noor menjelaskan, secara total, Jawa Tengah sebenarnya masih surplus produksi berbagai bahan pangan.

"Sebenarnya, produksi kita cukup kalau dibandingkan kebutuhannya. Tapi, ternyata, harganya masih tinggi karena sebagian distribusinya ke luar Jawa Tengah," katanya.

Melalui business matching tersebut, BI berharap, hasil produksi petani dan pelaku usaha di daerah surplus dapat lebih banyak diserap offtaker lokal dan dipasarkan kembali ke wilayah-wilayah yang mengalami defisit pasokan.

"Ada daerah surplus dan ada daerah defisit, itu yang kami coba pasangkan supaya harga lebih terkendali," jelasnya.

Ia mencontohkan, Kota Semarang merupakan wilayah konsumen yang tidak memiliki lahan pertanian luas sehingga bergantung pada pasokan dari daerah sekitar, semisal Kabupaten Semarang, Magelang, dan sejumlah sentra produksi lain.

Meski ada tantangan distribusi, pihaknya optimistis inflasi Jawa Tengah tetap dapat dijaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen sepanjang tahun 2026. (*)

Inflasi AS Meningkat, Core Inflation Lebih Rendah dari Perkiraan

Kamis, 11 Juni 2026 05:00 WIB

Augusta Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111556/inflasi-as-meningkat-core-inflation-lebih-rendah-dari-perkiraan/2>

Bloomberg, Inflasi Amerika Serikat meningkat pada Mei ke level paling cepat dalam lebih dari tiga tahun setelah perang Iran mendorong kenaikan harga energi, melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat AS.

Indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) naik 0,5% dibanding April dan meningkat 4,2% dibanding setahun sebelumnya, tertinggi sejak awal 2023, menurut data Bureau of Labor Statistics yang dirilis Rabu.

Namun inflasi inti yang tidak memasukkan komponen makanan dan energi naik 0,2% dibanding bulan sebelumnya, lebih rendah dari perkiraan ekonom.

Lebih dari separuh kenaikan CPI secara keseluruhan disebabkan oleh biaya energi yang lebih tinggi, meski harga di beberapa kategori seperti jasa transportasi, asuransi kesehatan, dan kendaraan baru justru turun.

Kondisi tersebut tetap menjadi tekanan bagi konsumen yang daya belinya terus tergerus kenaikan harga.

Bahkan jika konflik segera mereda, ekonom menilai tekanan harga masih akan berlanjut dan dapat mendorong pejabat Federal Reserve mempertimbangkan kenaikan suku bunga tahun ini.

Selain lonjakan awal harga energi, gangguan pasar pupuk diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga bahan pangan, sementara biaya transportasi yang lebih tinggi berpotensi mengangkat harga berbagai barang konsumsi.

Kontrak berjangka S&P 500 memangkas pelemahan setelah data dirilis, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS relatif stabil.

Laporan CPI menunjukkan harga kebutuhan rumah tangga selain bensin naik lebih moderat pada Mei. Harga bahan pangan meningkat 0,1%, sedangkan biaya layanan energi seperti listrik dan gas alam juga mencatat kenaikan yang lebih lambat.

Harga bensin sendiri melonjak 7%.

Laporan terpisah pada Rabu yang menggabungkan data inflasi dan upah menunjukkan rata-rata pendapatan per jam riil turun 0,7% dibanding tahun sebelumnya, menjadi penurunan terbesar dalam lebih dari tiga tahun.

Kombinasi harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan upah yang melemah semakin menekan anggaran rumah tangga di tengah sentimen konsumen yang sudah berada di level terendah sepanjang sejarah.

Kondisi tersebut diperkirakan menjadi isu utama menjelang pemilu sela AS pada November mendatang.

Tingkat persetujuan publik terhadap Presiden AS Donald Trump juga terus melemah seiring meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan ekonomi pemerintahannya, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kekuatan utama Trump.

Laporan Rabu juga menunjukkan tarif penerbangan naik 2,7% pada Mei, sementara biaya layanan pengiriman mencatat kenaikan kuat untuk bulan ketiga berturut-turut.

Dua kategori tersebut menjadi perhatian ekonom untuk melihat apakah kenaikan harga energi mulai merembet ke inflasi inti.

Harga barang di luar makanan dan energi turun 0,1%, menjadi penurunan terbesar dalam lebih dari setahun.

Ekonom juga terus mencermati harga barang untuk melihat apakah retailer masih meneruskan beban biaya dari tarif impor Trump kepada konsumen.

Harga mobil bekas naik tipis, sedangkan harga kendaraan baru turun untuk bulan kedua berturut-turut.

Harga pakaian masih meningkat, meski lebih lambat dibanding beberapa bulan terakhir.

Perlambatan inflasi sewa membantu mengimbangi kenaikan di kategori lain setelah sempat terdorong lebih tinggi pada April akibat anomali pengukuran terkait shutdown pemerintah tahun lalu.

Owners' equivalent rent atau komponen terbesar dalam CPI naik 0,3%.

AS Kembalikan Dana Tarif Rp396 T, Hapus Pendapatan Bea Masuk

Kamis, 11 Juni 2026 05:40 WIB

Daniel Flatley dan Laura Curtis

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111559/as-kembalikan-dana-tarif-rp396-t-hapus-pendapatan-bea-masuk/2>

Bloomberg, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengembalikan hampir US\$22 miliar kepada importir pada Mei, setara sekitar Rp396 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS. Pengembalian tersebut menjadi gelombang pertama sejak Mahkamah Agung membatalkan bagian utama kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump.

Jumlah itu hampir setara dengan total tarif yang dipungut pemerintah sepanjang bulan tersebut, menurut pernyataan Departemen Keuangan AS pada Rabu (10/6/2026). Artinya, pengembalian dana praktis menghapus seluruh pendapatan pemerintah dari bea masuk selama Mei.

Pemerintahan Trump mulai memproses pengembalian dana pada April setelah Mahkamah Agung memutuskan Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif menggunakan International Emergency Economic Powers Act atau IEEPA.

Namun besaran akhir pengembalian dana masih belum pasti setelah pemerintah mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian seluruh pungutan kepada importir yang membayar tarif senilai US\$166 miliar atau sekitar Rp2.988 triliun berdasarkan kewenangan IEEPA.

Pendapatan bersih dari bea masuk tercatat sedikit negatif, sekitar minus US\$42 juta atau sekitar Rp756 miliar, menjadi pertama kalinya hal itu terjadi dalam data Departemen Keuangan yang dihimpun Bloomberg sejak 2015.

Ketika Menteri Keuangan AS Scott Bessent ditanya mengenai kasus pengembalian tarif dalam sidang Kongres pekan lalu, ia mengatakan dana tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan pengimpor barang yang dikenakan tarif.

Secara keseluruhan, defisit anggaran AS menyempit menjadi US\$1,25 triliun atau sekitar Rp22.500 triliun untuk delapan bulan pertama tahun fiskal, turun 9% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan tarif yang sempat mencapai puncak pada Oktober memberi kontribusi signifikan terhadap kas pemerintah sepanjang tahun fiskal 2025 dan menghasilkan defisit terkecil dalam tiga tahun terakhir.

Bessent mengatakan penerimaan dari tarif yang diberlakukan melalui kewenangan lain diperkirakan tetap menghasilkan jumlah serupa bagi kas pemerintah pada 2026, meski sebagian kebijakan tersebut belum sepenuhnya berlaku.

Bunga utang yang dibayar AS mencapai US\$133 miliar atau sekitar Rp2.394 triliun pada Mei, meningkat 44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak penghasilan individu serta pajak jaminan sosial dan Medicare meningkat menjadi US\$286 miliar atau sekitar Rp5.148 triliun pada Mei dari US\$247 miliar tahun lalu. Sementara itu, penerimaan pajak korporasi turun 67%.

Untuk keseluruhan tahun fiskal, defisit AS diperkirakan kembali melebar berdasarkan proyeksi Congressional Budget Office.

Lembaga nonpartisan tersebut dalam proyeksi Februari memperkirakan defisit mencapai US\$1,85 triliun atau sekitar Rp33.300 triliun pada tahun fiskal 2026 dan US\$1,89 triliun atau sekitar Rp34.020 triliun pada 2027.

Dolar AS Goyah di Tengah Serangan Baru ke Iran dan Ketidakpastian Suku Bunga The Fed

Kamis, 11 Juni 2026 09:07 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-goyah-di-tengah-serangan-baru-ke-iran-dan-ketidakpastian-suku-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak tidak stabil pada perdagangan Kamis (11/6/2026) seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan ketidakpastian arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Sentimen pasar kembali tertekan setelah militer AS melancarkan serangan baru ke sejumlah target di Iran.

Langkah tersebut memperburuk harapan tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat, setelah sebelumnya sempat muncul optimisme dari gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara.

Di pasar valuta asing, euro diperdagangkan di level US\$ 1,1553, menjauhi posisi terendah 10 pekan yang sempat tercapai pekan lalu.

Namun, mata uang tunggal Eropa itu masih kehilangan sebagian besar penguatannya sejak gencatan senjata diumumkan pada awal April.

Pelaku pasar kini menantikan hasil rapat kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) yang diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia turun tipis ke level 99,903 setelah militer AS mengonfirmasi serangan terhadap sejumlah target di Iran telah selesai dilakukan.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan, Washington akan melancarkan serangan tambahan apabila tidak tercapai kesepakatan damai dengan Iran.

Eskalasi terbaru tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kontrak Brent tercatat naik lebih dari 2% ke level US\$ 95,40 per barel.

Meski demikian, reaksi pasar dinilai tidak sedrastis periode-periode sebelumnya. Dolar AS masih bergerak relatif terbatas pada perdagangan awal sesi Asia.

"Kami melihat adanya kelelahan pasar terhadap berita-berita konflik. Beberapa pekan lalu, eskalasi seperti ini mungkin sudah cukup untuk mendorong Brent kembali menembus US\$ 100 per barel dan mengangkat dolar AS secara signifikan," ujar Chief Market Analyst AFX Global, Nick Twidale.

Menurut dia, pasar saat ini lebih membutuhkan kepastian mengenai arah konflik di Timur Tengah.

Investor masih menilai apakah penutupan Selat Hormuz dan konflik yang terjadi akan menjadi kondisi jangka panjang atau hanya bagian dari strategi negosiasi yang pada akhirnya membuka peluang perdamaian.

Di sisi lain, pelaku pasar juga mencermati prospek suku bunga AS setelah data inflasi terbaru menunjukkan tekanan harga masih tinggi.

Indeks Harga Konsumen (CPI) AS naik 4,2% secara tahunan pada Mei 2026, menjadi kenaikan tertinggi sejak April 2023. Namun, inflasi inti (core CPI) hanya meningkat 0,2% secara bulanan setelah naik 0,4% pada April.

Chief International Economist ING James Knightley menilai, perlambatan pertumbuhan upah masih dapat membantu meredakan tekanan inflasi inti di AS.

"Hal ini seharusnya membantu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Meski kami tidak lagi memperkirakan The Fed memangkas suku bunga tahun ini karena momentum ekonomi yang membaik, kami juga tidak melihat kebutuhan untuk menaikkan suku bunga," jelas Knightley.

Meski demikian, pasar kini telah memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember mendatang.

Perkiraan tersebut berbalik tajam dibandingkan awal tahun ketika pasar masih mengantisipasi dua kali pemangkasan suku bunga pada 2026 sebelum pecahnya konflik Iran pada akhir Februari.

Di Asia, yen Jepang diperdagangkan di level 160,52 per dolar AS, mendekati area yang memicu kekhawatiran intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing.

Sementara itu, Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda dikabarkan menjalani perawatan medis dan akan absen dalam rapat kebijakan moneter BOJ pada 15-16 Juni mendatang.

Meski demikian, pasar tetap memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan tersebut.

Untuk mata uang komoditas, dolar Australia berada di level US\$ 0,7006 setelah sempat menyentuh posisi terendah sembilan pekan, sedangkan dolar Selandia Baru stabil di level US\$ 0,5797.

Mata Uang Tertekan, Bank Sentral Asia Kompak Perketat Pengawasan Spekulasi Valas

Kamis, 11 Juni 2026 17:25 WIB

Sumber: Bloomberg, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-tertekan-bank-sentral-asia-kompak-perketat-pengawasan-spekulasi-valas>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Bank-bank sentral di Asia kini menghadapi tekanan nilai tukar yang semakin besar. Tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari pasar global di luar yurisdiksi mereka.

Kondisi ini dipicu oleh harga minyak yang tinggi, arus keluar dana asing, serta penguatan dolar AS yang menekan hampir seluruh mata uang regional.

Dari Korea Selatan, India, hingga Filipina, otoritas moneter dilaporkan memperketat pengawasan terhadap spekulasi valuta asing di pasar offshore. Langkah ini dilakukan untuk meredam volatilitas yang makin sulit dikendalikan di tengah ketegangan geopolitik, termasuk konflik AS–Iran yang ikut memperburuk tekanan pada negara-negara importir energi di Asia.

Di Korea Selatan, Kementerian Keuangan mengumumkan akan meningkatkan pengawasan terhadap derivatif valuta asing offshore. Sementara itu, Filipina meminta perbankan memastikan transaksi non-deliverable forward (NDF) hanya digunakan untuk kebutuhan ekonomi riil, bukan spekulasi. India juga memperketat batas posisi devisa bersih bank hingga US\$ 100 juta.

Indonesia turut mengambil langkah kebijakan ketat dengan menaikkan suku bunga tak terduga pada awal pekan ini. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa mereka aktif di pasar valuta asing di seluruh dunia, sepanjang waktu untuk menopang stabilitas rupiah.

Tekanan terhadap mata uang kawasan semakin nyata. Rupiah sempat menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, sementara won Korea Selatan jatuh ke level terlemah sejak krisis keuangan global. Rupee India dan peso Filipina juga menyentuh rekor terendah, dengan sebagian besar mata uang Asia melanjutkan pelemahan pada perdagangan Kamis di tengah eskalasi ketegangan Timur Tengah.

Namun, para analis menilai upaya pembatasan transaksi offshore saja tidak cukup untuk membalikkan tren pelemahan. "Langkah ini mungkin berdampak, tetapi pada akhirnya diperlukan perubahan fundamental ekonomi agar berhasil," ujar Michael Wan, analis mata uang senior MUFG Bank Ltd.

Pasar NDF, yang memungkinkan investor berspekulasi atau melakukan lindung nilai di luar pasar domestik, diperkirakan masih memainkan peran penting di Asia. Meski hanya mencakup sekitar 4% dari pasar valuta asing global senilai US\$ 10 triliun per hari, dampaknya bisa besar di kawasan yang memiliki pembatasan konvertibilitas mata uang.

Otoritas di kawasan sebenarnya telah lama berupaya mengurangi pengaruh pasar offshore. India mendorong aktivitas NDF ke pusat keuangan GIFT City, Korea Selatan membuka pasar valas untuk investor asing dan memperpanjang jam perdagangan, sementara Thailand memberikan akses lebih luas bagi korporasi non-residen untuk melakukan lindung nilai.

Namun, dalam kondisi krisis saat ini, bank sentral justru kembali aktif melakukan intervensi di pasar offshore. Intervensi tersebut turut menekan cadangan devisa di berbagai negara.

Bank Sentral India disebut paling agresif, dengan menjual dolar dalam tenor jangka pendek. Posisi short dolar bank sentral India diperkirakan telah mencapai sekitar US\$ 115 miliar. Bank Indonesia juga dilaporkan melakukan penjualan dolar di pasar luar negeri untuk menstabilkan rupiah.

Meski demikian, sebagian investor menilai pelemahan mata uang lebih disebabkan faktor domestik, seperti arus keluar modal dan kekhawatiran terhadap prospek ekonomi masing-masing negara. India, misalnya, mengalami arus keluar dana asing besar-besaran dari pasar saham, sementara Indonesia menghadapi kekhawatiran fiskal dan ekonomi.

Filipina terdampak lonjakan inflasi akibat harga minyak, sedangkan Korea Selatan mencatat keluar masuk modal asing yang signifikan di pasar sahamnya.

Para ekonom memperkirakan bank sentral di kawasan masih akan mempertahankan kebijakan ketat, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan di India, Filipina, dan Indonesia, demi meredam gejolak pasar valuta asing yang masih berlanjut.

Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Melambat di 2026, Hanya Tumbuh 5%

Kamis, 11 Juni 2026 13:25 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-proyeksi-ekonomi-indonesia-melambat-di-2026-hanya-tumbuh-5>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Bank Dunia alias World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5,0% pada 2026 akibat tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor.

Meski demikian, ekonomi nasional diperkirakan kembali menguat ke level 5,2% pada periode 2027-2028 seiring perbaikan kondisi global dan keberhasilan pelaksanaan reformasi struktural.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut proyeksi pertumbuhan 2026 ditopang oleh kinerja ekonomi kuartal I yang lebih baik dari perkiraan serta percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5% pada 2026, didukung berbagai stimulus fiskal pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat signifikan hingga 8,7%.

Meski menjadi penyangga pertumbuhan jangka pendek, Bank Dunia mengingatkan ketergantungan terhadap belanja pemerintah memiliki risiko tersendiri.

"Ketergantungan pada konsumsi publik sebagai penopang pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah penerapan aturan fiskal yang diamanatkan undang-undang," tulis Bank Dunia dalam laporannya, Kamis (11/6/2026).

Lembaga tersebut memperkirakan konflik di Timur Tengah masih akan berlangsung sepanjang 2026 meskipun tetap terkendali.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia dan rantai logistik global, sehingga harga minyak mentah Brent diproyeksikan bertahan di kisaran US\$ 94 per barel atau sekitar US\$ 24 lebih tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN 2026.

Selain itu, kondisi keuangan global diperkirakan tetap ketat dengan imbal hasil obligasi yang tinggi serta premi risiko yang rentan meningkat apabila terjadi guncangan baru di pasar keuangan internasional.

Di sisi lain, permintaan global diproyeksikan melemah pada 2026 sebelum berangsur pulih pada 2027 hingga 2028.

Bank Dunia menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah sangat bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural.

Pemulihan ekonomi menuju level 5,2% pada 2027-2028 diperkirakan akan ditopang oleh membaiknya pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan investasi melalui Danantara, serta agenda deregulasi dan penghilangan hambatan usaha yang tengah dijalankan pemerintah.

Namun, Bank Dunia mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih banyak didorong stimulus dari sisi permintaan, termasuk belanja pemerintah dan berbagai program fiskal.

Tanpa reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas, dorongan tersebut hanya akan memberikan efek sementara dan tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

"Proyeksi pemulihan menuju 5,2% pada periode 2027-2028 bergantung pada keberhasilan reformasi," katanya.

Dari sisi inflasi, Bank Dunia memperkirakan laju harga konsumen masih berada dalam rentang target yang ditetapkan Bank Indonesia. Meski demikian, risiko kenaikan harga pangan dan energi dinilai tetap tinggi.

Adapun risiko terbesar terhadap prospek ekonomi Indonesia berasal dari faktor eksternal. Gangguan pasokan minyak dan jalur pelayaran global yang berlangsung lebih lama berpotensi meningkatkan inflasi, memperbesar beban subsidi energi, menekan ekspor, mengurangi investasi asing langsung (FDI), serta meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan dunia usaha.

Dalam skenario tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027-2028 dapat lebih rendah sekitar 0,2 hingga 0,3 poin persentase dibanding proyeksi dasar.

Sebaliknya, peluang pertumbuhan yang lebih tinggi dapat muncul apabila pasokan minyak global pulih lebih cepat, harga energi turun, sentimen investor membaik, serta implementasi perjanjian perdagangan dan reformasi deregulasi berjalan lebih cepat dari perkiraan.

Dalam skenario positif tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi bertambah 0,2 hingga 0,4 poin persentase pada 2026.

Bank Dunia Ingatkan Tekanan Fiskal Indonesia Belum Mereda hingga 2028

Kamis, 11 Juni 2026 14:33 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-ingatkan-tekanan-fiskal-indonesia-belum-mereda-hingga-2028>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Bank Dunia alias World Bank memperkirakan ruang fiskal Indonesia akan tetap berada di bawah tekanan dalam beberapa tahun ke depan.

Defisit anggaran diproyeksikan bertahan dekat dengan batas maksimal yang diizinkan undang-undang seiring tingginya kebutuhan belanja untuk subsidi dan berbagai program prioritas pemerintah.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memperkirakan defisit fiskal mencapai 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.

Angka tersebut diproyeksikan tetap bertahan pada level yang sama pada 2027 sebelum turun tipis menjadi 2,7% pada 2028.

Menurut Bank Dunia, tingginya defisit mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan kebutuhan pendanaan berbagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan alokasi anggaran besar.

"Defisit fiskal tetap berada dekat dengan batas maksimum yang ditetapkan undang-undang dalam jangka menengah," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, lembaga tersebut memperkirakan penerimaan negara akan mulai membaik dalam beberapa tahun ke depan.

Perbaikan itu didorong oleh berkurangnya penumpukan restitusi pajak serta mulai terlihatnya hasil reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan pemerintah.

Dalam jangka pendek, penerimaan negara juga masih mendapat dukungan dari tingginya harga sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia.

Harga batu bara, gas alam cair (LNG), nikel, emas, dan minyak sawit diperkirakan memberikan tambahan dukungan terhadap penerimaan negara dengan dampak bersih sekitar 0,4% terhadap PDB.

Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa tekanan terhadap fiskal tidak hanya berasal dari sisi belanja. Beban pembayaran bunga utang juga diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara diperkirakan naik dari 18,7% pada 2025 menjadi 19,2% pada 2028. Artinya, porsi penerimaan negara yang digunakan untuk membayar bunga utang akan semakin besar.

Selain itu, Bank Dunia memperkirakan Indonesia masih akan mencatat defisit primer rata-rata sebesar 0,4% terhadap PDB sepanjang periode 2026–2028.

Bank Dunia Bunyikan Alarm untuk Kelas Menengah Indonesia, Upah Riil Terus Turun

Kamis, 11 Juni 2026 13:59 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-bunyikan-alarm-untuk-kelas-menengah-indonesia-upah-riil-terus-turun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Bank Dunia membunyikan peringatan terhadap kondisi kelas menengah Indonesia.

Meski pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam beberapa tahun ke depan, lembaga tersebut menilai kualitas pekerjaan dan perkembangan pendapatan masyarakat masih menjadi tantangan yang dapat menghambat perluasan kelompok kelas menengah.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut bahwa risiko domestik berpotensi memperburuk tekanan eksternal yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia.

Salah satu risiko yang mendapat perhatian adalah lemahnya kualitas lapangan kerja dan menurunnya upah riil pekerja berkeahlian menengah hingga tinggi.

Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat menuju kelas menengah yang lebih kuat.

"Kualitas pekerjaan yang lemah serta penurunan upah riil di kalangan pekerja berkeahlian menengah dan tinggi juga dapat membatasi konsumsi rumah tangga dan menghambat perluasan kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, Kamis (11/6/2026).

Bank Dunia menyebut tren tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyusutan kelas menengah di Indonesia.

Dalam laporan itu dijelaskan, sepanjang periode 2018-2025, upah riil pekerja berkeahlian menengah turun sekitar 1% per tahun, sedangkan pekerja berkeahlian tinggi mengalami penurunan sekitar 2% per tahun.

Penurunan tersebut ikut menekan tren upah secara keseluruhan hingga sekitar 0,5% per tahun berdasarkan pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate/CAGR) median upah riil.

Sebaliknya, pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan upah rata-rata sekitar 1,7% per tahun.

"Perbedaan tren tersebut secara bertahap mengurangi proporsi pekerja kelas menengah," katanya.

Akibat tekanan tersebut, porsi pekerja kelas menengah turun drastis dari 14,5% pada 2018 menjadi hanya 7,1% pada 2025.

Bank Dunia menilai terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal berkualitas menjadi masalah utama. Kondisi ini membuat semakin banyak pekerja berpendidikan tinggi beralih ke sektor informal.

Data Bank Dunia menunjukkan porsi lulusan perguruan tinggi yang bekerja sebagai pekerja formal bergaji turun dari 74,1% pada 2018 menjadi 67,8% pada 2025.

Sementara itu, lulusan pendidikan menengah atas mengalami penurunan hampir 7 poin persentase dalam pekerjaan formal bergaji selama periode yang sama.

Meski demikian, sebagian lulusan perguruan tinggi masih mampu masuk ke kelompok pekerjaan informal tingkat atas. Proporsinya meningkat dari 6,7% pada 2018 menjadi 8,9% pada 2025.

Namun, pekerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah tidak memiliki alternatif serupa dan sebagian besar terserap ke pekerjaan informal tingkat bawah.

Menurut Bank Dunia, fenomena ini menunjukkan terjadinya pembalikan dari pola yang selama ini berlaku, di mana pendidikan yang lebih tinggi umumnya meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan formal dan pendapatan yang lebih baik.

Lembaga tersebut menilai lemahnya permintaan tenaga kerja dari dunia usaha menyebabkan banyak pekerja terdidik harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilan yang dimiliki.

Lebih jauh, meningkatnya penyerapan tenaga kerja terdidik ke sektor informal dinilai berpotensi menekan kesejahteraan jangka panjang.

Pekerjaan informal umumnya menawarkan tingkat keamanan kerja yang lebih rendah, perlindungan sosial yang terbatas, serta peluang peningkatan pendapatan yang lebih kecil.

"Pola ini sejalan dengan semakin tergerusnya upah kelas menengah dan stagnasi perekrutan tenaga kerja di sektor jasa bernilai tambah tinggi," tulis Bank Dunia.

Purbaya Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kuat Hadapi Dinamika 2027

Kamis, 11 Juni 2026 07:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111564/purbaya-pastikan-fundamental-ekonomi-ri-kuat-hadapi-dinamika-2027>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa saat ini fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian

global yang kini mulai menurun. Hal ini diungkapkan oleh Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Rabu (10/06).

Menurut Purbaya, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 yang mencapai 5,61%, sementara inflasi Mei 2026 tetap terkendali di level 3,08 persen (year-on-year).

Selain itu, neraca perdagangan nasional masih mencatatkan surplus dengan cadangan devisa yang memadai setara 5,6 bulan impor.

“Demikian pula dengan kinerja sektor manufaktur ini menunjukkan perbaikan pada bulan Mei 2026, mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Purbaya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Menurut Purbaya, dinamika ekonomi domestik memperlihatkan tren perbaikan pada triwulan II-2026. Hal ini tercermin dari optimisme konsumen yang tetap terjaga tercermin dari peningkatan aktivitas belanja berdasarkan Mandiri Spending Index serta Indeks Keyakinan Konsumen yang dirilis Bank Indonesia. Aktivitas ekonomi juga tumbuh positif yang terlihat dari meningkatnya penjualan mobil, sepeda motor, konsumsi listrik, dan semen.

Meski begitu, nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan dipicu sentimen global dan risk-off di pasar keuangan. Namun pemerintah optimistis bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan memperkuat stabilitas nilai tukar.

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kola Devisa Hasil Ekspor, serta pendalaman pasar keuangan akan memperkuat pasokan valas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tandas Menkeu.

Di sisi lain, aliran dana asing mencatatkan penguatan sepanjang triwulan II 2026, terutama ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Walaupun pasar saham masih mengalami arus keluar modal, ketertarikan investor terhadap instrumen keuangan domestik secara umum masih terpelihara.

Dalam upaya menjaga laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah melanjutkan sejumlah langkah strategis, mulai dari menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan pangan, memastikan ketersediaan energi serta beras tetap terjamin, mempertahankan disiplin fiskal, mempercepat realisasi belanja negara, hingga menyalurkan berbagai stimulus guna menopang daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Menkeu.

Purbaya Beber Strategi Jaga APBN 2027 Tetap Prudent & Sustainable

Kamis, 11 Juni 2026 08:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111563/purbaya-beber-strategi-jaga-apbn-2027-tetap-prudent-sustainable/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi prudent dan sustainable. Hal tersebut diungkapkan Purbaya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).

“APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan kualitas belanja, serta mengelola pengendalian defisit secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan,” kata Purbaya.

Dalam pemaparannya di DPR, optimalisasi pendapatan dilakukan dengan peningkatan tax compliance dan tax base melalui efektivitas coretax, optimalisasi sumber daya alam (SDA) dan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi.

Sementara strategi belanja dilakukan dengan strategi pro growth dan pro welfare untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional, Refocusing Belanja, dan efektivitas sinergi serta harmonisasi antara pusat dan daerah.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pembiayaan inovatif dengan pengendalian defisit dan utang dalam batas aman, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untukantisipasi ketidakpastian dan mendorong pertumbuhan dan mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Danantara.

“Sejalan dengan upaya tersebut, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur dengan defisit Rp1,8% hingga Rp2,4% terhadap PDB,” kata Purbaya.

Sementara, untuk mendukung hal tersebut, maka Purbaya memproyeksikan pendapatan negara sebesar 11,82% hingga 12,4% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan berada di angka 13,62% hingga 14,8% terhadap PDB.

Rupiah di Luar Negeri Masih di Bawah Rp18.000/US\$

Kamis. 11 Juni 2026 08:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111571/rupiah-di-luar-negeri-masih-di-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah di luar negeri membuka perdagangan dengan penguatan terbatas 0,01% di posisi Rp17.930/US\$, tak lama berselang rupiah terpeleset 0,15% ke level Rp17.955/US\$ pada 07.20 WIB, Kamis (11/6/2026).

Pergerakan rupiah di luar negeri dipicu oleh ketidakpastian geopolitik yang kembali memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, setelah AS menyerang fasilitas pengolahan air bersih di Iran, dan membuat harga minyak mentah kembali naik.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) sempat melonjak 4% hingga diperdagangkan di atas US\$93 per barel, sebelum memangkas sebagian kenaikannya.

“Beberapa hari ke depan akan menjadi sangat penting untuk menentukan apakah diplomasi dapat kembali mengambil peran atau konflik ini justru memasuki siklus eskalasi yang lebih berkepanjangan,” kata Jorge Leon, Kepala Analisis Geopolitik di Rystad Energy, seperti dikutip Bloomberg News.

Menurutnya, volatilitas harga minyak kemungkinan akan tetap tinggi hingga terdapat bukti yang lebih jelas bahwa gencatan senjata benar-benar bertahan.

Volatilitas harga minyak membuat sebagian mata uang kawasan hari ini bergerak melemah. Won Korea Selatan memimpin pelemahan 0,16%, disusul ringgit Malaysia 0,09%, dan dolar Singapura 0,05%. Sebaliknya, hanya yen Jepang, yuan offshore, dan dolar Hong Kong yang menguat terbatas masing-masing 0,02% dan 0,01%.

Dari kawasan Asia, tekanan terhadap won Korea Selatan terjadi di tengah meningkatnya gejolak pasar saham. Euforia investor terhadap saham-saham kecerdasan buatan (AI), terutama produsen chip memori seperti Samsung Electronics dan SK Hynix, mulai berbenturan dengan kekhawatiran bahwa reli sektor teknologi telah berlangsung terlalu jauh dan berpotensi mengalami koreksi.

Sentimen pasar semakin tertekan oleh berlarut-larutnya upaya mencapai kesepakatan damai di Timur Tengah, sementara ketahanan ekonomi Amerika Serikat memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan sikap kebijakan moneter yang ketat lebih lama. Kombinasi kedua faktor tersebut mendorong investor mengurangi eksposur pada aset-aset berisiko.

Akibatnya, indeks saham negara berkembang MSCI merosot 2,5% pada perdagangan Rabu (10/6), memperdalam koreksi sepanjang bulan ini menjadi 4,7%. Pelemahan indeks tersebut terutama dipicu oleh aksi jual pada saham-saham teknologi Korea Selatan yang sebelumnya menjadi motor penguatan pasar.

Volatilitas di pasar saham Seoul pun melonjak tajam. Dalam 10 hari terakhir, pergerakan indeks tercatat sangat ekstrem, dengan volatilitas tersirat yang setara 84% secara tahunan. Angka ini mencerminkan tingginya ketidakpastian pasar, di mana indeks acuan berpotensi bergerak naik maupun turun secara signifikan dalam periode mendatang.

Bagi Indonesia, penguatan rupiah setelah kenaikan suku bunga darurat oleh Bank Indonesia memang memberikan sedikit ruang bernapas. Namun, pergerakan mata uang domestik masih berada dalam lanskap global yang penuh ketidakpastian.

Setidaknya ada tiga faktor yang terus menjadi perhatian pasar. Pertama, memanasnya kembali konflik antara AS dan Iran yang berpotensi mendorong harga minyak lebih tinggi sekaligus memperkuat dolar AS sebagai aset safe haven.

Kedua, ekspektasi bahwa Federal Reserve masih akan mempertahankan sikap hawkish atau bahkan kembali menaikkan suku bunga, yang dapat memicu arus keluar modal dari negara berkembang.

Ketiga, meningkatnya volatilitas dan koreksi pada saham-saham teknologi global yang berisiko menurunkan minat investor terhadap aset berisiko, termasuk pasar negara berkembang.

Dengan latar belakang tersebut, penguatan rupiah dalam dua hari terakhir sepertinya belum akan menandakan akhir dari tekanan selama ini. Prospek arus modal asing dan stabilitas pasar keuangan domestik masih akan sangat ditentukan oleh perkembangan konflik di Timur Tengah serta arah kebijakan moneter AS dalam beberapa pekan mendatang.

Analisis Teknikal

Secara teknikal nilai rupiah sejatinya masih ada asa peluang menguat hari ini. Adapun rupiah berpotensi menguat ke resistance terdekat pada level Rp17.910/US\$, resistance potensial selanjutnya menuju Rp17.870/US\$ usai break trendline sebelumnya.

Rupiah juga terdapat level Rp17.800/US\$ sebagai acuan paling optimistis penguatan rupiah di dalam time frame daily, tren jangka menengah (mid-term) atau dalam sepekan perdagangan.

Jika nilai tukar rupiah kembali menembus level support terkuatnya pada level Rp18.000/US\$, maka mengonfirmasi support selanjutnya pada level Rp18.100/US\$ sebagai support psikologis juga Rp18.200/US\$.

BI Lapor Kinerja Penjualan Ritel April-Mei, Ini Hasilnya

Kamis, 11 Juni 2026 11:11 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111600/bi-lapor-kinerja-penjualan-ritel-april-mei-ini-hasilnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Penjualan Eceran terbaru. Untuk April, penjualan eceran atau ritel diperkirakan mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan, melanjutkan kontraksi yang terjadi pada April.

Pada Kamis (11/6/2026), BI mengumumkan penjualan ritel yang dicerminkan dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) untuk periode April sebesar 226,9. Turun 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Angka ini jauh lebih rendah ketimbang Maret yang masih tumbuh 3,4% yoy.

Pertumbuhan penjualan ritel pada April menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau hampir tiga tahun terakhir.

"Kinerja tersebut didorong oleh tetap tumbuhnya penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesoris, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, serta Barang Budaya dan Rekreasi," sebut laporan BI.

Secara bulanan (month-to-month/mtm), penjualan ritel April mengalami kontraksi 11,6%. Jauh lebih rendah ketimbang Maret yang tumbuh 10,3% mtm.

Menurut BI, kontraksi penjualan ritel secara bulanan tersebut disebabkan oleh normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Tahun ini, Ramadan dan Idul Fitri jatuh pada Maret.

Sedangkan untuk periode Mei, BI memperkirakan IPR berada di 225. Masih turun 0,9% yoy, tetapi membaik dibandingkan April.

"Ditopang terutama oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesoris, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, dan Barang Lainnya," demikian laporan BI.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei 2026 diperkirakan juga terkontraksi 0,9% mtm. Membaik dibandingkan penurunan April, karena permintaan masyarakat pada periode libur Kenaikan Yesus Kristus, Idul Adha, dan Waisak.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang yaitu Juli 2026, diperkirakan relatif stabil. Sementara pada enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026, diperkirakan meningkat.

Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli sebesar 175,8, relatif stabil dibandingkan IEH pada Juni sebesar 175,6. Sementara itu, IEH Oktober diprakirakan sebesar 167,6, lebih tinggi dibandingkan IEH September sebesar 163,2 didorong oleh kenaikan harga bahan baku.

Sederet Tantangan RI Gapai Pertumbuhan Ekonomi 6,5% pada 2027

Kamis, 11 Juni 2026 13:32 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111629/sederet-tantangan-ri-gapai-pertumbuhan-ekonomi-6-5-pada-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2027, sebagai bagian dari upaya menuju target ekonomi 8% pada 2029. Hal ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.

Menanggapi hal itu, ekonom menilai target tersebut terlalu optimistis untuk dijadikan asumsi utama dalam perencanaan tahun depan. Pemerintah dianggap membutuhkan sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas secara nyata.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, jika melihat rekam jejak beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%. Setelah tumbuh 5,31% pada 2022, laju pertumbuhan turun menjadi 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024, sebelum naik tipis ke 5,11% pada 2025. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan struktural Indonesia saat ini berada di sekitar 5,1%.

Untuk tumbuh mencapai 6,5%, kata dia, diperlukan tambahan sekitar 1,4 poin persentase. Dalam perekonomian sebesar Indonesia, lompatan sebesar itu tidak bisa terjadi hanya karena siklus ekonomi yang membaik.

“Dibutuhkan sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas secara nyata,” kata Yusuf ketika dihubungi, Kamis (11/6/2026).

Dia menjelaskan, tantangannya adalah struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pertumbuhan produktivitas masih belum menunjukkan percepatan yang signifikan.

Kinerja ekonomi yang lebih tinggi belakangan ini juga sebagian ditopang oleh kenaikan belanja pemerintah. Masalahnya, lanjut dia, ruang fiskal justru sedang dijaga lebih ketat dengan target defisit yang relatif rendah. Artinya, pemerintah memiliki ruang yang terbatas untuk terus mendorong pertumbuhan melalui belanja negara.

Di saat yang sama, kondisi global juga tidak sepenuhnya mendukung. Hal ini terjadi karena ketidakpastian geopolitik masih tinggi, harga komoditas tidak lagi menikmati momentum seperti masa boom sebelumnya, dan tekanan eksternal terlihat dari pelemahan cadangan devisa serta asumsi nilai tukar rupiah yang masih berada pada level cukup tinggi.

“Dalam situasi seperti ini, mengandalkan ekspor atau arus modal asing untuk menutup selisih pertumbuhan menuju 6,5% menjadi langkah yang cukup berisiko,” ungkap Yusuf.

Peningkatan Investasi dari Sektor Swasta

Karena itu, jika target pertumbuhan 6,5% ingin dikejar, sumber utamanya harus berasal dari sektor swasta dan investasi. Menurut dia, kuncinya terletak pada peningkatan efisiensi investasi, hilirisasi yang benar-benar menciptakan nilai tambah di dalam negeri, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim usaha agar modal masuk ke sektor-sektor produktif. Namun, reformasi semacam ini membutuhkan waktu dan hasilnya biasanya baru terlihat dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% masih terlihat cukup realistis sebagai sasaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Sementara itu, angka 6,5% lebih tepat dipandang sebagai aspirasi yang ingin dituju daripada proyeksi yang sepenuhnya didukung oleh kondisi fundamental saat ini.

“Target tersebut bisa menjadi arah kebijakan yang positif, tetapi masih terlalu optimistis untuk dijadikan asumsi utama perencanaan selama produktivitas dan investasi swasta belum menunjukkan percepatan yang kuat,” jelas dia.

Strategi Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2027. Pertama, pemerintah akan mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan.

Kemudian, pemerintah juga akan mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan mendorong peran dana antara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis, sekaligus investasi jangka panjang untuk leverage aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global.

“Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik,” kata Purbaya dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas KEM PPKF 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat.

Purbaya juga mengatakan pemerintah akan melaksanakan program unggulan secara efektif dan berkualitas sehingga memiliki multiplier effect yang kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” tuturnya.

Purbaya berharap melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Rupiah Kejar Penguatan 3 Hari Beruntun

Kamis, 11 Juni 2026 09:25 WIB

Dian Sari Pertiwi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111585/rupiah-kejar-penguatan-3-hari-beruntun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah membuka perdagangan Kamis (11/6/2026) dengan melanjutkan penguatannya, memperpanjang tren positif yang telah berlangsung dua hari beruntun. Jika kembali finis di jalur hijau pada perdagangan hari ini, maka mata uang Tanah Air resmi terapresiasi tiga hari berturut-turut.

Rupiah sempat terapresiasi 0,03% ke Rp17.948/US\$ pada sesi pembukaan perdagangan, di tengah gejolak geopolitik yang masih terjadi antara Amerika Serikat (AS), Iran dan Israel. Sebelum akhirnya kembali melemah 0,09% ke Rp17.970/US\$.

Penguatan rupiah yang berlangsung kemarin ditopang oleh kebangkitan aset-aset Indonesia, setelah otoritas moneter kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin (bps) ke 5,5%.

Di samping itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dikabarkan telah memimpin konferensi dengan investor dari AS dan Eropa pada Selasa malam untuk menjelaskan keputusan kenaikan suku bunga mendadak yang dilakukan BI. Pada Rabu pagi, ia kembali menggelar pertemuan serupa dengan investor di kawasan Asia.

Di saat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga meyakinkan pasar dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa pemerintah tetap akan menjaga batas defisit anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tingginya harga minyak yang kembali ditransmisikan ke harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamina dengan kenaikan menjadi Rp16.250 per liter sepertinya sedikit meredakan kekhawatiran pelaku pasar terkait beban defisit fiskal.

Kepala Strategi Makro Asia di Sumitomo Mitsui Banking Corp, Jeff Ng, mengatakan langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan awal yang baik. Meski begitu, dia menilai memulihkan kepercayaan pasar membutuhkan waktu.

"Kami mulai melihat tanda-tanda awal stabilisasi, tetapi kondisinya masih rapuh," kata Jeff Ng," seperti dikutip Bloomberg News.

Sementara dari kawasan, kenaikan harga minyak dan ketidakpastian geopolitik kembali menekan mata uang Asia. Won Korea Selatan melemah paling tajam 0,4%, disusul dolar Taiwan 0,2%, dan rupiah 0,09%, lalu baht Thailand 0,05%, yuan China dan ringgit Malaysia masing-masing 0,03% dan 0,01%.

Sebaliknya, peso Filipina menguat 0,12%, yuan offshore 0,05%, lalu yen Jepang 0,03%, disusul dolar Singapura dan Hong Kong masing-masing 0,02% dan 0,01%.

Di sisi lain, pasar global juga masih dibayangi kemungkinan The Fed mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama dari perkiraan. Meski inflasi AS sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi, ekonomi Negeri Adidaya dianggap masih cukup kuat untuk membuat bank sentral untuk lebih berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan.

Alhasil, aset dolar AS masih menarik bagi investor global dan berpotensi membatasi aliran modal yang masuk ke negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia.

Pagi ini, indeks dolar AS sempat bertahan di 100,049, sebelum menyisakan sebagian penguatannya menjadi 99,91. Sementara harga minyak mentah Brent berada di level US\$95 per barel setelah menguat 2,04%.

Gubernur Luthfi Siapkan Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Jaga Harga Pangan Tetap Terjangkau

Kamis, 11 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/gubernur-luthfi-siapkan-antisipasi-dampak-kenaikan-bbm-jaga-harga-pangan-tetap-terjangkau/>

JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, terhadap harga bahan pokok penting (bapokting) di wilayahnya.

Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan, dan keterjangkauan daya beli masyarakat Jawa Tengah.

“Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat,” kata Luthfi, di sela kegiatan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi. Meski hingga saat ini kenaikan harga bapokting di Jateng belum terlihat, Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia (BI), BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan.

“Pergerakan harga bahan pokok penting belum ada. Tetapi antisipasi sudah kita siapkan, koordinasi dengan BI, BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan,” jelasnya.

Stabilitas harga bapokting, kata Luthfi, menjadi kunci pengendalian inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD kabupaten/ kota, digandeng untuk memantau harga, dan menggelar operasi pasar.

Luthfi juga mewanti-wanti, agar tidak ada spekulasi atau oknum yang memainkan harga di pasar.

“Kalau itu ada kenaikan harga bapokting, maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting, antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat, sehingga inflasi bisa kita tekan,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan tarif baru BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamina (RON 92) kini menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara, harga Pertamina Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. (Humas Jateng)*ul

Gubernur Ahmad Luthfi Dinobatkan Tokoh Penggerak UMKM dan Ekonomi Kreatif

Kamis, 11 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/gubernur-ahmad-luthfi-dinobatkan-tokoh-penggerak-umkm-dan-ekonomi-kreatif/>

JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan untuk kategori Penggerak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Ekonomi Kreatif, dalam ajang Top Regional Leader 2026, yang diselenggarakan Disway National Network, di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penghargaan diserahkan Founder Disway National Network, Dahlan Iskan. Gelaran itu juga dirangkai dengan acara Leadership Forum dan Awarding Ceremony, yang mengangkat tema “Mendorong Daerah sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional”.

Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut melecut motivasinya untuk lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan UMKM di wilayahnya. Apalagi jumlah UMKM di Jawa Tengah sekitar 4,2 juta.

“Ini inspirasi untuk seluruh kepala daerah, agar lebih kreatif dalam menciptakan terobosan di tengah situasi keterbatasan fiskal,” kata Luthfi.

Berdasarkan data pada triwulan I 2026, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah membina sekitar 199.781 UMKM. Jumlah tersebut naik 1.001 UMKM dibandingkan tahun sebelumnya. Ribuan UMKM tersebut terdiri atas sektor produksi 81.595 unit, pertanian 28.586 unit, perdagangan 67.595 unit, dan jasa 22.005 unit. Dari jumlah tersebut menyerap sekitar 1,38 juta tenaga kerja. Sementara, nilai asetnya mencapai Rp39,675 miliar dengan omzet Rp70,6 miliar.

Dalam hal pembinaan, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui kemudahan akses permodalan; peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pelatihan keterampilan, manajemen, dan pendampingan legalitas usaha. Selain itu membantu terbukanya pasar baru, menerapkan digitalisasi dalam perizinan dan pemasaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggunakan portal satu data Dinas Koperasi dan UKM serta Silap CSR, untuk memantau data penyaluran bantuan, kemitraan, dan penerima manfaat secara berkala. Di sisi lain realisasi penyaluran modal melalui KUR juga dilakukan, yang saat ini sudah mencapai Rp361,36 triliun untuk 10,31 juta debitur.

Sementara, terkait perkembangan ekonomi kreatif, Jawa Tengah telah memiliki 14 Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di antaranya, Kabupaten Grobogan untuk kuliner Nasi Jagung-Ayam Pecok-Kedelai/Japede, Kabupaten Pati untuk Seni Pertunjukan, Kabupaten Cilacap untuk Animasi-Film-Video, Kota Surakarta dan Kota Semarang juga telah resmi menjadi anggota UNESCO Creative City Networks (UCCN) kategori Crafts & Folk-Art, untuk kerajinan dan seni rakyat.

Selain itu, sebanyak 29 kabupaten/ kota sudah memiliki Komite Ekonomi Kreatif untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah. Komitmen terkait ekonomi kreatif dilakukan dengan pengembangan creative hub Jateng. Fokusnya untuk optimalisasi sarana, menjawab kebutuhan generasi Z, dan penguatan infrastruktur digital.

“Kita bina (UMKM dan Ekonomi Kreatif) sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di tingkat kecil. Secara tidak langsung ini akan menambah kuatnya ekonomi daerah,” kata Luthfi.

Founder Disway Network, Dahlan Iskan mengatakan, penghargaan tersebut diberikan sebagai dukungan untuk kepala daerah. Sosok yang juga konsisten mengawal otonomi daerah melalui lembaga pro otonomi daerah itu menilai, di tengah situasi dan tantangan global seperti saat ini, dia yakin masih ada kepala daerah istimewa.

“Kita memberikan penghargaan ini, karena di saat paling sulit tetap akan lahir beberapa kepala daerah yang istimewa. Ini salah satu pembelajaran terbaik untuk kajian efisiensi dan skala prioritas,” katanya. (Humas Jateng)*ul

Ahmad Luthfi Ungkap Fokus Jateng Optimalkan Ekonomi Hijau pada 2026

Kamis, 11 Juni 2026 23:40 WIB

Penulis: Teguh Adi Prasetyo, Editor: MA

<https://www.beritasatu.com/jateng/3001818/ahmad-luthfi-ungkap-fokus-jateng-optimalkan-ekonomi-hijau-pada-2026>

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut mendorong pengembangan industri padat modal, energi terbarukan, dan ekonomi hijau (green economy) sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut mendorong pengembangan industri padat modal, energi terbarukan, dan ekonomi hijau (green economy) sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya. (Beritasatu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengarahkan fokus investasi ke sektor yang lebih modern dan berkelanjutan. Mulai 2026, Jawa Tengah menargetkan pengembangan industri padat modal, energi terbarukan, dan ekonomi hijau (green economy) sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan perubahan arah investasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan tren global yang semakin mengutamakan industri ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Luthfi dalam diskusi bersama Pemimpin Redaksi Beritasatu.com, Syukri Rahmatullah, pada program Beritasatu Spesial Hari Ulang Tahun ke-13 Beritasatu.com, Kamis (11/6/2026).

Menurut Luthfi, fokus investasi Jawa Tengah pada 2025 masih didominasi sektor padat karya. Namun, mulai tahun ini arah pengembangan industri mulai bergeser ke sektor yang membutuhkan investasi besar dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

"Pertama, kemarin 2025 itu (fokus investasi) adalah (sektor) padat karya, tetapi pada 2026 ini sudah mulai menjurus ke padat modal termasuk ekonomi terbarukan dan green economy. Di wilayah (Jawa Tengah) kita sudah mulai menarik," ucapnya saat ditanya mengenai sektor investasi yang disarankan.

Ia menilai sektor energi terbarukan dan ekonomi hijau memiliki prospek besar dalam menarik minat investor, khususnya dari luar negeri. Hal itu sejalan dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap pembangunan berkelanjutan dan penggunaan energi ramah lingkungan.

"Sehingga secara tidak langsung ini akan menambahkan kepercayaan publik terutama luar negeri terhadap energi terbarukan dan green economy, karena ke depan dunia akan menanti daripada ekonomi terbarukan di wilayah kita," katanya.

Luthfi optimistis transformasi arah investasi tersebut dapat berjalan baik karena didukung kondisi ekonomi Jawa Tengah yang terus tumbuh positif. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,61%.

Selain itu, Jawa Tengah juga dinilai memiliki sejumlah keunggulan untuk menarik investasi, mulai dari ketersediaan lahan yang luas, tenaga kerja yang kompetitif, hingga komitmen pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan.

Menurut Luthfi, kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penting untuk menghindari hambatan investasi dan mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di daerah. Dengan pergeseran fokus ke industri padat modal dan ekonomi hijau, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.

5 Juta Kendaraan di Jawa Tengah Menunggak Pajak, Nilainya Capai Rp 3,7 Triliun

Kamis, 11 Juni 2026 10:51 WIB

Titis Anis Fauziah, Sari Hardiyanto

<https://regional.kompas.com/read/2026/06/11/105113378/5-juta-kendaraan-di-jawa-tengah-menunggak-pajak-nilainya-capai-rp-37>

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mencatat sebanyak 5.124.243 unit kendaraan masih menunggak pajak hingga akhir 2025.

Total nilai tunggakan pajak yang belum dilunasi diperkirakan mencapai Rp 3,759 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Muhamad Masrofi, menuturkan jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten/kota berkisar 17 juta unit yang terdiri dari 4.558.563 kendaraan roda dua dan 546.780 kendaraan roda empat.

"Dari total 17 juta itu, aktif hanya sekitar 12 juta. Jadi 5.124.243 kendaraan menunggak pajak per Desember 2025, roda dua 4.558.563 unit dan roda empat 546.780 unit," ungkap Masrofi saat diwawancarai di kantornya, Rabu (10/6/2026).

Tunggakan terbesar

Dia merinci tunggakan pajak dari 5.124.243 unit kendaraan di 35 kabupaten/kota itu mencapai Rp 2,881 triliun. Sedangkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 877,7 miliar.

"Maka total piutang atau jumlah masyarakat belum bayar pajak itu ada Rp3,759 triliun," bebernya.

Adapun daerah yang memiliki tunggakan piutang PKB terbesar yakni di Kota Semarang senilai Rp 490 miliar dari total 473.257 unit kendaraan.

Pendapatan terbesar dari pajak kendaraan bermotor

Lalu diikuti sejumlah daerah dengan nilai tunggakan di atas Rp 100 miliar. Mulai dari Kabupaten Banyumas dengan nilai tunggakan Rp 162 miliar, Kabupaten Cilacap senilai Rp 158 miliar, Kabupaten Brebes sebesar Rp 147 miliar, Kabupaten Semarang sebanyak Rp 135 miliar, dan Kabupaten Tegal menunggak sejumlah Rp 133 miliar.

Masrofi menyebut PKB berkontribusi menyumbang pendapatan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, tunggakan sebesar Rp 3,759 triliun pajak yang belum dibayarkan dinilai cukup berdampak pada penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng.

"Kalau pendapatan kurang, pembiayaan pembangunan juga berkurang. Salah satu pembiayaan dari APBD itu untuk pelaksanaan pembangunan Jateng, termasuk infrastruktur jalan," bebernya.